

Wati Kurniawati,
Buha Aritonang

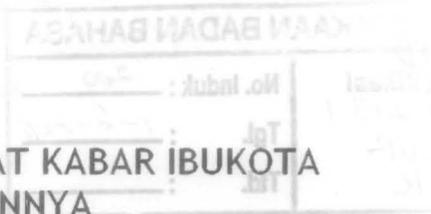
KOSAKATA DOMINAN SURAT KABAR IBUKOTA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

8 1



**PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA**





**KOSA KATA DOMINAN SURAT KABAR IBUKOTA
DALAM KAITANNYA
DENGAN PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK**

**PERPUSTAKAAN
BADAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Wati Kurniawati
Buha Aritonang**

**Pusat Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional
Jakarta
2010**

KOSAKATA DOMINAN SURAT KABAR IBUKOTA
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

Penyelaras Bahasa
Ebah Suhaebah

Perancang Sampul
Efgeni

PUSAT BAHASA	
Klasifikasi PB 199.218 1 KUR k	No. Induk : 200 Tgl. : 1-6-2011 Ttd. :

Penata Letak
Andri Supriyadi

Pusat Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta 13220

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

499.218 1

KUR
k

KURNIAWATI, Wati dan Buha Aritonang

Kosakata Dominan Surat Kabar Ibukota dalam Kaitannya dengan Pembentukan Opini Publik/Wati Kurniawati dan Buha Aritonang.—Jakarta: Pusat Bahasa, 2010

ISBN 978-979-069-010-3

1. BAHASA INDONESIA-KOSAKATA
2. BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN



**KOSA KATA DOMINAN SURAT KABAR IBUKOTA
DALAM KAITANNYA
DENGAN PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK**

**PERPUSTAKAAN
BADAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Wati Kurniawati
Buha Aritonang**

**Pusat Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional
Jakarta
2010**

KOSAKATA DOMINAN SURAT KABAR IBUKOTA
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

Penyelaras Bahasa
Ebah Suhaebah

Perancang Sampul
Efgeni

PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA

PB Klasifikasi 499.218 1 KUR k	No. Induk : 200	Penata Letak
	Tgl. : 1-6-2011	Andri Supriyadi
	Ttd. : _____	Pusat Bahasa

Kementerian Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta 13220

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

499.218 1

KUR

k

KURNIAWATI, Wati dan Buha Aritonang

Kosakata Dominan Surat Kabar Ibukota dalam Kaitannya dengan Pembentukan Opini Publik/Wati Kurniawati dan Buha Aritonang.—Jakarta: Pusat Bahasa, 2010

ISBN 978-979-069-010-3

1. BAHASA INDONESIA-KOSAKATA
2. BAHASA INDONESIA-PEMAKAIAN

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA

Bahasa menjadi identitas suatu bangsa. Melalui bahasa orang dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat, bahkan dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat penuturnya. Seiring dengan kemajuan zaman, bahasa Indonesia mengalami perkembangan sebagai akibat globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains.

Perkembangan bahasa Indonesia tidak bisa dibiarkan tanpa upaya-upaya yang terencana, terarah, dan menyeluruh. Wujud upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Upaya tersebut tidak terhindar dari situasi kebahasaan dan kesastraan yang dihadapi pada saat ini. Kondisi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak hanya menyangkut bahasa Indonesia semata, tetapi juga bertemali dengan keanekaragaman bahasa dan sastra daerah serta penggunaan bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa Inggris. Dalam pendataan terakhir tercatat bahwa di Indonesia terdapat 731 bahasa daerah (726 bahasa masih digunakan dan 5 bahasa akan/telah punah). Dari bahasa-bahasa daerah itu, hanya sebagian kecil bahasa daerah yang memiliki sistem aksara dan tradisi tulis, antara lain, Jawa, Sunda, Minang, Madura, Batak, Aceh, dan Bali. Tanpa sistem aksara dan tradisi tulis, laju kepunahan atau kerusakan bahasa itu diduga akan lebih cepat.

Di tengah keterancaman kepunahan bahasa dan sastra daerah, tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi informasi, yang semakin sarat dengan tuntutan

dan tantangan globalisasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi itu telah menempatkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, pada posisi strategis yang memungkinkan bahasa itu memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa dan memengaruhi perkembangan bahasa Indonesia.

Situasi kebahasaan yang seperti itu harus ditangani secara terencana, terarah, dan menyeluruh. Pusat Bahasa, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang mengurus masalah kebahasaan, memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi pengkajian, pengembangan, dan pembinaan di bidang kebahasaan dan kesastraan. Upaya pengkajian/penelitian kebahasaan, antara lain, mencakupi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolingistik, dan dialektologi, termasuk berbagai aspek di dalamnya.

Agar hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa tersebut dapat sampai kepada masyarakat, lebih lanjut Pusat Bahasa melakukan penerbitan terhadap hasil pengkajian tersebut. Salah satu di antaranya adalah penerbitan hasil penelitian Wati Kurniawati dan Buha Aritonang yang berjudul *Kosakata Dominan Surat Kabar Ibukota dalam Kaitannya dengan Pembentukan Opini Publik*. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengembangan linguistik di Indonesia serta dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang memerlukannya. Atas penerbitan buku ini, sudah selayaknya, Pusat Bahasa mengucapkan terima kasih kepada peneliti, penilai, penyunting, dan pelaksana serta pihak-pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juni 2010

Yeyen Maryani
Koordinator Intern

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1.4 Relevansi Penelitian	3
1.5 Metodologi dan Teknik Penelitian	3
1.6 Korpus Data	4
1.7 Kerangka Teori	7
1.8 Sistematika Penyajian	10
BAB II FREKUENSI KOSAKATA DOMINAN DALAM SURAT KABAR IBU KOTA	12
2.1 Frekuensi Kosakata	12
2.2 Daftar Kosakata Bentuk Dasar, Turunan, dan Unsur Asing	16
2.3 Frekuensi Kosakata Berdasarkan Kelas Kata	47
BAB III JENIS KALIMAT.....	48
3.1 Pengantar	48
3.2 Kalimat Deklaratif atau Berita	48
3.3 Kalimat Interogatif atau Tanya	51
3.4 Kalimat Eksklamatif atau Seruan.	52
3.5 Frekuensi Jenis Kalimat.	53

BAB IV PEMAKAIAN KATA YANG LAYAK DALAM	
SURAT KABAR IBU KOTA	54
4.1 Pengantar	54
4.2 Pemakaian Ragam Formal	55
4.3 Pemakaian Ragam Takformal	58
4.4 Pemakaian Unsur Bahasa Asing	60
BAB V PEMAKAIAN KATA YANG TEPAT DAN CERMAT DALAM	
SURAT KABAR IBU KOTA	63
5.1 Pengantar	63
5.2 Hiperonimi dalam Pilihan Kata	63
5.3 Makna Denotasi	67
5.4 Makna Konotasi	70
5.5 Makna Asosiatif	75
5.6 Makna Afektif/Emotif	78
BAB VI PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK DARI SURAT KABAR IBU KOTA ...	81
6.1 Kelas Kata yang Dominan	81
6.2 Makna Kata dalam Konteks	81
BAB VII PENUTUP.....	85
7.1 Simpulan	85
7.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ungkapan “pena lebih tajam dari pedang” tidak tepat lagi untuk saat ini. Sekarang digunakan komputerisasi walaupun substansinya tetap, yaitu ungkapan penulis yang menggiring opini pendapat pembaca. Pena bukanlah yang dipersoalkan, tetapi dampaknya yang terkait dengan bentuk dan pilihan kata. Bentuk dan pilihan kata itu digunakan untuk membuat kalimat, paragraf, dan wacana yang menjadi opini publik. Berdasarkan hal itu, diteliti muatan makna yang terkandung dalam kosakata dengan asumsi terbentuk dari konotasi dan muncul stigma-stigma. Selain itu, diteliti pula kelas katanya.

Sebagai contoh, dalam data ditemukan kosakata *koalisi* yang bermakna ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen’ (KBBI, 2002:577) dan *aliansi* yang bermakna ‘ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik’ (KBBI, 2002:29). Kedua kosakata tersebut termasuk kelas kata nomina. Data dalam rubrik “Bidik” dengan topik “Belalai Dua Parpol” ini memperlihatkan pemakaian kosakata *koalisi* dan *aliansi*. Kedua kata itu merupakan citraan yang identik dengan bidang politik.

Penelitian tentang kosakata dalam media cetak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain, Muhadjir *et al.* (1996) dan Artanti *et al.* (2005). Muhadjir *et al.* (1996:2–4) dalam penelitiannya yang berjudul *Frekuensi Kosakata Bahasa Indonesia* menghitung frekuensi kemunculan kata dengan sumber data surat kabar *Kompas* tahun 1994. Perhitungan kosakata tersebut digarap dengan model pengolahan frekuensi yang di-

hitung untuk menjawab pertanyaan berapa jumlah bentuk morfologis yang dapat dimunculkan oleh sebuah kata dasar.

Menurut Muhadjir *et al.* (1996, 2–3), perhitungan kosakata telah dilakukan oleh R.R. Hardjadibrata dari Monash University dan John La Prevost. Selanjutnya, dikatakan bahwa R.R. Hardjadibrata telah menghitung frekuensi kosakata berdasarkan majalah dan koran pada tahun 1969. Berbeda dengan R.R. Hardjadibrata, untuk kepentingan pengajaran yang cepat dan efisien, John La Prevost pada tahun 1852 berhasil menerbitkan kosakata bahasa Melayu (Malaysia). Hasil perhitungan frekuensi ketiga peneliti ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 3.

Sementara itu, Artanti *et al.* (2005) meneliti “Leksikon dalam Majalah Remaja Tahun 1980-an–tahun 2000-an”. Hasil temuan menunjukkan bahwa leksikon tahun 1980-an dan 1990-an terpengaruh bahasa daerah (Jawa dan Sunda) dan bahasa asing. Sementara itu, leksikon tahun 2000-an sebagian besar terpengaruh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Berdasarkan kepustakaan tersebut, penelitian “Kosakata Dominan Surat Kabar Ibu Kota dalam Kaitannya dengan Pembentukan Opini Publik” belum pernah dikaji para peneliti bahasa. Sehubungan dengan hal itu, tim peneliti ini mengkaji masalah tersebut. Masalah perhitungan frekuensi kosakata dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan frekuensi kemunculannya satu demi satu. Oleh karena itu, dapat dilihat perkembangan kosakata bahasa Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir dengan sumber data surat kabar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang kosakata dominan ini merumuskan beberapa permasalahan. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimanakah kosakata dalam artikel rubrik “Editorial”, “Tajuk Rencana”, “Tajuk”, “Tajuk Utama”, “Bidik” dan “Tajuk Rencana I atau Tajuk Rencana II” dipandang dari segi kelayakan stilistiknya?
 - (a) Unsur apa saja yang berfungsi sebagai pemarkah dari segi kesesuaian kata itu?
 - (b) Adakah pengaruh pilihan kata ragam formal, tidak formal, dan cakapan?
 - (c) Apakah ada pengaruh unsur bahasa daerah atau asing?

- (2) Bagaimanakah ketepatan dan kecermatan pemilihan kata yang digunakan dalam artikel Tajuk Rencana, Tajuk, Editorial, dan Bidik?
- (a) Unsur apa saja yang berfungsi sebagai pemarkah dari segi ketepatan dan kecermatan pemilihan kata itu?
 - (b) Apakah terdapat pemakaian kata yang bermakna denotatif dan konotatif?
 - (c) Adakah pemakaian kata konkret, abstrak, umum, dan khusus di dalam konteksnya?
- (3) Bagaimanakah kelas kata kosakata dominan dalam konteksnya?

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan kosakata dominan dalam surat kabar yang terbit di ibu kota berdasarkan bentuk dan pilihan kata serta kelas kata. Sehubungan dengan hal itu, deskripsi yang diharapkan meliputi (1) frekuensi kosakata bentuk dasar dan turunan, (2) jenis kalimat, (3) pemakaian kata yang sesuai dengan konteksnya, (4) pemakaian kata yang tepat dan cermat, (5) kelas kata kosakata dominan, dan (6) Pembentukan opini publik dilihat dari frekuensi kelas kata dan makna yang terkandung dalam kata tersebut dalam konteks.

1.4 Relevansi Penelitian

Penelitian ini ada relevansinya untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dalam bidang pembinaan bahasa Indonesia, data dan temuan ini berguna untuk para penyuluh bahasa Indonesia yang baik dan benar, pembina, dan masyarakat yang dibina. Dengan demikian, pemakaian pemilihan kata yang layak dan yang baik dan benar. Selain itu, deskripsi pemakaian pemilihan kata yang layak dan tepat dalam artikel rubrik "Editorial", "Tajuk Rencana", "Tajuk", "Tajuk Utama", "Bidik" dan "Tajuk Rencana I atau Tajuk Rencana II" dapat menjadi sumbangan bagi kelengkapan khasanah kepastakaan linguistik Indonesia.

1.5 Metodologi dan Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya. Hasil yang diperoleh berupa perian bahasa yang dapat dikatakan sebagai paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1986:62).

Berdasarkan uraian tersebut, metode deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

Metode tersebut ditunjang dengan teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan digunakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu kosakata dominan dalam artikel “Editorial”, “Tajuk Rencana”, “Tajuk”, “Tajuk Utama”, “Bidik” dan “Tajuk Rencana I atau Tajuk Rencana II”. Data diklasifikasikan berdasarkan (1) pemakaian kata yang sesuai, (2) pemakaian kata yang tepat dan cermat, dan (3) kelas kata kosakata dominan. Selanjutnya, data diketik dan diberi kode sesuai dengan nama surat kabar, rubrik, topik, dan waktu. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, data yang telah diklasifikasikan itu dianalisis. Penelitian ini diakhiri dengan laporan tentang hasil temuan.

1.6 Korpus Data

Samarin (1966) berpendapat bahwa korpus data harus memenuhi syarat (1) keragaman secara dialektis, (2) bersifat alami, (3) beragam, (4) berulang, (5) lengkap, dan (6) menarik. Korpus data dalam penelitian ini adalah surat kabar. Populasi dalam penelitian ini adalah surat kabar ibu kota atau surat kabar yang terbit di Jakarta, yaitu *Media Indonesia*, *Koran Tempo*, *Kompas*, *Investor Daily*, *Bisnis Indonesia*, *Berita Kota*, *Suara Pembaruan*, dan *Republika*. Penentuan sampel ini berdasarkan peringkat koran yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa. Surat kabar yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive*.

Penentuan sampel ini berdasarkan pendapat Nasution (1987). Menurut Nasution (1987:118–128), penentuan sampel dapat dilakukan secara sampel acak dan sampel yang *purposive*. Sampel acak adalah bahwa setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Sementara itu, Wray (1998) mengemukakan bahwa sampel yang mewakili adalah 95% dari populasi. Pendapat Wray (1998) tentang sampel diacu dalam penelitian ini.

Berdasarkan kriteria tersebut terpilih sebagai sampel penelitian ini sebanyak 40 artikel dalam rubrik “Editorial”, “Tajuk Rencana”, “Tajuk”,

“Tajuk Utama”, “Bidik” dan “Tajuk Rencana” pada bulan Mei–Juli 2007. Keempat puluh artikel itu adalah sebagai berikut.

- (1) *Media Indonesia*; Senin, 11 Juni 2007; Editorial; “Hapuskan Izin Presiden”
- (2) *Media Indonesia*; Selasa, 12 Juni 2007; Editorial; “Negara dengan 1.000 Rekening Liar”
- (3) *Media Indonesia*; Rabu, 13 Juni 2007; Editorial; “Paket Ekonomi yang Miskin Implementasi”
- (4) *Media Indonesia*; Kamis, 14 Juni 2007; Editorial; “Ingin Swasembada? Belajarlah dari China”
- (5) *Media Indonesia*; Jumat, 15 Juni 2007; Editorial; “Tekad Menertibkan 1.000 Rekening Liar”
- (6) *Koran Tempo*; Senin, 11 Juni 2007; Editorial; “Pangkas Birokrasi Tanpa Kompromi Hapuskan Izin Presiden”
- (7) *Koran Tempo*; Selasa, 12 Juni 2007; Editorial; “Perang Melawan Teroris”
- (8) *Koran Tempo*; Rabu, 13 Juni 2007; Editorial; “Wartawan dan Dana Rokhmin”
- (9) *Koran Tempo*; Kamis, 14 Juni 2007; Editorial; “Dakwaan Lemah Kasus Hilton”
- (10) *Koran Tempo*; Jumat, 15 Juni 2007; Editorial; “Upaya Mengubur Kebebasan Pers”
- (11) *Kompas*; Senin, 11 Juni 2007; Tajuk Rencana; “Perlu Sinergi Pemerintah-DPR”
- (12) *Kompas*; Selasa, 12 Juni 2007; Tajuk Rencana; “Jangan Politik untuk Ekonomi”
- (13) *Kompas*; Rabu, 13 Juni 2007; Tajuk Rencana; “Minyak Goreng Terus Bermasalah”
- (14) *Kompas*; Kamis, 14 Juni 2007; Tajuk Rencana; “Setelah Inpres No. 6 Lalu...”
- (15) *Kompas*; Jumat, 15 Juni 2007; Tajuk Rencana; “Terus Ciptakan Rasa Aman”
- (16) *Investor Daily*; Senin, 11 Juni 2007; Tajuk; “Menunggu kebangkitan Industri Asuransi”
- (17) *Investor Daily*; Selasa, 12 Juni 2007; Tajuk; “Mimpi Swasembada Pangan”

- (18) *Investor Daily*; Rabu, 13 Juni 2007; Tajuk; “Satu Lagi dari ‘Mr Paket’”
- (19) *Investor Daily*; Kamis, 14 Juni 2007; Tajuk; “Konsumsi Semen Naik Tajam”
- (20) *Investor Daily*; Jumat, 15 Juni 2007; Tajuk; “Bank Diimbau Lebih Berani Salurkan Kredit”
- (21) *Bisnis Indonesia*; Senin, 11 Juni 2007; Tajuk Utama; “Dilema Subsidi”
- (22) *Bisnis Indonesia*; Selasa, 12 Juni 2007; Tajuk Utama; “G-8 & Komitmen Pemanis”
- (23) *Bisnis Indonesia*; Kamis, 14 Juni 2007; Tajuk Utama; “Kredit Macet Bank BUMN”
- (24) *Bisnis Indonesia*; Jumat, 15 Juni 2007; Tajuk Utama; “Bersih dari Teroris”
- (25) *Bisnis Indonesia*; Rabu, 20 Juni 2007; Tajuk Utama; “Harta Negara Menguap”
- (26) *Berita Kota*; Selasa, 22 Mei 2007; Bidik; “Senjakala Reformasi”
- (27) *Berita Kota*; Selasa, 26 Juni 2007; Bidik; “Inti Masalah”
- (28) *Berita Kota*; Rabu, 27 Juni 2007; Bidik; “Belalai Dua Parpol”
- (29) *Berita Kota*; Senin, 3 Juli 2007; Bidik; “Presiden Juga Manusia”
- (30) *Berita Kota*; Rabu, 11 Juli 2007; Bidik; “Borobudur”
- (31) *Suara Pembaruan*; Senin, 11 Juni 2007; Tajuk Rencana II; “Interpelasi dan Kenegarawanan”
- (32) *Suara Pembaruan*; Selasa, 12 Juni 2007; Tajuk Rencana II; “Impor Benih Memalukan”
- (33) *Suara Pembaruan*; Rabu, 13 Juni 2007; Tajuk Rencana I; “Korupsi Ditangani Biasa Lagi?”
- (34) *Suara Pembaruan*; Kamis, 14 Juni 2007; Tajuk Rencana I; “Kebijakan versus Implementasi”
- (35) *Suara Pembaruan*; Jumat, 15 Juni 2007; Tajuk Rencana I; “Sempurnakan Protap TNI”
- (36) *Republika*; Senin, 11 Juni 2007; Tajuk; “Bangsa yang Mandiri”
- (37) *Republika*; Selasa, 12 Juni 2007; Tajuk; “Penurunan Harga Minyak Goreng Gagal”
- (38) *Republika*; Rabu, 13 Juni 2007; Tajuk; “Pembatalan DCA”
- (39) *Republika*; Kamis, 14 Juni; Tajuk; “Dimensi Komplik Tanah”
- (40) *Republika*; Jumat, 15 Juni 2007; Tajuk; “Paket Kebijakan”

1.7 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori secara eklektik, sesuai dengan sifat penelitian ini. Kerangka kerja teoretis yang diacu untuk menganalisis data adalah konsep dari beberapa ahli bahasa tentang kosakata, pilihan kata (diksi), kelas kata, jenis kalimat, dan relasi makna. Berdasarkan hal tersebut, diperhatikan pendapat Verhaar (2001) tentang kosakata. Diperhatikan pula tulisan Keraf (1981) yang berjudul *Diksi dan Gaya Bahasa: Komposisi Lanjutan I*. Keraf (1981) berpendapat bahwa mereka yang luas kosakatanya akan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memilih setepat-tepatnya kata yang mana yang paling sesuai dengan yang dimaksudnya. Selain itu, Keraf (1981) berpendapat bahwa kesesuaian (kelayakan) diksi dapat dilihat berdasarkan pemakaian ragam formal (ragam baku), ragam takformal (ragam takbaku), dan ragam cakapan. Selanjutnya, diacu pendapat Moeliono (1989) tentang "Diksi atau Pilihan Kata" dalam *Kembara Bahasa* dan Alwi et al. tentang *Bentuk dan Pilihan Kata dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Alwi et al., 1998). Masalah kelas kata dalam bahasa Indonesia mengacu pendapat Kridalaksana (1986). Adapun relasi makna mengacu pendapat Darmojuwono (2005). Berikut ini adalah uraian kosakata, pilihan kata (diksi), jenis kalimat, kelas kata, dan relasi makna.

1.7.1 Kosakata

Kridalaksana (1982) menyebut kosakata dengan istilah leksikon. Menurut Kridalaksana (1982:98), leksikon adalah komponen bahasa yang memuat informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Selanjutnya, dikatakan bahwa leksikon adalah kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis atau suatu bahasa; kosakata; perbendaharaan kata. Kemudian, disebut pula daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis.

Sementara itu, Verhaar (2001:12) menyatakan bahwa leksikon dalam ilmu linguistik berarti perbendaharaan kata-kata itu sendiri yang sering disebut leksem. Dalam penelitian ini yang dimaksud kosakata adalah perbendaharaan kata. Setiap kata mempunyai arti sendiri.

1.7.2 Kelas Kata

Dalam linguistik modern kategorisasi kata dianggap sebagai salah satu aspek tata bahasa atau gramatika. Dalam kategori gramatikal, kelas

kata termasuk kategori primer. Menurut Kridalaksana (1986:49–117), pembagian kelas kata dalam tata bahasa Indonesia terdiri atas verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbial, interogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, kategori fatis, dan interjeksi. Selanjutnya, dikatakan bahwa kelas kata adalah bagian dari sintaksis. Dalam penelitian ini dilihat kelas kata verba, adjektiva, dan nomina.

1.7.3 Jenis Kalimat

Menurut Alwi, *et al.* (1998:311), Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jenis kalimat dapat ditinjau dari sudut jumlah klausanya, bentuk sintaksisnya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek dan predikatnya. Dalam penelitian ini jenis kalimat ditinjau dari sudut bentuk dan ketegori sintaksisnya. Jenis kalimat ini terdiri atas kalimat deklaratif atau kalimat berita, kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan kalimat eksklamatif atau kalimat seruan.

1.7.4 Ragam Formal dan Takformal

Ragam baku (formal) adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka kerja rujukan norma bahasa dalam penggunaannya, sedangkan ragam tidak baku (takformal) adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh cirri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku (Arifin dan S. Amran, 1988: 18–19). Sementara itu, Alwi *et al.* (1998:13–14) menyatakan bahwa ragam bahasa standar (formal) memiliki sifat kemantapan dinamis, kecendekiaan, dan keseragaman.

Yang dimaksud dengan ragam formal dalam penelitian ini adalah ragam yang dibakukan dan diakui masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan kerangka acuan norma bahasa dalam pemakaiannya. Adapun pengertian ragam takformal dalam penelitian ini adalah ragam yang tidak dibakukan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma dan kaidah baku.

1.7.5 Hiponimi

Menurut Verhaar (2001:196), hubungan kehiponiman dalam pasangan kata adalah hubungan antara yang lebih kecil (secara ekstensional) dan

yang lebih besar (secara ekstensional pula). Misalnya, kursi adalah hiponim terhadap perabot. Hubungan kehiponiman tidak berlaku timbal balik. Sementara itu, Saeed (2000:68) mengatakan bahwa hiponimi adalah relasi pencantuman. Sebuah hiponim termasuk makna kata yang lebih umum. Contoh: anjing dan kucing adalah hiponim dari binatang.

Dalam penelitian ini hiponimi yang diacu adalah pendapat Darmojuwono (2005). Hiponimi adalah 'relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik, seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang' (Darmojuwono, 2005:118). Lebih lanjut, dikatakan bahwa anggrek, mawar, aster, dan tulip berhiponimi dengan bunga, sedangkan kucing, anjing, kambing, dan kuda berhiponimi dengan binatang. Bunga merupakan superordinat (hiperonim) bagi anggrek, mawar, aster, dan tulip, sedangkan binatang menjadi superordinat bagi kucing, anjing, kambing, dan kuda. Anggrek, mawar, aster, dan tulip merupakan kohiponim bunga; demikian pula kucing, anjing, kambing, dan kuda merupakan kohiponim binatang.

1.7.6 Makna Denotasi, Konotasi, Asosiatif, dan Afektif/Emotif

Untuk memahami relasi makna, penulis mengacu beberapa pendapat ahli bahasa. Keraf (1881:21–23) menyatakan bahwa pilihan kata atau diksi sangat ditentukan oleh faktor makna dan konteks pemakaian; konteks yang berbeda akan menentukan diksi yang berbeda pula, bahkan untuk bentuk kata yang sama dapat bermakna lain karena situasi pemakaian yang berbeda. Selanjutnya, disebutkan bahwa sebuah kata dapat mempunyai makna yang bersifat denotatif/harfiah (makna langsung/tunggal, yang tidak mempunyai nilai rasa tertentu), di samping makna kata yang bersifat konotatif/tambahan (yang mengandung makna tambahan, perasaan-perasaan tertentu), Selain hal itu, dikemukakan bahwa kesesuaian (kelayakan) diksi dapat dilihat berdasarkan pemakaian ragam formal, ragam takformal, dan ragam cakapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Keraf (1981:19) juga mengungkapkan bahwa kemampuan penutur membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pandangan Keraf ini dalam konsep Alwi

et al. (1992:11) disebut sebagai tolok ukur dalam pemilihan kata, yaitu ketepatan (kata yang mempunyai makna yang dapat mengungkapkan atau sesuai dengan gagasan pemakai bahasa), kebenaran (kata yang diucapkan atau ditulis sesuai dengan bentuk yang benar), dan kelaziman (kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan gagasan tertentu).

Sehubungan dengan makna yang bersifat konotatif, Moeliono (1989:173–177) menganggapnya sebagai makna yang bersifat pribadi dan bergabung pada pengalaman orang seorang dengan kata atau dengan barang atau gagasan yang diacu oleh kata itu. Selanjutnya, dinyatakan bahwa makna konotatif cenderung dipakai dalam bentuk kiasan atau majas. Berdasarkan data dalam penelitian ini ditemukan makna yang bersifat konotatif.

Leech (1981:18) mengemukakan bahwa makna asosiatif adalah tautan dalam ingatan pada orang atau benda yang berhubungan dengan pengalaman. Sementara itu, Darmojuwono (2005:119) menyatakan bahwa Makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Kemudian, disebutkan bahwa makna asosiatif dikaji di bidang psikolinguistik Makna denotatif *vila* adalah 'rumah peristirahatan di luar kota'. Selain makna denotatif itu, bagi kebanyakan orang Indonesia *vila* juga mengandung makna asosiasif 'gunung', 'alam', 'pedesaan', atau 'sungai' bergantung pada pengalaman seseorang.

Kridalaksana (1982:12) menyebutkan bahwa afektif adalah gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Dikatakan pula bahwa makna afektif sama dengan makna emotif. Makna asosiatif terkait erat dengan asosiasi yang ada dalam benak seseorang ketika mendengar atau membaca kata tertentu. Berbeda dengan makna asosiatif, Darmojuwono (2005:119–120) menyebutkan bahwa makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat positif atau negatif. Kata *jujur*, *rendah hati*, dan *bijaksana* menimbulkan makna afektif yang positif, sedangkan *korupsi* dan *kolusi* menimbulkan makna afektif yang negatif. Untuk makna asosiatif dan afektif dalam penelitian ini diacu pendapat Darmojuwono (2005).

1.8 Sistematika Penyajian

Penelitian ini disusun atas tujuh bab. Bab I menyajikan pendahuluan yang mengandung penjelasan tentang latar belakang dan rumusan masalah.

Selain itu, dipaparkan tentang tujuan dan ruang lingkup penelitian serta relevansi penelitian. Selanjutnya, diuraikan tentang metodologi penelitian yang menyajikan teknik dan analisis data penelitian serta penyusunan laporan penelitian. Kemudian, disajikan mengenai korpus data yang berisi sumber data penelitian, kerangka teori yang memaparkan beberapa pendapat ahli bahasa yang diacu dalam penelitian ini. Pada bagian terakhir diuraikan tentang sistematika penyajian.

Bab II berisi pembahasan frekuensi kosakata bentuk dasar dan turunan. Selain itu, dibahas frekuensi unsur asing. Kemudian dibahas tentang frekuensi kosakata berdasarkan kelas kata. Bab III menyajikan pembahasan jenis kalimat ditinjau dari sudut bentuk dan ketegori sintaktisnya. Jenis kalimat ini terdiri atas kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat eksklamatif. Berikutnya, Bab IV membahas pemakaian ragam formal dan pemakaian ragam takformal. Selain itu, dibahas pula pemakaian unsur asing dan daerah.

Pada bab V disajikan relasi makna, yaitu hiponimi dalam pilihan kata, makna denotasi dan konotasi. Selanjutnya, dibahas makna asosiatif dan afektif/emotif. Bab VI membahas pembentukan opini publik dilihat dari kelas kata dan makna kata dalam konteks. Bab VII laporan penelitian ini berisi deskripsi tentang temuan penelitian yang merupakan simpulan dan saran atau sebagai penutup.

Penelitian ini diakhiri dengan penyusunan daftar pustaka yang menjadi sumber acuan penelitian ini.

BAB II

FREKUENSI KOSAKATA DOMINAN DALAM SURAT KABAR IBU KOTA

2.1 Frekuensi Kosakata

Dalam penelitian ini dipergunakan satu cara menghitung frekuensi, yakni dihitung berdasarkan frekuensi satu demi satu kata. Jumlah data dalam penelitian ini 3.400 kata. Sebagian kata yang dijadikan data frekuensi kata ini muncul sebanyak 28.477 kali (Sebagian kata akan dilanjutkan pada tahap berikutnya). Untuk memperlihatkan gambaran frekuensi kemunculannya itu, diambil 200 kata yang berfrekuensi paling tinggi. Angka frekuensi mulai 596 pada nomor pertama dan pada nomor kedua ratus hanya 13. Berikut ini adalah daftar frekuensi 200 kosakata teratas.

TABEL 1
FREKUENSI KOSAKATA DALAM SURAT KABAR IBU KOTA

No.	Entri	Frekuensi	No.	Entri	Frekuensi
1.	yang	596	101.	triliun	22
2.	dan	468	102.	cepat	22
3.	itu	370	103.	hingga	22
4.	tidak	260	104.	anggota	27
5.	di	255	105.	apa	26
6.	ini	218	106.	bangsa	26
7.	kita	215	107.	benar	25
8.	untuk	184	108.	berbagai	25
9.	dalam	170	109.	sebelum	25

10.	dengan	168	110.	sungguh	25
11.	dari	151	111.	air	25
12.	jadi	150	112.	daya	25
13.	bisa	128	113.	investasi	25
14.	tak	120	114.	jawab	24
15.	tahu	101	115.	kedua	24
16.	ada	93	116.	sebuah	24
17.	tahun	91	117.	biasa	24
18.	karena	89	118.	itulah	24
19.	ekonomi	86	119.	kasus	24
20.	dia	80	120.	melakukan	24
21.	harus	80	121.	tindakan	24
22.	sebagai	77	122.	cukup	23
23.	sama	73	123.	data	23
24.	sudah	73	124.	sekarang	23
25.	akan	72	125.	hasil	23
26.	hanya	72	126.	disbanding	23
27.	sah	72	127.	upaya	23
28.	jujur	69	128.	adil	22
29.	kebijakan	68	129.	warga	22
30.	ke	64	130.	sebelumnya	21
31.	sektor	63	131.	sehingga	21
32.	salah	61	132.	sikap	21
33.	adalah	60	133.	sulit	21
34.	banyak	60	134.	terorisme	21
35.	tapi	60	135.	terus	21
36.	kas	57	136.	dapat	21
37.	teror	57	137.	jangan	20
38.	bukan	56	138.	jauh	20
39.	baru	54	139.	sama	20
40.	telah	54	140.	adanya	18
41.	atau	53	141.	akibat	18
42.	soal	53	142.	benih	18
43.	kali	51	143.	dilakukan	18
44.	baik	50	144.	beras	18
45.	semua	50	145.	kecil	18
46.	seperti	48	146.	goreng	18
47.	satu	47	147.	daerah	18

48.	saja	46	148.	bukti	18
49.	besar	45	149.	jaksa	18
50.	rakyat	43	150.	antara	17
51.	tetapi	43	151.	bisnis	17
52.	akhir	42	152.	jari	17
53.	jika	42	153.	janji	17
54.	buat	41	154.	ingin	17
55.	sangat	41	155.	kapan	17
56.	saat	41	156.	ulah	17
57.	bahwa	39	157.	umum	17
58.	bank	39	158.	kemiskinan	17
59.	belum	39	159.	setiap	17
60.	secara	39	160.	alasan	16
61.	atas	38	161.	bagaimana	16
62.	dana	38	162.	bersama	16
63.	harga	38	163.	implementasi	16
64.	teroris	38	164.	isu	16
65.	aksi	37	165.	jaringan	16
66.	asuransi	37	166.	tiga	16
67.	bila	37	167.	uang	16
68.	departemen	37	168.	kembali	16
69.	industri	37	169.	maka	16
70.	bagi	35	170.	sistem	16
71.	jumlah	35	171.	teknologi	16
72.	tani	35	172.	badan	15
73.	hukum	34	173.	banjir	15
74.	dunia	33	174.	bunga	15
75.	semen	33	175.	bulan	15
76.	terjadi	33	176.	cara	15
77.	buah	33	177.	justru	15
78.	usaha	33	178.	tim	15
79.	begitu	32	179.	untung	15
80.	tentunya	32	180.	kemudian	15
81.	jalan	32	181.	setelah	15
82.	sampai	32	182.	situ	15
83.	tanah	31	183.	strategi	15
84.	jua	31	184.	tanya	15
85.	terhadap	31	185.	terutama	15

86.	tinggi	31	186.	yakni	15
87.	agar	30	187.	asal	14
88.	kalau	30	188.	aturan	14
89.	tentang	30	189.	berharap	14
90.	akar	29	190.	berarti	14
91.	tetap	29	191.	bom	14
92.	interpelasi	28	192.	diri	14
93.	izin	28	193.	hari	14
94.	jelas	28	194.	jangka	14
95.	aman	27	195.	kaya	14
96.	hak	27	196.	amat	13
97.	juta	27	197.	bahan	13
98.	sekitar	27	198.	bidang	13
99.	serta	27	199.	dengar	13
100.	tanpa	27	200.	datang	13

Berdasarkan Tabel 1, sejumlah 15 kata berada pada urutan pertama, yaitu kata pertama yang muncul dengan frekuensi 596 hingga kata kelima belah muncul sebanyak 101 kali. Dengan demikian, di atas 100 kali frekuensinya. Sementara itu, 125 kata berikutnya meliputi angka frekuensi sebesar 93 hingga 64. Kemudian, 15 kata berikutnya lagi meliputi angka frekuensi sebesar 63 hingga 50. Selanjutnya, angka frekuensi makin rendah jumlahnya.

Sebagai perbandingan diperlihatkan 20 kata teratas yang dihasilkan oleh Hardjadibrata dan Muhadjir *et al.* untuk bahasa Indonesia dibandingkan dengan 20 kata bahasa Melayu. Berikut ini adalah perbandingannya.

TABEL 2
PERBANDINGAN DAFTAR FREKUENSI LE PREVOST,
HARDJADIBRATA, DAN MUHADJIR ET AL.

No.	(1) Le Prevost		(2) Hardjadibrata		(3) Muhadjir et.al.		(4) Penelitian ini	
	Entri	F	Entri	F	Entri	F	Entri	F
1.	yang	15.737	yang	48.079	yang	66.872	yang	596
2.	ada	8.183	dan	38.620	dan	45.955	dan	468
3.	pada	7.571	di	27.081	di	44.637	itu	370
4.	orang	7.507	ini	26.619	itu	26.392	tidak	260
5.	akan	5.297	itu	19.301	dengan	22.409	di	255

6.	kepada	4.640	dengan	17.430	ini	20.952	ini	218
7.	dan	4.208	dalam	16.231	dari	19.013	kita	215
8.	kata	3.463	dari	13.840	dalam	18.428	untuk	184
9.	tidak	3.308	ada	13.004	untuk	18.375	dalam	170
10.	apa	2.904	untuk	12.564	tidak	17.545	dengan	168
11.	tuan	2.892	telah	11.298	akan	12.130	dari	151
12.	mereka	2.773	ke	10.888	pada	11.166	jadi	150
13.	dengan	2.561	tidak	10.063	juga	9.635	bisa	128
14.	tetapi	2.489	oleh	9.904	tahun	8.921	tak	120
15.	telah	2.484	akan	9.243	ke	8.510	tahu	101
16.	itu	2.328	pada	9.027	karena	8.372	ada	93
17.	besar	2.229	bahwa	8.794	mereka	7.827	tahun	91
18.	atau	2.191	kita	8.341	ada	7.788	karena	89
19.	tiada	2.182	orang	7.747	bisa	7.679	ekonomi	86
20.	buat	1.161	bagai	5.779	sudah	7.192	dia	80

Tabel 2 memperlihatkan kata *tuan* dan *besar* tidak terdapat dalam nomor (2), (3), dan (4). Kata *di*, *ini*, dan *untuk* tidak terdapat dalam nomor (1). Kata *ekonomi* hanya terdapat dalam nomor (4). Hal ini mungkin karena sumbernya. Kata gramatikal yang pada Tabel 2 merupakan kosakata yang dominan.

2.2 Daftar Kosakata Bentuk Dasar, Turunan, dan Unsur Asing

Dalam data penelitian terdapat kosakata bentuk dasar, turunan, dan unsur asing. Bentuk dasar 1396 buah atau 41%. Bentuk turunan terdapat 1955 buah atau 57,5%. Unsur asing terdapat 51 buah atau 1,5%. Berikut ini adalah daftar kosakata dalam data penelitian berupa bentuk dasar, bentuk turunan, dan unsur asing.

abad	administratif	agunan
abadi	adu	agung
<i>absolute</i>	afiliasi	ahli
absurd	agak	air
acap	agakny	ajang
acuan	agama	akal
acuh	agar	akan
ada	agen	akar
adalah	agenda	akhir

adanya	agraria	akhirnya
adapun	agresif	akibat
adilan	agrisbisnis	akibatnya
administrasi	agrokultur	akselerasi
akses	anggota	atau
aksi	angka	ataupun
aksinya	angkatan	atmosfer
aktor	antara	aturan
akui	antara	aturannya
akuntabilitas	antaranya	audit
akurat	antarsektor	awal
alam	antikorupsi	awalnya
alangkah	antiteror	awam
alasan	antiterorism	ayat
alasannya	antusias	badan
alat	apa	bagaikan
aliansi	apabila	bagaimana
alias	apakah	bagaimanapun
alih	apalagi	bagi
aliran	apapun	bagian
alokasi	aparatus	bagus
alternatif	api	bahan
aman	<i>appraisal</i>	bahasa
amanah	apresiasi	bahkan
amanat	apriori	bahwa
amanatnya	araban	baik
amat	arah	baiknya
amatlah	arah	bakal
ambil	arahan	bakar
ambisi	argumennya	baku
ambisius	argumentasi	balai
ambruk	arifkah	balau
amburadul	artinya	balik
amendemen	arus	bandingan
anak	asal	bangga
analisisnya	asas	bangkit
anarkis	asasi	bangsa

ancaman	aset	bangsanya
andai	kebijakan	bangunan
andal	asing	banjir
andalan	aspek	bank
aneh	asumsi	bankir
aneka	asuransi	bantuan
anggaran	atas	banyak
banyaknya	bentuk	berdasar
barang	benua	berdasarkan
barangkali	berada	berdaulat
barengi	beragam	berdaya
baru	beragama	berdebat
barulah	berakhir	berdemonstrasi
batal	berakibat	berdimensi
batas	beraksi	berdiri
batik	beralasan	berdosa
batu	beraliansi	berduit
bawa	beralih	bereaksi
bawah	berang	berencana
bawahannya	beranggotakan	beres
bawahnya	berani	bergairah
beban	berarti	berganti
bebas	beras	bergantung
beberapa	berasal	bergerak
bedanya	berasnya	bergulir
beginikah	berat	berhadapan
begitu	beratnya	berharap
begitulah	berawal	berhasil
bekas	berbagai	berhenti
bekerja	berbahan	berideologi
beking	berbahaya	berikan
belajar	berbangsa	berikrar
belajarlah	berbasis	berikut
belaka	berbau	berikutnya
belakang	berbaur	berimbang
belakangan	berbeda	berinisiatif
belakangnya	berbekas	berinterpelasi

belalai	berbelit	berinvestasi
belanja	berbenah	beriringan
beleid	berbesar	beristilah
beli	berbicara	berita
belum	berbisnis	berjalan
benar	berbuah	berjangka
bencana	berbuat	berjanji
benih	bercucuran	berjihad
bensin	berdalih	berjumlah
bentrok	berdampak	berjuta
berkaitan	berpangkat	bertanggung
berkarakter	berpedoman	bertanya
berkas	berpegang	bertentangan
berkat	berpengaruh	berterima
berkecil	berperan	bertetangga
berkeliaran	berperan	bertindak
berkembang	berperan	bertugas
berkepanjangan	berperilaku	bertujuan
berkilah	berpesta	bertumbuh
berkoalisi	berpihak	bertumpu
berkompeten	berpikir	bertumpuk
berkonsentrasi	berpotensi	berubah
berkontribusi	berproduksi	berujung
berkualitas	berpuas	berulang
berkuasa	bersahabat	berulangkali
berkunjung	bersaing	berumur
berkurang	bersalah	beruntung
berkurang	bersama	berupa
berlaku	bersamaan	berupaya
berlalu	bersandar	berurusan
berlangsung	bersarang	berusaha
berlanjut	bersedia	berwacana
berlapis	bersedih	besar
berlarut	bersemangat	besarnya
berlatih	bersembunyi	beserta
berlebih	bersertifikat	besi
berlebihan	bersiap	betapa

berliku	bersifat	betul
berlubang	bersih	biak
bermakna	bersikap	biarkan
bermasalah	bersikeras	biasa
bermasyarakat	bersinergi	biasanya
bermotif	bersubsidi	biaya
bermutu	bersumber	bibit
bernama	berswasembada	bicara
benderang	bertahan	bicaranya
bernegara	bertahun	bidang
beroperasi	bertajuk	bijak
berpaling	bertambah	bijaksana
berpandangan	cair	bila
birokrasi	cakupan	dana
birokratis	calon	dapat
birokratisasi	candi	darah
biru	capai	dari
bisa	capres	daripada
bisanya	cara	dasar
bisnis	caranya	data
<i>blue print</i>	<i>care</i>	datang
bola	catatan	daya
boleh	celah	debitor
bom	celaka	defisit
borok	cemas	dekat
bruto	cenderung	delapan
buah	cepat	<i>delivery-nya</i>
buahnya	cermat	demi
buat	cermin	demikian
budaya	cetak	demokrasi
budi	<i>character</i>	demokratisasi
bukan	<i>assassination</i>	demonstrasi
bukankah	<i>checks and balances</i>	dengan
bukanlah	ciptakan	dengar
bukannya	ciri	dengungkan
bukti	citra	depan
buktinya	cocok	depannya

bukukan	coklat	departemen
bulan	contoh	deposito
bulu	<i>cowboy</i>	deras
bumi	cuma	derasnya
bunga	daerah	deregulasi
bunyi	daftar	desa
bupati	daftarnya	detasemen
buron	daging	devisa
bursa	dahulu	dewan
buruk	dakwaan	dewasa
buruknya	dalam	di
<i>business</i>	dalamnya	dia
cabai	damai	diacak
cacat	dampak	diacungi
cadang	dan	diadili
cadangan	dicabutnya	diagendakan
diajak	dicanangkan	diimbangi
diajukan	dicari	diimbau
diakhiri	dicegah	ditawarkan
diakui	diciptakan	dijabarkan
dialihfungsikan	dicoba	dijadikan
diambil	didapat	dijaga
dianggap	didasari	dijagokan
dianugerahi	didatangi	dijajah
diarahkan	didekati	dijamin
diasosiasikan	dideklarasikan	dijangkau
diatur	didengungkan	dijawab
diawasi	dideteksi	dijebloskan
dibabat	didorong	dijerat
dibagi	diduga	dijinakkan
dibalik	didukung	dijunjung
dibanding	diembannya	dikabulkan
dibandingkan	digalang	dikalahkan
dibangun	diganggu	dikaruniaai
dibarengi	digarisbawahi	dikatakan
dibasmi	digaungkan	dikategorikan
dibawa	digelar	dikedepankan

dibayangkan	digelorakan	dikejutkan
dibayar	digerebek	dikelola
dibeli	digeser	dikeluarkan
dibelokkan	digit	dikemas
dibentuk	digunakan	dikembalikan
diberantas	dihadang	dikembangkan
diberi	dihadapi	dikenal
diberikan	dihadiri	dikenang
diberlakukan	dihajar	dikendalikan
dibiarkan	dihapus	dikerahkan
dibiasakan	diharapkan	dikerjakan
dibidik	dihargai	diketahui
dibilang	dihasilkan	diketuai
diblokir	dihebohkan	dikibarkan
dibuang	dihentikan	dikirim
dibuat	dihimpun	diklaim
dibubarkan	dihuni	diklarifikasi
dibuka	diikuti	dikonversi
dibutuhkan	dipandang	dikorbankan
dicabut	diparkir	dirinci
dikritik	dipasang	dirintis
dikuasai	dipastikan	dirinya
dikuatkan	dipatahkan	dirugikan
dikucurkan	dipatok	dirumuskan
dikumpulkan	dipengaruhi	disadari
dilaksanakan	diperbolehkan	disalurkan
dilakukan	dipercaya	disambut
dilanda	dipergunakan	disampaikan
dilarang	diperhatikan	disandera
dilarikan	diperhitungkan	disangka
dilawan	diperiksa	disarankan
dilawankan	diperkenankan	disatukan
diledakkan	diperkirakan	disebabkan
dilema	diperlihatkan	disebut
dilengkapi	diperlukan	disebutkan
dilihat	diperlukan	disediakan
dilindungi	diperlukan	diselaraskan

dilirik dilontarkan diluncurkan dimaksudkan dimanfaatkan dimarginalkan dimensi dimiliki diminimalisir dimintai dimuat dimunculkan dimungkinkan dimungkiri dinanti dinas dingin dinikmati dinilai dinilainya dipahami dipakai dipaksa disumbangkan disurvei disusunnya ditafsirkan ditambah ditampik ditampilkan ditanami ditandai ditandatanganinya ditangani ditangkap ditargetkan ditata	dipersoalkan dipertanyakan dipicu dipikul dipimpin dipimpinnya dipinggirkan diproses dipublikasikan dipulihkan diraih dirampas dirancang dirasakan direalisasikan diredam direkrut direksi direspons direvisi diri ditunjukkan dituntut diturunkan ditutup diubah diuji diumumkan diundangkan diuntungkan diurus diusung diusut diutamakan dividen diwakili diwujudkan	diselesaikan diselidiki disembunyikan disentuh disepakati diserahkan diseriusi disertai disertakan diservikasi disetor disetorkan disetujui disiapkan disimpan disinggung disorganisasi disoroti disponsori disuap disumbang efektivitas efisien efisiensi egoisme ekonom ekonomi ekonominya eksekusi eksekutif ekspansi ekspektasi eksplisit ekspor ekstradisi ekstrem
--	--	--

ditawarkan	diyakini	elegannya
<i>ditegakkan</i>	<i>doing</i>	elektronik
ditekan	doktor	elite
ditempatkan	dokumen	elok
ditempuh	dolar	emban
ditengok	<i>domestic market</i>	embargo
ditentang	<i>obligation</i>	empat
ditentukan	domestik	enak
diterbitkan	dominan	enam
diterima	donatur	energi
diterpa	donor	enggan
ditertibkan	draf	entah
diteruskan	drastis	<i>equality beyond the</i>
ditetapkan	dua	<i>law</i>
ditonjolkan	dugaan	era
ditopang	duit	esensi
ditransfer	dukung	eskalasi
dituangkan	dukungan	etik
dituding	dulu	etnis
dituduh	dunia	evaluasi
ditugasi	duri	fair
ditugaskan	editorial	fakta
ditujukan	efek	faktanya
ditumpang	efektif	faktor
ditunjuk	giat	harganya
fantastis	gigih	hari
fasilitas	gigit	harta
fatwa	giliran	harus
<i>fee</i>	giro	haruskah
festiral	gizi	haruslah
<i>field</i>	global	hasil
dalam	<i>go publik</i>	hasilnya
finansial	goreng	hasutan
fiskal	graha	hati
fitnah	gratis	hebat
fokus	grup	hebatnya
<i>forgotten wonders</i>	gubernur	hektar

fraksi	gugat	hemat
frustrasi	gugatan	hendak
fundamental	gula	hibrida
fungsi	guna	hidup
fungsinya	guru	hijrah
gabungan	ha	hilang
gagal	habis	hilangnya
gajah	hadapi	hilir
gambar	hadir	hingga
gamblang	hak	hiruk
gambling	hakikat	hitam
gampang	hakikatnya	horizontal
ganda	hakim	<i>hotline</i>
gandum	hal	hubungan
ganti	halnya	hukum
garam	halus	hukumnya
gas	hambatan	hulu
gedung	hampir	hutan
gelagat	hancur	ia
gelap	hancurlah	ialah
gembong	hanya	ibarat
gencar	hanyalah	ibaratnya
generasi	hapuskan	ibu
genosida	haram	ide
gerbang	harapan	ideal
gereget	harga	ideologi
gersang	hargai	ideologis
getol	instropeksi	jalan
idiom	instruksi	jalannya
ihwal	instrumen	jamaah
iklan	intelektual	jaminan
ikut	intensif	jangan
ikutan	intensitas	jangka
ilegal	intensitasnya	janji
ilmu	internasional	janjinya
ilmuwan	interpelasi	jantung
imajinasi	intervensi	jarang

<i>impeachment</i>	inti	jari
implementasi	intinya	jaringan
implementasinya	investasi	jaringannya
implementatif	investasinya	jasa
implikasi	investor	jatuh
implikasinya	irigasi	jauh
impor	ironi	jawab
importir	ironis	jawaban
indah	ironisnya	jawabannya
indeks	isinya	jawabnya
gabungan	istana	jasas
indikator	istilah	jelata
individual	istilahnya	jembatan
industri	istimewa	jempol
inflasi	istri	jengkel
informasi	isu	jenis
<i>Infrastructure and exhibition</i>	isyarat	jerat
<i>infrastructure summit</i>	itu	jeratan
infrastruktur	itulah	jihad
ingat	izin	jika
ingin	jabatan	jitu
ini	jadi	jiwa
inilah	jadikan	jua
inpres	jagat	juga
insentif	jago	jujur
insinyur	jagoan	julukan
instansi	jagung	jumlah
institusi	jahit	jumlahnya
juru	jajaran	jumpa
justru	jaksa	jurnalistik
juta	kategori	kecolongan
jutaan	kaum	kecuali
kabar	kawasan	kecukupan
kabinet	kaya	kecurigaan
kabinetnya	kayu	kecut
kacau	ke	kedatangan
	keadaan	kedaulatan

kadar	keadilan	kedekatan
kado	keajaiban	kedelai
kaget	keamanan	kediktatoran
kajaibannya	keasaman	kedua
kakap	kebanggaan	keduanya
kaki	kebangkitan	kedudukan
tangan	kebangsaan	kedudukannya
kalah	kebebasan	keempat
kalangan	kebebasannya	keenam
kalaupun	kebenarannya	kegagalan
kalender	kebencian	kegiatan
kali	keberadaan	kehadirannya
kalinya	keberanian	kehancuran
kampanye	keberatan	keharusan
kanker	keberhasilan	kehendaknya
kantor	keberpihakan	kehidupan
kantong	kebetulan	kehilangan
kapal	kebiasaan	kehormatan
kapan	kebijakan	kehormatannya
kapasitas	kebijakannya	keinginan
kapasitasnya	kebodohan	kejadian
karakter	kebudayaan	kejahatan
karena	kebun	kejaksaan
karya	kebutuhan	kejam
karyawan	kecaman	kejutan
kas	kecamatan	kekayaan
kasasi	kecanggihan	kekebalan
kasih	kecenderungan	kekecewaan
kasus	kecepatan	kekerasan
kasusnya	kecerdikan	kekuasaan
kata	kecewa	kekuatan
kelancaran	kecil	kekurangan
kelanjutan	kecilnya	kelam
kelaparan	kenyataannya	kesusilaan
kelas	kepada	ketahanan
kelebihan	kepandaian	ketahui
	kepedulian	ketajaman

kelemahan	kepemilikan	ketakutan
kelengkapan	kepentingan	ketat
kelihatannya	kepentinganlah	ketegangan
kelima	kepercayaan	ketentuan
kelolaan	keperluan	keterampilan
kelompok	kepmenkeu	keterkaitannya
keluar	kepolisian	keterlambatan
keluaran	keputusan	keterpaduan
keluarga	kerakyatan	keterpurukan
keluhan	kerap	ketersediaannya
kemacetan	kerapkali	ketertinggalan
kemajuan	keras	ketidakadilan
kemakmuran	kereta	ketidakberesan
kemampuan	kering	ketidacukupan
kemarin	keringat	ketidakhadiran
kemauan	kerja	ketidaklengkapan
kembali	kertas	ketidakmampuan
kemeja	kerugian	ketidapkahaman
kemelaratan	kerukunan	ketiga
kementerian	kerumunan	ketika
kemerdekaan	kerusakan	ketimbang
kemiripan	kesadaran	ketimpangan
kemiskinan	kesaksian	ketua
kemudahan	kesalahan	ketujuh
kemudian	kesamaan	keuangan
kemungkinan	kesehatan	keuntungan
kenaikan	keseimbangan	keutuhan
kenapa	kesejahteraan	kewajiban
kendala	keseluruhan	kewajibannya
kendali	kesempatan	kewartawanan
kendati	kesepakatan	kewenangan
kenegaraan	keseriusan	khalayak
kenegarawanan	kesetaraan	khas
kenegarawanannya	kesimpulan	khawatir
kenyataan	kesombongan	khawatirkan
khususnya	kesulitan	khusus
kian	konsekuensinya	kuncinya

kimia	konsep	kuningan
kinclong	konsisten	kunjung
kinerja	konstitusi	kunjungan
kinerjanya	konstruksi	kuno
kini	konsultan	kurang
kiranya	konsumsi	kurangnya
kisaran	konteks	kurator
kita	kontra	kurs
klise	kontraktor	kursinya
koalisi	kontraproduktif	kurun
kode	kontribusi	kurus
kok	konversi	kutu
kokoh	koordinasi	laba
kolektif	koran	lagi
kolonial	korban	lahan
koloseum	koreksi	lahir
kolusi	korporasi	lahirnya
komandan	korupsi	lain
komisi	koruptor	lainlah
komite	kosmetik	lainnya
komitmen	kota	laju
komoditas	kredibel	laku
kompensasinya	kredibilitas	lakukan
kompetisi	kredit	lalat
kompetitif	krisis	lalu
komplikasi	kristalisasi	lama
komponen	kritik	lamban
kompos	kritis	lambat
kompromi	krusial	lampau
pemerintah	kualifikasi	lancar
komunikasi	kualitas	lancarnya
kondisi	kuartal	<i>land reform</i>
kondisinya	kuasa	landasan
kondusif	kuat	langit
konflik	kucuran	langkah
konglomerat	kuda	langsung
konkret	kukuh	lanjut

konsekuen	kultur	lantaran
lapangan	kunci	lantas
lapis	liter	manakala
laporan	<i>loan</i>	mancanegara
lari	logis	mandataris
latar	lokal	mandek
latihan	lokasinya	mandiri
laut	lompatan	mandul
lawan	loncatan	manfaat
layak	lonjakan	manfaatnya
lazim	lontaran	mantan
lebar	loyo	manufaktur
lebih	luar	manurunkan
ledakan	luas	manusia
legal	lumpur	manuver
legislatif	lupa	marak
lekat	mabes	marinir
lekok	macam	marsekal
lelang	macet	martabat
leluasa	macetnya	masa
lemah	mahal	masalah
lemahnya	mahasiswa	masalahnya
lembaga	main	masih
lengah	maju	masing
lenyap	maka	massa
lepas	makan	masuk
lestari	makanan	masukn
lesunya	makin	masuknya
level	maklum	masyarakat
lewat	makna	mata
<i>lex specialist</i>	maknisme	materi
liar	makro	matriks
lihat	malah	mau
lima	malahan	maunya
lingkungan	malang	maupun
lingkup	malas	mayoritas
lintas	malnutrisi	medan

lipat	malu	media
lisan	mampu	mekanisme
listrik	mampukah	melahirkan
melaksanakan	mana	melainkan
melaksanakannya	manajemen	melaju
melakukan	memaknainya	membereskan
melalui	memaksakan	membereskannya
melambat	memalukan	memberi
melambatnya	memanas	memberikan
melambung	memandang	memberitahukan
melampaui	memanfaatkan	memberitakan
melancarkan	memanfaatkannya	memberlakukan
melanggar	memang	membiarkan
melantik	memangkas	membiayai
melapor	memasok	membidik
melaporkan	memasukkan	membreidel
melawan	mematikan	membuahkan
melayani	mematok	membuang
melemparkan	membabi buta	membuat
melenceng	membagikan	membubarkan
melenggang	membahas	membuka
melengserkan	membahayakan	membuktikan
melesat	membraik	membukukan
meletakkan	membalas	membumi
melibatkan	membangkitkan	membunuh
melihat	membangun	membutuhkan
melimpah	membantu	memberikan
melindungi	membarikade	memecahkan
melipatgandakan	membatasi	memecat
melonjak	membraur	memecut
meluasnya	membawa	memegang
melulu	membayar	memenangi
melunasi	membebaskan	memenangkan
meluncurkan	membeberkan	memengaruhi
memacu	membela	mementingkan
memadai	membeli	memenuhi
memagari	membenahi	memerangi

memahami	membenarkan	memerhatikan
memahami	membendung	memeriksa
memajukan	membengkakkan	memerintahakan
memakai	membentuk	memerlukan
memaklumi	memberangus	memiliki
memakmurkan	memberantas	memilukan
memosisikan	memberantasnya	memimpin
mempengaruhi	memberatkan	meminta
memperbaiki	menahannya	mendapat
mempercayakan	menaikkan	mendapatkan
mempercepat	menakjubkan	mendasari
memperdayakan	menakutkan	mendekati
memperhatikan	menakut-nakuti	mendengar
memperhitungkan	menambah	mendengarkan
memperkaya	menampung	menderita
memperkokoh	menanam	mendesak
memperkuat	menanamkan	mendidik
memperlambat	menandakan	mendominasi
memperlebar	menandatangani	mendongkrak
memperlihatkan	menangani	mendorong
memperluas	menanggapi	menduga
mempermudah	menangkap	mendukung
memperoleh	menangkapi	menebak
memperpanjang	menajak	mencegah
mempersiapkan	menarik	menegaskan
mempertajam	menariknya	menekan
mempertanyakan	menaruh	menelorkan
memprioritaskan	menawarkan	menembak
memproduksi	mencabut	menempati
memprotes	mencairkan	menempatkan
mempunyai	mencakup	menempatkannya
memuaskan	mencanangkan	menempuh
memuat	mencapai	menengah
memukul	mencari	menentang
memulai	mencari-cari	menentukan
memulainya	mencatat	menerangkan
memulihkan	mencegah	menerapkan

memuluskan	mencengangkan	menerbitkan
memungkinkan	mencerminkan	menerima
memurukkan	menciptakan	menerimanya
memusingkan	mencitrakan	menerjemahkan
memutuskan	menciuat	menerka
menaati	mencoba	menertibkannya
menabrak	mencontoh	meneruskan
menafsirkan	mencuat	menetapkan
menahan	mencukupi	menewaskan
mengadili	mencukupi	mengabaikan
mengagetkan	mendampingi	mengabulkan
mengagumi	mengembangkan	menghantui
mengagumkan	mengembangkannya	menghapuskan
mengairi	mengembargo	menghargai
mengajak	mengemuka	mengharuskan
mengaji	mengenai	menghasilkan
mengajukan	mengenakan	mengherankan
mengakhiri	mengenal	menghibur
mengakselerasi	mengendalikan	menghidupi
mengaku	mengerahkan	menghidupkan
mengakui	mengerem	menghilangkan
mengalah	mengerikan	menghindarkan
mengalahkan	mengering	mengikat
mengalami	mengevaluasi	mengikuti
mengalihkan	menggagalkan	mengimbangi
mengalir	menggalakkan	mengimplementasikan
mengamanatkan	menggalang	mengimpor
mengamankan	menggangu	mengincar
mengambil	mengganjal	mengindikasikan
mengancam	mengganti	mengingatkan
mengandalkan	menggantikan	menginginkan
mengandung	menggantungkan	mengingkari
mengangkat	menggariskan	mengiringi
menganjurkan	menggelar	mengisyaratkan
menganulir	menggeliat	mengkaji
mengapa	menggeliatnya	mengkawatirkan
mengapresiasi	menggembirakan	mengklarifikasi

<p> mengatakan mengatasi mengatur mengawal mengawasi mengejar mengegang mengekskusi mengekskusinya mengelak mengelola mengeluarkan mengunjungi menguntungkan mengurangi mengurangi mengurus mengurusi mengusik mengusut mengutamakan mengutuk meningkatkan menikah menikmati menilai menimbulkan menindaknya meninggalkan meningkat meningkatkan menjabat menjadi menjadikan menjadikannya menjaga menjajaki </p>	<p> menggenjot menggerakkan menggerogoti menggiring menggiurkan menggoyahkan menggugat menggulingkan menggulirkan mengggunakan mengguncang menghadapi menghadapinya menghambat menolak menonton menopang mentah menteri menterinya mentransformasikan menuai menuding menugaskan menuju menumbuhkan menumpas menumpuk menundukkan menunggu menunjukkan menuntaskan menuntut menurun menurunkan menurut menutup </p>	<p> mengolah mengonsumsi mengoreksinya mengotot menguap mengubah mengubur mengukur mengumpulkan mengumumkan mengundang mengungkap mengungkapkan menyebut menyebutkan menyediakan menyedihkan menyedot menyehatkan menyelamatkan menyelenggarakan menyelesaikan menyeluruh menyempurnakan menyenangkan menyengat menyengsarakan menyensor menyentuh menyepakati menyerahkan menyerap menyertakan menyesalkan menyesatkan menyetujui menyiapkan </p>
---	---	--

menjalankan	menyadari	menyimpan
menjalin	menyaksikan	menyingkirkan
menjamin	menyalahgunakan	menyodorkan
menjanjikan	menyalahi	menyongsong
menjatuhkan	menyalahkan	menyumbang
menjauhkan	menyalurkan	menyusul
menjawab	menyambangi	meragukan
menjegal	menyambung	merah
menjelang	menyambut	meraih
menjelaskan	menyambutnya	merajalela
menjelma	menyampaikan	merajut
menjengkelkan	menyangkut	merambah
menjerat	menyangsikan	merana
menjual	menyatakan	merangsang
menjunjung	menyatukan	merasa
merasionalisasikan	menyatukannya	merasakan
merasuk	menyebabkan	musim
meratifikasi	migas	muskil
meraup	mikro	musti
mercusuar	miliar	musuh
merdeka	miliaran	mutlak
merealisasikan	milik	nafkah
merebak	militer	naif
meredam	mimpi	naik
merefleksikan	minat	nakal
mereformasi	minggu	nama
mereka	minimnya	namanya
merekam	minta	namun
merekrut	minyak	nanti
merendahkan	miris	nasib
merespons	misalnya	nasibnya
me-review	miskin	nasional
merevisi	mismanajemen	<i>nature recourse</i>
merevitalisasi	mobil	negara
meriam	mobilisasi	negatif
meringkus	modal	negatifnya
merintis	model	negeri

merosot	momen	negosiasi
merubungi	momentum	nelayan
merugikan	moneter	nepotisme
merujuk	motifnya	neraca
merumuskan	motor	<i>net interest margin</i>
merupakan	muda	niat
merusak	mudah	nihil
mesin	mudaratnya	nilai
meski	muka	nilainya
meskipun	mulai	nirpamrih
mesti	<i>multiplier effect</i>	niscaya
mestinya	<i>multifinance</i>	nomor
mewah	mulus	non
mewajibkan	mumpuni	nonbujeter
mewakilkannya	muncul	nondepartemen
mewarisi	munculnya	nonteknis
mewujudkan	mundur	<i>non-tradable</i>
meyakini	mungkin	normal
notabene	murah	normatif
nuklir	museum	patuh
nyalinya	palawija	patut
nyaman	paling	payung
nyaris	pameo	pecahnya
nyata	pamer	pedagang
nyatanya	panas	peduli
nyawa	pandang	pejabat
objek	pandangan	peka
obligasi	pandangannya	pekan
oleh	panen	pekerjaan
operasi	pangan	pekerjaannya
opini	pangkal	pelabuhan
oposisi	pangkas	pelajari
optimal	panjang	pelaksana
optimalkan	panjangnya	pelaksanaan
optimisme	pantas	pelaksanaannya
optimistis	pantulan	pelaku
orang	para	pelakunya

orde	paradoks	pelan
otokrasi	paralatan	pelanggan
otokritik	paripurna	pelanggaran
otomatis	pariwisata	pelat
otomotif	parlemen	pelayanan
otoritas	parpol	pelibatan
otoriter	partai	pelosok
pada	partainya	peluang
padahal	pasal	pelunasan
padat	pasalnya	pelupuk
padi	pasangan	pemahaman
padu	pasar	pemain
padunya	pasca	pemakaian
paham	pasokan	pemaksaan
pahit	pas	pemanis
pajak	pasti	pemasukan
pak	pastilah	pembagian
paket	pasukan	pembahasan
pakjun	patahkan	pembangkit
paksa	patokan	pembangunan
pakto	patroli	pembantu
pembantunya	penanggulangan	pengalihan
pembatalan	penanggung	pengangguran
pembayar	penangkapan	pengangkutan
pembayaran	pencabutan	pengawas
pembebasan	pencakar	pengawasan
pembelajaran	pencapaian	pengeboman
pembelian	pencapaiannya	pengecualian
pembenahan	pencemaran	pengelola
pembenaran	penciptaan	pengelolaan
pembentukan	pencurian	pengeluaran
pemberantasan	pendapat	pengembangan
pemberdayaan	pendapatan	pengenaan
pemberhentian	pendek	pengertian
pemberian	pendekatan	pengetahuan
pemberitaan	pendekatannya	penggagas
pembiayaan	penderita	penggantian

pembinaan	penderitaan	penggantinya
pembreidelan	pendidikan	penggelapan
pembuatan	pendirian	penggerak
pembubaran	pendorong	penggunaan
pembukuan	penduduk	penghambat
pembunuh	pendukung	penghapusan
pembunuhan	penegak	penghargaan
pemegang	penegakan	penghela
pemenuhan	penegasan	penghidupan
pemeriksa	penelitian	penghujan
pemeriksaan	penembakan	pengikutnya
pemerintah	penerangan	pengimpor
pemerintahan	penerapan	pengumuman
pemerintahannya	penerapannya	pengungkapan
pemicu	penerbitan	pengurangan
pemilihan	penerima	pengurusan
pemimpin	penerimaan	pengusaha
pemimpinnya	penertiban	pengusutan
pemodal	penetapan	pengusutannya
pemuda	penetrasi	penilaian
pemulihan	pengacara	peningkatan
penambahan	pengadaan	penistaan
penanganan	pengadilan	penjabaran
penanganannya	pengalaman	penjara
penjelasan	perbendaharaan	permen
penjualan	perbenihan	permintaan
pensiun	perbuatan	permintaannya
penting	perbuatan	permohonan
pentingnya	perburuan	permufakatan
pentolan	percaya	permukaan
penuh	percayaannya	permukiman
penunjukan	percepatan	pernah
penuntutan	perdagangan	pernyataan
penurunan	perdata	peroleh
penyadaran	perdebatan	perolehan
penyakit	perdesaan	perpajakan
penyaluran	perekonomian	perpanjangan

penyebaran	perempatnya	perputaran
penyelenggara	<i>performance</i>	pers
penyelenggaraan	pergaulan	persaingan
penyelesaian	pergerakan	persawahan
penyensoran	pergeseran	persekongkolan
penyerapan	perguruan	perselingkuhan
penyesuaian	perhatian	persembunyiannya
penyidik	perikehidupan	persen
penyidikan	perilakunya	persenan
penyiksaan	peringatan	persenjataan
penyimpangan	peringkat	persepsi
penyumbang	periode	perseroan
penyusutan	peristiwa	perseteruan
per	perlu	persetujuan
peradaban	perizinan	persidangan
peradilan	perjalanan	persis
peran	perjanjian	persoalan
peranan	perjuangan	persoalannya
perang	perkantoran	persoalkan
peraturan	perkara	personel
peraturannya	perkebunan	pertahanan
perbaikan	perkembangan	pertama
perbankan	perkembangannya	pertambangan
perbatasan	perkiraan	pertanian
perbedaan	perlawanan	pertaniannya
perbelanjaan	perlu	pertanyaan
pertanyakan	permainan	pertanyaannya
pertemuan	piutang	pria
pertengahan	<i>platform</i>	pribadi
pertimbangan	<i>playing field</i>	prinsip
pertumbuhan	pengawasan	periode
pertumbuhannya	pokok	prioritas
perubahan	pola	pro
perundingan	polemik	<i>pro poor</i>
peruntukannya	polis	produk
perusahaan	polisi	produksi
pesan	politik	produktif

pesantren	politiknya	produktivitas
pesat	politikus	produsen
pesawat	politis	profesi
peserta	politisasi	profesinya
pesimisme	politisi	profesional
pesimistis	<i>polling</i>	profesionalitas
petaka	populer	profesor
petak	porsinya	profit
petani	portofolio	program
petaninya	posisi	programnya
petinggi	posisikan	<i>pro-growth</i>
petro	positif	<i>pro-job</i>
petugas	positifnya	promosi
piawai	potensi	properti
pidana	potensial	proporsional
pihak	praduga	prosedur
pihaknya	pragmatis	prosedural
pikiran	prajurit	proses
pilar	prakarsa	protap
pilih	praktek	proteksi
pilihan	praktik	protokoler
pilkada	praktis	provokasi
pimpin	prasangka	proyek
pimpinan	prediksikan	proyeksi
pimpinannya	preferensi	psikologis
pinjaman	premi	psikologisnya
pintar	premium	publik
pintu	presiden	pucuk
piramid	prestise	pukul
pula	prestisius	pukulan
pulang	reformasi	roda
pulih	regulasi	ruang
<i>pulp</i>	rekan	rudal
puluhan	rekayasa	rugi
pun	rekening	rumah
puncak	rekomendasi	rumahnya
punya	rekor	rumit

pupuk	reksa	rumitnya
pupus	rel	runyam
pusaran	rela	rupiah
pusat	relasi	rusak
pusing	relevan	rutin
putus	rencana	saat
putusan	rendah	saatnya
radikal	rendahnya	sadar
ragu	rentan	sadari
rahasia	republik	sah
raker	reputasi	saham
rakus	resiko	saing
rakyat	resistensi	sains
rakyatlah	resmi	saja
rakyatnya	resolusi	salah
ranah	responden	satu
rancu	respons	salahnya
rangkaian	restrukturisasi	saling
rantai	retorika	saluran
rapat	revisi	salurkan
rapi	revitalisasi	sama
rasa	revitalisasi	sambutan
rasakan	rezeki	sampai
rasanya	rezim	sana
rata	ribu	sang
ratusan	ribuan	sangat
rawan	<i>rigid</i>	sangatlah
raya	riil	sanggup
reaksi	riset	sanggupkah
reaktif	risiko	sanksi
realitas	<i>risk free</i>	santapan
<i>rechtsstaat</i>	menciduk	saran
sarang	robek	sarana
sarat	sedehana	selain
sarjana	sedih	selaku
sasaran	sedikit	selalu
satu	segala	selama

satukan	segalanya	selambatnya
sawah	segan	selayaknya
sawit	segelintir	selesai
sayang	segera	sel
sayangnya	sehari	seluler
seadanya	seharusnya	seluruh
seakan	seharusnyalah	semacam
seandainya	sehat	semakin
seantero	sehingga	semangat
sebab	seiring	semangatnya
sebabnya	seizin	semata
sebagai	sejahtera	sembilan
sebagaimana	sejak	sembrono
sebagainya	sejarah	sembuh
sebagian	sejati	semen
sebaliknya	sejauh	sementara
sebanyak	sejumlah	semoga
sebatas	sekadar	sempat
sebelah	sekali	sempatnya
sebelum	sekaligus	sempurnakan
sebelumnya	sekalipun	semua
sebenarnya	sekarang	semuanya
sebentar	sekarat	semudah
seberang	sekecil	sendi
seberapa	sekedar	sengaja
sebesar	seketika	sengit
sebetulnya	sekian	senilai
sebuah	sekiranya	senior
sebut	sekitar	senjakala
secara	sekolah	senjata
secepatnya	sekretariat	<i>sense of marketing</i>
sektor	sektor	<i>sense of marketing</i>
sedang	sektoral	<i>sense of</i>
sedangkan	sektoral	<i>professionalism</i>
sedari	sekuat	sensitif
sentral	sekutunya	sentra
seolah	setahun	soal

seorang	setara	soalnya
sepak	setelah	solusi
sepakat	setempat	solusinya
sepanjang	setengah	sorotan
sepantasnya	seterusnya	sosial
separuh	setiap	sosialisasi
sepatutnya	setidaknya	sosio
sepeda	setuju	historis
sepenuh	sewajarnya	sosoknya
sepenuhnya	sewaktu	spekulasi
seperti	sewenang	spirit
sepertinya	seyogianya	<i>spread</i>
sepi	siang	stabil
sepinya	siap	stabilitas
serampangan	siapapun	stadium
serang	<i>sic</i>	standar
serangan	sidang	stereotype
serangkaian	sifatnya	stigma
seraya	sikap	stimulus
serba	sikapnya	strategi
serbi	siklus	struktur
seretnya	silam	suap
seribu	silih	suara
serikat	simultan	suasana
sering	sinergi	suatu
serius	sini	subsidi
seriuskah	sinilah	subsidi
seriusnya	sinisme	substansi
serta	sinkronisasi	substantif
sertifikat	sinyal	subur
serupa	sipil	subyektivitas
servis	sisi	sudah
sesalkan	sistem	sudut
sesama	sistematis	suhu
seseorang	situ	suka
sesuai	situasi	sukses
sesuatu	situlah	suku

sesungguhnya	skenario	sulit
sumbangan	skeptis	sulitnya
sumber	tani	tenggat
sunnguh	tanpa	tenggelam
<i>super body</i>	tantangan	tentang
suplai	tanya	tentu
suplainya	tapi	tentunya
surat	taraf	tepat
surga	target	terakhir
survei	tarif	terancam
swasembada	taruna	terang
swasta	tata	terangkum
syarat	tatanan	terantuk
tabungan	tataran	terapkan
tadi	tatib	terarah
tafsir	tatkala	terasa
tahap	tawar	teratas
tahu	tebang	terbaik
tahun	tegaknya	terbang
banyak	tegas	terbaru
tajam	teguh	terbatas
tak	tekad	terbentang
takkan	teken	terbentuknya
taktis	teknis	terbesar
takut	teknologi	terbiasa
tali	telah	terbilang
tambah	telak	terbitnya
tambahan	telanjur	terbuka
tambang	televisi	terbukti
tampak	teluk	terbungkus
tampaknya	teman	tercapai
tampungnya	tembak	tercatat
tanah	tembakan	tercebur
tanam	tempat	tercermin
tanaman	tempo	tercinta
tanda	tempur	terdaftar
tangan	temuan	terdakwa

tangga	temui	terdapat
tanggal	tenaga	terdengar
tanggung	tengah	terdidik
tanggung	terdorong	terdiri
terdorong	terrealisasi	terdongkrak
terrealisasi	terfokus	terus
terfokus	terganggu	terutama
terganggu	terganjal	terwujud
terganjal	tergeser	terwujudnya
tergeser	tergiur	tetangga
tergiur	tergolong	tetangganya
tergolong	tergusur	tetap
tergusur	terhadap	tewas
terhadap	terhitung	<i>the rulling party</i>
terhitung	terigu	tidak
terigu	terikat	tidaklah
terikat	terima	tidaknya
terima	terintip	tiga
terintip	terjadi	tim
terjadi	terjadinya	timur
terjadinya	terjaga	tindak
terjaga	terjamin	tindakan
terjamin	terjaminnya	tinggal
terjaminnya	terjang	tinggi
terjang	terjangan	tingkat
terjangan	terjauh	tipis
terjauh	terjebak	titik
terjebak	terjebak	toh
terkait	terkait	tokoh
terkecuali	terkecuali	tol
terkelola	terkelola	tolak
terkemuka	terkemuka	tombol
terkena	terkena	ton
terkendala	terkendala	tontonan
terkesan	terkesan	total
terkikis	terkikis	<i>tradable</i>
terkonsentrasi	terkonsentrasi	tradisional

terkoordinasi	terkoordinasi	tragedi
terkuak	terkuak	transaksi
terlalu	terlalu	transisi
terlambat	terlambat	transmigran
terlempar	terlempar	transparan
terlena	terlena	transparansi
tubuh	unit	tren
tudingan	unsur	triliun
tuduhan	untuk	warisan
tugas	untung	warna
tujuan	upaya	wartawan
tujuannya	urea	waswas
tujuh	urung	<i>water cannon</i>
tukang	urutan	wenang
tulis	usah	wewenang
tumbangnya	usaha	wibawa
tumbuh	usahanya	wilayah
tumpukan	usai	wisata
tumpul	usul	wisatawan
tuntas	utama	ya
tuntutan	utamanya	yaitu
turun	utang	yakni
tutupi	utopia	yang
uang	varietas	yuan
uangnya	versus	yuridis
ucapan	visi	zaman
udang	vital	
udara	wabah	
ujung	wacana	
ujungnya	waduk	
ulah	wajah	
ulama	wajar	
ulang	wajib	
umat	wakil	
umum	waktu	
umumnya	waktunya	
<i>underwriter</i>	walau	

<i>undisbursed</i> unggul ungkapan	wali warga warganya	
--	---------------------------	--

2.3 Frekuensi Kosakata Berdasarkan Kelas Kata

Kosakata dalam data penelitian ini memperlihatkan pemakaian kelas kata nomina, verba, adjektiva, adverbial, partikel, pronominal, kata tugas, dan numeralia. Frekuensi kelas kata yang ditinjau dalam penelitian ini adalah nomina, verba, dan adjektiva. Sementara itu, kosakata yang termasuk dalam kelas kata adverbial, partikel, pronominal, kata tugas, dan numeralia disatukan dalam penghitungan frekuensinya. Berdasarkan data, frekuensi kosakata berdasarkan kelas kata dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3
FREKUENSI KOSAKATA BERDASARKAN KELAS KATA

No.	Kelas Kata	F	%
1.	Nomina	1.578	46,4
2.	Verba	1.065	31,3
3.	Adjektiva	140	4,1
4.	Adverbia, partikel, pronomina, kata tugas, dan numeralia	617	18,1
	Jumlah	3.400	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa frekuensi kelas kata yang dominan adalah nomina, yaitu 1.578 kosakata atau 46,4%. Frekuensi yang menempati posisi kedua adalah verba, yakni 1.065 kosakata atau 31,3%. Frekuensi yang menempati posisi ketiga adalah adjektiva, yaitu 140 kosakata atau 4,1%. Frekuensi kelas kata adverbia, partikel, pronomina, kata tugas, dan numeralia, yaitu 617 kosakata atau 18,1%.

BAB III

JENIS KALIMAT

3.1 Pengantar

Jenis kalimat dalam penelitian ini dilihat dari sudut bentuk kategori sintaksisnya. Berdasarkan bentuk dan kategori sintaksisnya terdapat empat jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif atau kalimat berita, kalimat interogatif atau kalimat tanya, kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan kalimat eksklamatif atau kalimat seruan. Data penelitian ini memperlihatkan tiga jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif atau kalimat berita, kalimat interogatif atau kalimat tanya, dan kalimat eksklamatif atau kalimat seruan.

3.2 Kalimat Deklaratif atau Berita

Kalimat deklaratif atau berita adalah kalimat yang isinya memberitakan atau menyatakan sesuatu. Kalimat ini ditandai intonasi turun dan pada umumnya mengandung makna yang menyatakan atau memberitahukan sesuatu. Dalam ragam tulis, biasanya diberi tanda titik pada bagian akhirnya. Data kalimat deklaratif atau berita terdapat dalam surat kabar *Media Indonesia* (152 kalimat), *Koran Tempo* (139 kalimat), *Kompas* (125 kalimat), *Investor Daily* (218 kalimat), *Bisnis Indonesia* (135 kalimat), *Berita Kota* (151 kalimat), *Suara Pembaruan* (138 kalimat), dan *Republika* (151 kalimat). Kalimat deklaratif atau berita dapat dilihat pada contoh berikut.

- (1) Sri juga menjelaskan ihwal terjadinya **rekening liar** itu karena ketidakpahaman para pengelola institusi terkait akan adanya aturan.
(MI-5/E/6-07)

- (2) *Tuduhan ini mengisyaratkan adanya ketidakberesan, bahkan mungkin kolusi yang bisa melibatkan para terdakwa. (KT-3/E/6-07)*
- (3) *Namun, ketika harga terus melambung, tetap saja menjadi beban masyarakat karena minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan kebutuhan pokok. (K-3/TR/6-07)*
- (4) *Saat melantik kabinetnya pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan salah satu programnya adalah memberantas korupsi yang begitu merajalela. (SP-2/TR 1/6-07)*
- (5) *Kita tentu tidak berharap apa yang terjadi pada minyak goreng bakal terjadi pula pada komoditas lain semacam semen, pupuk, gula, beras, garam, terigu, daging, dan kebutuhan strategis lainnya. (R-2/T/6-07)*

Contoh kalimat (1–5) memperlihatkan jenis kalimat deklaratif atau berita. Kalimat tersebut ditandai dengan tanda titik pada akhir kalimat. Kosakata pada contoh tersebut dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik, misalnya kata *rekening liar*, *kolusi*, *beban masyarakat*, *korupsi*, dan *minyak goreng* mempunyai citra yang kurang baik terhadap para penyelenggara di lingkungan pemerintah. Mereka seharusnya memiliki rekening sesuai dengan izin Menteri Keuangan; tidak melakukan kerja sama untuk maksud tidak terpuji, menjaga agar kenaikan harga bahan pokok jangan melambung tinggi, tidak melakukan korupsi atau sebagai aparat pemerintah haruslah bersih, dan mengendalikan harga minyak goreng.

Berikut ini adalah contoh kalimat berita yang terdapat dalam data penelitian.

- (6) *Kekayaan segelintir orang meningkat tajam bahkan menakjubkan berkat kepandaian mereka berinvestasi di pasar modal. (ID-3/T/6-07)*
- (7) *Kita menduga bukan faktor kesamaan ideologis dan spirit kebangsaan yang mengikat kedua partai menggalang koalisi. (BK-2/B/6-07)*
- (8) *Tidak ada tawar-menawar terhadap pelaku aksi teror yang menimbulkan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa, seperti yang terjadi sejak tragedi Bom Bali I. (BI-4/TR/6-07)*
- (9) *Kita membutuhkan adanya penanaman modal sekitar Rp1.000 triliun setiap tahun untuk mendorong ekonomi bertumbuh dengan 7 persen. (K-2/TR/6-07)*

- (10) *Eksplisit Surya Paloh, penggagas **aliansi** taktis politik Golkar, telah menyebutkan kerja sama ini untuk Pemilu 2009. (BK-2/B/6-07)*

Kelima contoh (6–10) menunjukkan jenis kalimat deklaratif atau berita. Kalimat tersebut ditandai dengan tanda titik pada akhir kalimat. Kosakata pada contoh tersebut dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik, misalnya *berinvestasi, koalisi, tidak ada tawar-menawar, penanaman modal, dan aliansi* mempunyai citra yang baik terhadap para penyelenggara pembangunan. Mereka dapat menjaga kestabilan ekonomi, bekerja sama antara partai, menindak dengan tegas terhadap pelaku aksi teror, menjaga kestabilan ekonomi, dan bergabung antara dua partai.

Data pada kalimat (11–15) memperlihatkan kalimat deklaratif atau berita. Kalimat ini ditandai dengan adanya tanda titik pada akhir kalimat.

- (11) *Penyelesaian ekonomi dengan pendekatan politik justru akan menjauhkan kita pada **pembenahan ekonomi** karena terlalu banyak kepentingan yang masuk di dalamnya. (K-2/TR/6-07)*
- (12) *Harus disadari industri-industri yang lestari di masa depan, termasuk sektor pertanian, adalah **industri** yang dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. (MI-4/E/6-07)*
- (13) ***Kebijakan baru** nanti sesungguhnya kelanjutan dari tiga paket yang dikeluarkan tahun lalu: perbaikan iklim investasi, infrastruktur, dan sektor keuangan, ditambah satu bidang baru, yaitu pemberdayaan usaha mikro dan kecil-menengah. (KT-1/E/6-07)*
- (14) *Tidak kalah pentingnya **peran swasta** dan bahkan di banyak negara sekarang ini swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. (K-2/TR/6-07)*
- (15) *Tanpa perubahan dan komitmen serius dan menyeluruh di dalam badan dan otoritas pemerintahan, kita khawatir **nasib paket** ini akan sama dengan tiga paket sebelumnya. (MI-3/E/6-07)*

Kosakata pada contoh (11–15) dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik, misalnya *pembenahan ekonomi, industri, kebijakan baru, peran swasta, dan nasib paket* mempunyai citra untuk meningkatkan perencanaan yang baik dan penanganan yang tepat guna oleh para penyelenggara pembangunan, baik pemerintah maupun swasta.

3.3 Kalimat Interogatif atau Tanya

Kalimat interogatif atau tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Data kalimat interogatif atau tanya terdapat dalam surat kabar *Media Indonesia* (8 kalimat), *Koran Tempo* (2 kalimat), *Kompas* (5 kalimat), *Investor Daily* (5 kalimat), *Bisnis Indonesia* (2 kalimat), *Berita Kota* (4 kalimat), *Suara Pembaruan* (3 kalimat), dan *Republika* (2 kalimat). Contoh kalimat interogatif atau tanya adalah sebagai berikut.

- (16) *Mengapa surat yang dikeluarkan secara aneh itu tetap dijadikan landasan oleh pejabat BPN?* (KT-3/E/6-07)
- (17) *Bagaimana kita bisa berharap ada **investasi** masuk apabila tidak pernah bersahabat dengan dunia usaha?* (K-2/TR/6-07)
- (18) *Apakah perkembangan ini menunjukkan bahwa, sektol rill sudah bergerak cepat dan Indonesia sudah **pulih dari krisis ekonomi**?* (ID-3/T/6-07)
- (19) *Haruskah kita **terbiasa** dengan situasi seperti ini?* (R-2/T/6-07)
- (20) ***Korupsi** Ditangani Biasa Lagi?* (SP-2/TR 1/6-07)

Contoh (16–20) menunjukkan jenis kalimat interogatif atau tanya. Kalimat tersebut ditandai dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kosakata pada contoh tersebut dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik, misalnya kata *surat*, *investasi*, *pulih dari krisis ekonomi*, *terbiasa*, dan *korupsi* mempunyai citra yang kurang baik terhadap para penyelenggara di lingkungan pemerintah karena harus menindaklanjuti secara tepat demi kemajuan di bidang ekonomi.

Berikut adalah contoh kalimat interogatif yang terdapat dalam data penelitian ini.

- (21) *Bukankah ada **hukum** yang memagari kita untuk tidak menabrak rambu-rambu hak asasi manusia?* (BI-4/TR/6-07)
- (22) *Tatkala uang **negara** yang disimpan di rekening liar meningkat dengan amat pesat, dan diketahui, pertanyaannya, seriuskah negara memerangi korupsi?* (MI-2/E/6-07)
- (23) *Pertanyaannya, mengapa meski rapat sudah digelar, rencana tindakan sudah ditetapkan, **harga** minyak goreng tetap saja tidak bisa dikendalikan?* (K-3/TR/6-07)
- (24) *Tetapi, mengapa **PKB dan PAN** tidak diajak berkoalisi?* (BK-2/B/6-07)

(25) *Apakah ini semua menunjukkan bahwa **target** pertumbuhan ekonomi 6,3% tahun ini tidak sulit tercapai?* (ID-3/T/6-07)

Contoh kalimat (21–25) memperlihatkan jenis kalimat interogatif atau tanya. Kalimat tersebut ditandai dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kosakata pada contoh tersebut dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik, misalnya kata *hukum*, *negara*, *harga*, *PKB* dan *PAN*, dan *target* mempunyai citra perlunya ketaatasaan dan keseriusan para penyelenggara pemerintah dalam menangani hak asasi manusia, korupsi, pengendalian harga minyak goreng, ajakan berkoalisi, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Data berikut memperlihatkan jenis kalimat tanya. Kalimat ini ditandai dengan adanya tanda tanya pada akhir kalimat.

(26) *Sanggupkah kita **mentransformasikan** diri kita guna merumuskan cita-cita besar bangsa ini?* (K-4/TR/6-07)

(27) *Bagaimana demonstrasi **wartawan**?* (KT-3/TR/6-07)

(28) *Kalau dianggap penyimpangan **administratif**, siapa yang harus menertibkan?* (MI-2/E/6-07)

(29) *Pertanyaannya, mengapa **pemulihan** itu berjalan lamban?*
(K-2/TR/6-07)

Kalimat (26–29) merupakan kalimat interogatif. Kosakata pada contoh tersebut dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik, misalnya kata *mentransformasikan*, *wartawan*, *administratif*, dan *pemulihan* mempunyai citra adanya perubahan yang baik, sebagai wartawan terikat kode etik profesinya, pemerintah perlu menertibkan dan bertindak terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan menuntut perubahan sikap dan cara kerja yang benar-benar berbeda.

3.4 Kalimat Eksklamatif atau Seruan

Kalimat eksklamatif atau seruan adalah kalimat yang dapat terikat atau tidak terikat, yang dalam bahasa Indonesia terjadi klausa bebas ditambah dengan partikel seru, seperti *alangkah* atau *bukankah*. Kalimat ini dapat terjadi dari struktur bukan klausa berupa kata, seperti *aduh*, *wah*, atau *amboi*. Data kalimat eksklamatif atau seruan tidak terdapat dalam surat kabar *Koran Tempo*, *Kompas*, *Investor Daily*, *Bisnis Indonesia*, *Berita Kota*,

Suara Pembaruan, dan *Republika*. Akan tetapi, data kalimat eksklamatif atau seruan hanya terdapat dalam surat kabar *Media Indonesia* (1 kalimat). Berikut ini adalah contohnya.

(30) *Ini memang aneh!* (MI-5/E/6-07)

Kalimat eksklamatif atau seruan pada contoh (30) tidak memperlihatkan adanya klausa bebas yang ditambah dengan partikel seru atau struktur bukan klausa, tetapi dilesapkan. Kosakata *aneh* mempunyai citra yang mengherankan terhadap para pengelola institusi yang mempunyai rekening liar. Para pengelola institusi tersebut seharusnya memiliki rekening sesuai dengan izin Menteri Keuangan.

3.5 Frekuensi Jenis Kalimat

Kalimat berita dalam data penelitian ini berjumlah 1.241 kalimat. Kalimat deklaratif atau berita terdapat 1.209 kalimat atau 97,4%. Kalimat interogatif atau tanya dalam data penelitian ini terdapat 31 kalimat atau 2,5%. Kalimat imperatif atau perintah dalam data penelitian ini terdapat 1 kalimat atau 0,1%. Frekuensi ketiga jenis kalimat tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut.

TABEL 4
FREKUENSI JENIS KALIMAT DALAM SURAT KABAR IBU KOTA

No.	Jenis Kalimat	F	%
1.	Kalimat Deklaratif atau Berita	1.209	97,4
2.	Kalimat Interogatif atau Tanya	31	2,5
3.	Kalimat Imperatif atau Perintah	1	0,1
	Jumlah	1.241	100

BAB IV

PEMAKAIAN KATA YANG LAYAK DALAM SURAT KABAR IBU KOTA

4.1 Pengantar

Keraf (1981:90) mengatakan bahwa bahasa selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa. Tingkat perubahan yang dialami tiap bahasa bergantung pada bermacam-macam faktor, misalnya kebutuhan untuk menyerap teknologi terbaru yang belum dimiliki, tingkat kontak dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan kekayaan budaya asli yang dimiliki penutur bahasanya. Kemudian, dikatakan walaupun ada unsur-unsur baru yang selalu muncul dan ada unsur-unsur lama yang lenyap dari pemakaian, serta ada unsur-unsur yang mengalami pergeseran dan perubahan makna, selalu akan terdapat bagian dari kosakata yang dikenal bersama dan dipakai oleh semua penutur bahasa.

Selanjutnya, dikemukakan bahwa di samping unsur-unsur bahasa yang dikuasai dan dikenal oleh seluruh anggota masyarakat bahasa, ada juga unsur bahasa yang terbatas penuturnya walaupun mereka berada di dalam masyarakat bahasa yang sama. Unsur-unsur semacam itu dikenal dengan pelbagai macam nama, antara lain, unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau dialek. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok ini harus dipergunakan secara hati-hati agar tidak merusak suasana. Apabila situasi formal tiba-tiba dimasuki oleh kata-kata yang bersifat kedaerahan, suasana formal tadi akan terganggu. Agar kata-kata yang dipergunakan tidak akan mengganggu suasana, hendaklah para peserta tutur bertindak lebih formal dalam situasi formal.

Di samping situasi, ada faktor lain yang mempengaruhi pemakaian bahasa, yaitu pokok persoalan yang akan disampaikan dan para peserta

tutur yang terlibat dalam komunikasi. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan pemakaian kata yang layak atau sesuai.

Dalam bab ini disajikan analisis data tentang pemakaian ragam formal dan takformal serta unsur asing dari segi kelayakan atau kesesuaian secara stilistik. Untuk memahami pengertian stilistik penulis mengacu kepada pendapat Turner (1976:7), yakni bagian dari linguistik yang menelaah variasi pemakaian bahasa dengan fokus perhatian pada bahasa dalam karya sastra. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelayakan dari segi stilistik berkaitan dengan pemakaian diksi pada aneka variasi kalimat yang dipakai oleh penutur yang berinteraksi.

Uraian tadi sejalan pula dengan ruang lingkup penelitian ini, kelayakan atau kesesuaian dari segi stilistik yang dideskripsikan dalam penelitian ini hanyalah segi keformalan ragam bahasa, yaitu (1) ragam formal atau ragam baku, (2) ragam takformal atau ragam takbaku, dan (3) ragam cakapan.

Pemakaian diksi atau pilihan kata yang terdapat dalam surat kabar ibu kota ditinjau dari segi kelayakan stilistik ragam formal lebih dominan daripada ragam takformal dan unsur bahasa asing.

4.2 Pemakaian Ragam Formal

Dalam situasi resmi digunakan bahasa Indonesia ragam tinggi (*high variety*). Ragam tinggi ini digunakan untuk pidato resmi, ceramah, khotbah, dan kuliah; penyiaran lewat radio televisi; penulisan yang bersifat resmi; tajuk rencana dan artikel surat kabar; susastra, khususnya puisi. Dalam proses pembakuan, ragam tinggi dianggap sebagai dasarnya.

Pemakaian diksi atau pilihan kata dalam penelitian ini cenderung ditandai ragam formal atau ragam baku. Hal ini sesuai dengan data berupa tajuk rencana yang menggunakan bahasa ragam tinggi. Contoh kalimat yang mengandung ragam formal adalah sebagai berikut.

- (31) *Permohonan izin disampaikan menjelang pemilihan kepala daerah atau presiden baru mengeluarkan izin pemeriksaan justru menjelang pemilihan kepala daerah.* (MI-1/E/6-07)
- (32) *Hanya itulah cara meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor.* (KT-1/E/6-07)
- (33) *Terus terang kita mengkhawatirkan kecenderungan kita sekarang ini yang begitu cair.* (K-3/TR/6-07)

- (34) *Apakah perkembangan ini **menunjukkan** bahwa sektor riil sudah sudah bergerak cepat dan Indonesia sudah pulih dari krisis ekonomi?* (ID-4/T/6-07)
- (35) *Tanpa ini semua, negara kita yang **dianugerahi** berbagai kekayaan alam akan tetap miskin rakyatnya.* (R-1/T/6-07)

Dalam kelima contoh itu tampak bahwa diksi yang digunakan para penulis tajuk rencana tampil secara eksplisit, baik yang berfungsi mengisi slot unsur subjek, predikat, objek, maupun keterangan kalimat. Kata *di-sampaikan* (bukan *disampaikan*), *meningkatkan* (bukan *meningkatkan*), *mengkhawatirkan* (bukan *mengkhawatirkan*), *menunjukkan* (bukan *menunjukkan*), dan *dianugerahi* (bukan *dianugerahi*) merupakan bentuk-bentuk kata baku. Imbuhan kelima kata tersebut tampil secara eksplisit (*di-kan*, *meng-kan*, dan *di-i*) dan bentuk dasar semuanya bentuk dasar baku (*sampai*, *tingkat*, *khawatir*, *tunjuk*, dan *anugerah*). Kata *disampaikan* pada contoh (31) mempunyai makna ‘diberikan’, ‘disampaikan’, dan ‘diantarkan’. Sementara itu, kata *meningkatkan* pada contoh (32) memiliki makna ‘menaikkan’. Kata *mengkhawatirkan* pada contoh (33) mempunyai makna ‘khawatir terhadap suatu hal’ atau ‘menimbulkan rasa khawatir’. Kata *menunjukkan* pada contoh (34) memiliki makna ‘memperlihatkan’ atau ‘menggambarkan’. Kata *dianugerahi* pada contoh (35) mempunyai makna ‘diberi anugerah’ atau ‘dikaruniai’.

Berikut ini adalah contoh ragam formal yang terdapat dalam data.

- (36) *Kecerdikan dan **keterampilan** polisi memang diuji betul.* (K-5/TR/6-07)
- (37) *Itu **menandakan** daya kompetisi manufaktur Indonesia merosot.* (KT-1/E/6-07)
- (38) *Kita **meminta** kepedulian semua pihak untuk bersama-sama menjalankan amanat reformasi secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.* (BK-1/B/5-07)
- (39) *Solusi **mengimpor** memang paling mudah dibandingkan memajukan sektor pertanian di dalam negeri, termasuk bagaimana benih pada berkualitas dan meningkatkan produktivitas.* (SP-2/TR II/6-07)
- (40) *Mereka adalah Al-Qaeda dan jamaah Islamiyah, berikut jaringan kerja sel-sel mereka yang **diklaim** AS ataupun sekutunya, berkembang biak dengan subur di negara-negara tertentu, tak terkecuali di Indonesia.* (BI-4/TU/6-07)

Pada contoh (35–40) terlihat bahwa diksi yang digunakan para penulis tajuk rencana atau editorial tampil secara eksplisit, baik yang berfungsi mengisi slot unsur subjek, predikat, objek, maupun keterangan kalimat. Kata *keterampilan* (bukan *ketrampilan*), *menandakan* (bukan *menandakan*), *meminta* (bukan *mepinta*), *mengimpor* (bukan *mengimport*), dan *diklaim* (bukan *diclaim*) merupakan bentuk-bentuk kata baku. Imbuhan kelima kata tersebut tampil secara eksplisit (*ke-an*, *meng-kan*, *meng-*, dan *di-*) dan bentuk dasar semuanya bentuk dasar baku (*terampil*, *tanda*, *minta*, *impor*, dan *klaim*). Kata *keterampilan* pada contoh (36) mempunyai makna ‘kecakapan untuk menyelesaikan tugas’. Sementara itu, kata *menandakan* pada contoh (37) memiliki makna ‘menyatakan atau menunjukkan (bahwa)’. Kata *meminta* pada contoh (38) mempunyai makna ‘minta’. Kata *mengimpor* pada contoh (39) memiliki makna ‘memasukkan barang dagangan dari luar negeri’. Kata *diklaim* pada contoh (40) mempunyai makna ‘diminta atau dituntut pengakuan atas suatu fakta seseorang (suatu organisasi, perkumpulan, atau negara)’.

Contoh berikut memperlihatkan pemakaian ragam formal dalam data penelitian ini.

- (41) *Saat itu dua pencakar langit di New York, Amerika Serikat, **diledakkan** lewat terjangan pesawat yang disandera.* (KT=2/E/6-07)
- (42) *Bisnis asuransi juga **dimanfaatkan** pemerintah setempat untuk pembangunan ekonomi dan sosial dengan memberikan proteksi terhadap risiko di bidang pertanian, peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan.* (ID-1/T/6-07)
- (43) *Terlepas dari argumentasi yang **membenarkan** kebijakan BJ Habibie untuk membangun industri pesawat terbang, beberapa hal memang perlu diperhatikan untuk merevitalisasi industri strategis dalam negeri sekarang ini.* (R-1/T/6-07)
- (44) *Tidak mudah memang **menuntaskan** apa-apa yang telah diamanat reformasi, tetapi setidaknya kita tetap berada dalam pusaran amanat itu.* (BK-1/B/5/07)
- (45) *Lembaga perizinan itu, sadar atau tidak, **menyimpan** celah masuknya politisasi dan intervensi.* (MI-1/E/6-07)

Kelima contoh (41–45) menunjukkan bahwa diksi yang digunakan para penulis tajuk rencana atau bidik tampil secara eksplisit, baik yang berfungsi mengisi slot unsur subjek, predikat, objek, maupun keterangan

kalimat. Kata *diledakkan* (bukan *diledakken*), *dimanfaatkan* (bukan *dimanfaatken*), *membenarkan* (bukan *membenarken*), *menuntaskan* (bukan *menuntasken*), dan *menyimpan* (bukan *menyimpnen*) merupakan bentuk-bentuk kata baku. Imbuhan kelima kata tersebut tampil secara eksplisit (*di-kan*, *meng-kan*, dan *me-*) dan bentuk dasar semuanya bentuk dasar baku (*ledak*, *manfaat*, *benar*, *tuntas*, dan *simpan*). Kata *diledakkan* pada contoh (41) mempunyai makna ‘menghancurkan dengan barang yang meledak’. Sementara itu, kata *dimanfaatkan* pada contoh (42) memiliki makna ‘dijadikan ada manfaatnya atau gunanya’. Kata *membenarkan* pada contoh (43) mempunyai makna ‘membuat supaya benar’, ‘membetulkan’, dan ‘memperbaiki’. Kata *menuntaskan* pada contoh (44) memiliki makna ‘menyelesaikan semua’. Kata *menyimpan* pada contoh (45) mempunyai makna ‘menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang’.

4.3 Pemakaian Ragam Takformal

Bahasa Indonesia memiliki ragam rendah (*low variety*). Bahasa Indonesia ragam rendah digunakan dalam percakapan sehari-hari, surat-menyurat yang bersifat pribadi, atau rubrik-rubrik tertentu dalam surat kabar, hubungan sosial yang bersifat tidak resmi (takformal atau takbaku). Data dalam penelitian ini memperlihatkan adanya pemakaian diksi yang takformal. Contoh ragam takformal dalam data penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (46) *Pembenahan sektor riil dalam paket kebijakan ini banyak menyentuh pada birokrasi yang sampai saat ini masih **amburadul**. (R-5/T/6-07)*
- (47) ***Duit** yang dikumpulkan secara ilegal oleh Rokhmin dan Andin memang disumbangkan ke mana-mana: dari nelayan sampai calon presiden, seperti Amien Rais. (KT-2/E/6-07)*
- (48) *Kita, masyarakat, diberi waktu –kalau tak mau **dibilang** ‘dipaksa’– melakukan penyesuaian. (R-2/T/6-07)*
- (49) *Sudah saatnya pemerintah mereformasi industri asuransi dan menjadikannya sebagai salah satu pilar yang **kokoh** untuk menopang ekonomi. (ID-1/T/6-07)*
- (50) *la juga sudah **menelorkan** ribuan doktor dan insinyur yang ahli dalam bidang sains dan teknologi. (R-1/T/6-07)*

Kata *amburadul*, *duit*, *dibilang*, *kokoh*, dan *menelorkan* pada contoh (46–50) merupakan ragam takformal. Kata *amburadul* pada contoh (46) me-

rupakan bentuk cakapan. Kata *amburadul* bermakna 'centang perenang; berantakan; porak poranda'. Kata *duit* pada contoh (47) merupakan bentuk cakapan. Kata *duit* bermakna 'uang; alat pembayaran'. Kata *dibilang* pada contoh (48) merupakan bentuk cakapan. Kata *dibilang* bermakna 'dikatakan'. Kata *kokoh* pada contoh (49) merujuk pada kata *kukuh* (ragam formal). Kata *kukuh* bermakna 'kuat terpancang pada tempatnya'. Kata *menelorkan* pada contoh (50) yang mempunyai bentuk dasar *telor* merujuk pada kata *telur* (ragam formal). Kata *menelurkan* bermakna 'menghasilkan'.

Berikut ini adalah contoh ragam takformal yang terdapat dalam data penelitian.

- (51) *Bukan hanya sekedar dukungan teknologi dan finansial yang dibutuhkan, tetapi yang tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat.* (K-3/TR/6-07)
- (52) *Kalau benar AS mengembargo Indonesia dalam hal pasokan senjata dan suku cadang pesawat (perang) serta latihan militer, maka ini bukan yang pertama.* (SP-3/TR/7-07)
- (53) *Dan ketika sistem itu tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat secara keseluruhan.* (K-3/TR/6-07)
- (54) *Izin presiden tidak hanya menghambat pemberantasan korupsi, tapi sudah mengingkari hakikat Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).* (MI-1/E/6-07)
- (55) *Bereaksi sekaligus memberikan apresiasi bandingan untuk tidak sekedar menerima begitu saja hasil polling tersebut.* (BK-5/B/7-07)

Pemakaian konjungtor *bukan* dan *tetapi*; *kalau* dan *maka*; *dan ketika* dan *maka* pada contoh (51–53) termasuk dalam bahasa Indonesia tidak formal. Penggunaan konjungtor *bukan* dan *tetapi* pada contoh (51) merupakan hubungan perlawanan yang menyatakan penguatan. Klausa kedua memuat informasi yang menguatkan dan menandaskan informasi yang dinyatakan dalam klausa yang pertama. Dalam klausa yang pertama terdapat *bukan hanya* dan pada klausa kedua terdapat *melainkan juga*. Dengan demikian, kata *tetapi* pada contoh (51) perlu disulih dengan *melainkan juga*. Dalam sebuah kalimat terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Pada contoh (52) dan (53) terdiri atas dua anak kalimat sehingga salah satu kata peng-

hubung dalam kalimat tersebut tidak perlu digunakan. Berikut perbaikan ketiga kalimat tersebut.

- (51a) *Bukan hanya sekedar dukungan teknologi dan finansial yang dibutuhkan, melainkan yang tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat.*
- (52a) *Kalau benar AS mengembargo Indonesia dalam hal pasokan senjata dan suku cadang pesawat (perang) serta latihan militer, ini bukan yang pertama.*
- (53a) Sistem itu tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya, **maka** yang akan menjadi korban adalah masyarakat *secara keseluruhan.*

Kata *sekedar* pada contoh (55) merupakan ragam takformal. Kata *sekedar* merujuk pada kata *sekadar* (ragam formal). Kata *sekedar* bermakna ‘hanya untuk’ dan ‘seperlunya’.

4.4 Pemakaian Unsur Bahasa Asing

Data penelitian ini dipengaruhi oleh unsur bahasa asing. Unsur bahasa asing ini ada yang tampil berupa sepenuhnya diambil dari kata atau istilah bahasa aslinya (bahasa Inggris). Berikut ini adalah beberapa contoh pemakaian unsur bahasa asing.

- (56) *Perhatian khusus perlu diberikan kepada manufaktur, sebagai penyumbang lebih dari setengah bagian sektor tradable terhadap PDB. (KT-1/E/6-07)*
- (57) *Selain itu, bisnis asuransi merupakan bisnis keuangan yang padat karya. Lapangan kerja yang disediakan cukup banyak, dari karyawan kantor, underwriter, appraisal, hingga agen yang merambah sampai pelosok daerah. (ID-1/T/6-07)*
- (58) *Terutama kalangan produsen, mereka tidak sepenuh hati menjalankan tugas melaksanakan domestic market obligation. (K-3/TR/6-07)*
- (59) *Gubernur BI Burhanudin Abdullah menyatakan, secara absolute kredit bank meningkat. (ID-5/T/6-07)*
- (60) *Sebagaimana Surat Utang Negara (SUN), SBI adalah instrumen risk free. (ID-5/T/6-07)*

Pada kalimat (56–60) pengaruh bahasa asing terjadi pada tataran leksikal yang berupa kata dasar dan ungkapan, yakni *tradable, underwriter,*

appraisal, *domestic market obligation*, *absolute*, dan *risk free*. Semua kata asing itu berasal dari bahasa Inggris yang diambil sepenuhnya, tanpa diindonesiakan.

Unsur bahasa asing yang dipergunakan oleh para penulis artikel dalam rubrik tajuk rencana atau editorial itu setidaknya-tidaknya mempunyai fungsi menunjukkan identitas personal. Makna unsur asing pada data tersebut adalah 'barang niaga yang cepat menguntungkan; barang yang bisa diperdagangkan; jual beli barang dagangan utama' untuk kata *tradable*, 'penanggung asuransi' untuk kata *underwriter*, 'penilaian, penaksiran, atau pengharapan' untuk kata *appraisal*, 'pasar obligasi domestik' untuk kata *domestic market obligation*, 'absolut atau hal-hal yang mutlak' untuk kata *absolute*, dan 'bebas risiko' untuk kata *risk free*.

Berikut ini adalah contoh data yang memperlihatkan pemakaian unsur asing.

- (61) *Penerimaan bantuan harus membayar tenaga konsultan yang berasal dari negara-negara donor-biasanya fee mereka sangat tinggi—dan harus membeli bahan mentah untuk proyek pembangunan dari negara-negara tersebut. (BI-2/TU/6-07)*
- (62) *DPR RI menyetujui pemberian insentif khusus bagi sektor usaha yang mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong tarif PPh bagi perusahaan yang bergerak di sektor agrarisbisnis, industri berat, dan yang hendak go publik. (ID-3/T/6-07)*
- (63) *Dalam situasi ekonomi yang masih rentan inflasi tinggi, bank sentral terus memangkas BI rate tanpa ragu. (ID-5/T/6-07)*
- (64) *Sebagai partai baru yang menunjukkan performance baik, bersih, dan antikorupsi, calon-calon yang dijagokan mengalahkan calon PDIP dan Golkar. (BK/B/6-07)*
- (65) *Industri asuransi harus diberi palying field yang sama dengan lembaga keuangan lainnya sehingga dapat berkembang dan berperan lebih banyak dalam menopang pertumbuhan ekonomi. (ID-1/T/6-07)*

Pada kalimat (60–65) tampak bahwa diksi atau pilihan kata yang digunakan oleh para penulis artikel dalam rubrik tajuk rencana atau editorial terjadi pada tataran leksikal yang berupa kata dasar dan ungkapan. Kata *fee*, *go publik*, *rate*, *performance*, dan *palying field* merupakan kata asing yang berasal dari bahasa Inggris yang diambil sepenuhnya, tanpa diindonesiakan.

Unsur bahasa asing yang dipergunakan oleh para penulis artikel tajuk rencana atau editorial mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia. Kata *fee* mempunyai makna 'uang pembayaran; biaya'. Kata *go publik* mempunyai makna 'masuk bursa'. Selanjutnya, kata *rate* mempunyai makna 'kurs'. Kemudian, kata *performance* mempunyai makna 'prestasi'. Kata *palying field* mempunyai makna 'lapangan permainan'.

Contoh pemakaian unsur diksi dalam data penelitian adalah sebagai berikut.

- (66) Kita semua *care*, karena harapan *masa depan* yang lebih baik menjadi tanggung jawab bersama. (BK-1/B/5-07)
- (67) Meski sebagai *super body*, KPK pun pada awalnya tidak mulus melakukan pekerjaannya. (SP-2/TRI/6-07)
- (68) *Interpelasi* Iran yang sempat menjadi *hotline* politik tiba-tiba tergeser setelah Mabes Polri mengumumkan sukses penangkapan gembong teroris tersebut. (BK-2/B/5-07)
- (69) Tetapi caranya tentu saja bukan seperti *cowboy* menyelesaikan persoalan. (BI-1/TU/5-07)
- (70) Suara kritis kalangan mahasiswa dan pemuda dalam *me-review* jalannya reformasi setelah sembilan tahun ini kita posisikan sebagai bentuk kepedulian mereka atas visi masa depan bangsa. (BK-1/B/5-07)

Contoh kalimat (66–70) mengandung pengaruh bahasa asing yang terjadi pada tataran leksikal yang berupa kata dasar dan ungkapan, yakni *care*, *super body*, *hotline*, *cowboy*, dan *review*. Semua kata asing itu berasal dari bahasa Inggris yang diambil sepenuhnya, tanpa diindonesiakan.

Unsur bahasa asing yang dipergunakan oleh para penulis artikel dalam rubrik tajuk rencana atau editorial itu setidaknya-tidaknya mempunyai fungsi menunjukkan identitas personal. Kata *care* bermakna 'perhatian'. Makna unsur asing pada data 'super kuasa' adalah untuk kata *super body*. Makna 'isu utama yang berkembang dengan cepat (dari "interpelasi" ke "teroris")' adalah untuk kata *hotline*. Kata *cowboy* berpadanan dengan kata *koboi* yang bermakna 'orang yang bertindak seenaknya sendiri (melanggar aturan, menghakimi sendiri, dan suka berkelahi'. Makna 'meninjau lagi' adalah untuk kata *review*.

BAB V

PEMAKAIAN KATA YANG TEPAT DAN CERMAT DALAM SURAT KABAR IBU KOTA

5.1 Pengantar

Pemilihan kata yang tepat dalam ragam tulis berkaitan erat dengan kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca, seperti yang dipikirkan penulis. Oleh karena itu, pemilihan kata yang tepat menyangkut masalah makna kata dan kosakata seseorang. Penguasaan kosakata yang kaya akan memungkinkan penulis lebih bebas memilih kata yang dianggapnya paling tepat mewakili pikirannya. Ketepatan makna kata menuntut kesadaran pembicara untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kata dengan referensinya.

Berdasarkan pemakaian kata yang tepat, data penelitian ini cenderung diwarnai oleh pemakaian kata yang denotatif (harfiah) diikuti oleh pemakaian atau pemilihan kata konotatif (tidak harfiah, pada umumnya makna konotatif lebih banyak dijumpai dalam bentuk kiasan atau majas), hiponimi dalam pilihan kata, serta makna afektif/emotif dan asosiatif. Kelima jenis konteks pemakaian atau pemilihan kata tersebut dapat dilihat pada contoh berikut.

5.2 Hiponimi dalam Pilihan Kata

Data penelitian ini memperlihatkan adanya hiponimi, yaitu relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik. Berikut ini adalah contoh hiponimi dalam pilihan kata.

(71) *Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia lebih rendah daripada Singapura, yang menempati urutan pertama, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, Vietnam, dan Filipina. (KT-1/E/6-07)*

- (72) *Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa bisa disertakan sebagai anggota koalisi karena kedua partai ini memiliki kemiripan ideologi dengan PDIP dan Golkar.* (BK-3/B/6-07)
- (73) *Ada bom Kuningan, bom Bali II, bom J.W. Marriott, dan berbagai aksi teror yang menggunakan bom sebagai alat perjuangan mereka.* (BI-4/TU/6-07)
- (74) *Ketujuh keajaiban itu masing-masing adalah Tembok Besar (Cina), Petra (Jordania), Patung Kristus Sang Penebus (Brazil), Machu Piccu (Peru), Taj Mahal (India), Chitzen Itza (Meksiko), dan Koloseum Roma (Italia).* (BK-5/B/7-07)
- (75) *Bertahun-tahun kita mengimpor beras, juga komoditas penting dan strategis, seperti jagung, gula, kedelai, gandum, daging, garam, dan banyak lagi.* (SP-2/TR II/6-07)

Pada contoh (71) terdapat makna *Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, Vietnam, dan Filipina* dalam makna *Asia Tenggara*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, Vietnam, dan Filipina* berhiponimi dengan *Asia Tenggara*. *Asia Tenggara* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, Vietnam, dan Filipina*. Contoh (72) memperlihatkan makna *Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, PDIP, dan Golkar* dalam makna *partai*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, PDIP, dan Golkar* berhiponimi dengan *partai*. *Partai* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, PDIP, dan Golkar*. Pada contoh (73) tampak makna *bom Kuningan, bom Bali II, dan bom J.W. Marriott* dalam makna *bom*. Jadi, *bom Kuningan, bom Bali II, dan bom J.W. Marriott* berhiponimi dengan *bom*. *Bom* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *bom Kuningan, bom Bali II, dan bom J.W. Marriott*. Contoh (74) memperlihatkan makna *Tembok Besar (Cina), Petra (Jordania), Patung Kristus Sang Penebus (Brazil), Machu Piccu (Peru), Taj Mahal (India), Chitzen Itza (Meksiko), dan Koloseum Roma (Italia)* dalam makna *tujuh keajaiban dunia*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Tembok Besar (Cina), Petra (Jordania), Patung Kristus Sang Penebus (Brazil), Machu Piccu (Peru), Taj Mahal (India), Chitzen Itza (Meksiko), dan Koloseum Roma*

(Italia) berhiponimi dengan *tujuh keajaiban dunia*. *Tujuh keajaiban dunia* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *Tembok Besar (Cina)*, *Petra (Jordania)*, *Patung Kristus Sang Penebus (Brazil)*, *Machu Piccu (Peru)*, *Taj Mahal (India)*, *Chitzen Itza (Meksiko)*, dan *Koloseum Roma (Italia)*. Pada contoh (75) terdapat makna *jagung, gula, kedelai, gandum, daging, garam, dan beras* dalam makna *komoditas penting dan strategis*. Jadi, *jagung, gula, kedelai, gandum, daging, garam, dan beras* berhiponimi dengan *komoditas penting dan strategis*. *Komoditas penting dan strategis* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *jagung, gula, kedelai, gandum, daging, garam, dan beras*.

Contoh hiponimi dalam pilihan kata yang terdapat dalam data penelitian adalah sebagai berikut.

- (76) *Begitu banyak lahan sawah produktif beralih fungsi karena dijadikan pusat perdagangan, perkantoran, permukiman, dan industri.* (SP-2/TR II/6-07)
- (77) *Nah, ini dia. Temuan terbanyak ada pada Departemen Hukum dan HAM (82 rekening), disusul Departemen Kesehatan (47 rekening), Pertahanan (44 rekening) dan Departemen Agama sejumlah 23 rekening.* (BI-4/TU/5-07)
- (78) *Hendarman mengatakan, tim yang dipimpinnnya selama dua tahun telah berhasil menyelamatkan uang negara Rp3,9 triliun lebih dan aset negara di daerah sebesar Rp4,1 miliar.* (SP-3/TR I/6-07)
- (79) *Sadar akan hal itu, banyak negara sangat gigih membela sektor pertaniannya, melindungi petaninya, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.* (ID-2/T/6-07)
- (80) *Ada 141 rencana tindak yang harus dilaksanakan oleh jajaran menteri kabinet, lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, serta bupati/wali kota.* (SP-4/TR I/6-07)

Pada contoh (76) terdapat makna *pusat perdagangan, perkantoran, permukiman, dan industri* dalam makna *kawasan*. Jadi, *pusat perdagangan, perkantoran, permukiman, dan industri* berhiponimi dengan *kawasan*. *Kawasan* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *pusat perdagangan, perkantoran, permukiman, dan industri*. Contoh (77) memperlihatkan makna *Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, dan Departemen Agama* dalam makna *departemen*. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa *Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, dan Departemen Agama* berhiponimi dengan *departemen*. *Departemen* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, dan Departemen Agama*. Pada contoh (78) tampak makna *Rp3,9 triliun dan Rp4,1 miliar* dalam makna *uang*. Jadi, *Rp3,9 triliun dan Rp4,1 miliar* berhiponimi dengan *uang*. *Uang* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *Rp3,9 triliun dan Rp4,1 miliar*. Contoh (79) memperlihatkan makna *Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa* dalam makna *negara maju*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa* berhiponimi dengan *negara maju*. *Negara maju* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa*. Contoh (80) menunjukkan makna *jajaran menteri kabinet, lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, serta bupati/wali kota* dalam makna *aparatur negara*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *jajaran menteri kabinet, lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, serta bupati/wali kota* berhiponimi dengan *aparatur negara*. *Aparatur negara* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *jajaran menteri kabinet, lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, serta bupati/wali kota*.

Berikut adalah contoh hiponimi dalam data penelitian ini.

- (81) *Sebab pertumbuhan sektor usaha bidang jasa (non-tradable)—seperti pengangkutan, keuangan, komunikasi, konstruksi, dan jasa-jasa di luar industri—terbilang tingg: 8,3 persen.* (KT-1/E/6-07)
- (82) *Berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas agar kemiskinan dan kemelaratan terjauh dari kehidupan bermasyarakat.* (BK-1/B/5-07)
- (83) *Kali ini sektor riil dan usaha kecil menjadi fokus, yang terangkum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* (R-5/T/6-07)
- (84) *Sekecil apa pun aksi pengeboman segera memperkuat persepsi, Indonesia adalah negeri yang tidak aman. Empat kali teror besar, dua kali di Bali dan dua kali di Jakarta, memang mencitrakan negeri kita sebagai negeri penuh ancaman.* (K-5/TR/6-07)
- (85) *Selain persenjataan (Pindad), kapal laut (PAL), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), dan kereta api, industri strategis yang menyangkut hidup orang banyak musti diutamakan.* (R-1/T/6-07)

Pada contoh (81) terdapat makna *pengangkutan, keuangan, komunikasi, konstruksi, dan jasa-jasa di luar industri* dalam makna *usaha bidang jasa*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *pengangkutan, keuangan, komunikasi, konstruksi, dan jasa-jasa di luar industri* berhiponimi dengan *usaha bidang jasa*. *Usaha bidang jasa* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *pengangkutan, keuangan, komunikasi, konstruksi, dan jasa-jasa di luar industri*. Contoh (82) memperlihatkan makna *kemiskinan dan kemelaratan* dalam makna *pemberdayaan ekonomi kerakyatan*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *kemiskinan dan kemelaratan* berhiponimi dengan *pemberdayaan ekonomi kerakyatan*. *Pemberdayaan ekonomi kerakyatan* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *kemiskinan dan kemelaratan*. Pada contoh (83) tampak makna *usaha mikro, kecil, dan menengah* dalam makna *usaha*. Jadi, *usaha mikro, kecil, dan menengah* berhiponimi dengan *usaha*. *Usaha* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *usaha mikro, kecil, dan menengah*. Contoh (84) memperlihatkan makna *Bali dan Jakarta* dalam makna *Indonesia*. Dengan demikian, dapat dikatakan *Bali dan Jakarta* berhiponimi dengan *Indonesia*. *Indonesia* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *Bali dan Jakarta*. Pada contoh (85) terdapat makna *persenjataan (Pindad), kapal laut (PAL), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), dan kereta api* dalam makna *industri strategis*. Jadi, *persenjataan (Pindad), kapal laut (PAL), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), dan kereta api* berhiponimi dengan *industri strategis*. *Industri strategis* merupakan superordinat (hiperonim) bagi *persenjataan (Pindad), kapal laut (PAL), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), dan kereta api*.

5.3 Makna Denotasi

Data penelitian ini memperlihatkan kekerapan tertinggi pemakaian atau pemilihan kata yang bermakna denotasi dibandingkan dengan konotasi, yaitu majas. Tingginya frekuensi pemakaian atau pemilihan kata yang bermakna denotasi tersebut disebabkan oleh faktor situasional, yang antara lain tampak melalui dominasi topik dalam rubrik tajuk rencana atau editorial yang cenderung resmi, jarak sosial antara penulis dan pembaca yang resmi. Berikut ini adalah contohnya.

(86) *Aturannya, calon presiden tak boleh menerima sumbangan dari pemerintah.* (KT-3/E/6-07)

- (87) **Konstitusi** menjamin warga negara sama kedudukannya di depan hukum. (MI-1/E/6-07)
- (88) Sejauh ini, Indonesia masih menjadi **pengimpor** berbagai jenis pangan. (ID-2/T/6-07)
- (89) Padahal, dalam **ekonomi**, efisiensi merupakan syarat mutlak.
(56) (K-2/TR/6-07)
- (90) Mengukur arah dan tujuan **reformasi** menjadi titik evaluasi kita setiap tahun. (BK-1/B/5-07)

Kelima contoh (86–90) memperlihatkan pemakaian atau pemilihan kata yang masing-masing memiliki arti tunggal dan maknanya dapat disimpulkan secara eksplisit atau langsung dari setiap kata yang menjadi unsur-unsur pembentuknya.

Dalam contoh tersebut, kata denotatif yang dianalisis adalah kata yang dicetak miring tebal. Kata *pemerintah* dalam contoh (86) bermakna '(1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara); (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pada contoh (87) kata *konstitusi* bermakna '(1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar); (2) undang-undang dasar suatu negara'. Kata *pengimpor* dalam contoh (88) bermakna 'orang (perusahaan) yang mengimpor ; importer'. Pada contoh (89) kata *ekonomi* bermakna '(1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); (2) pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga; (3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara); (4) urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara)'. Kata *reformasi* dalam contoh (90) bermakna 'perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara'.

Hal serupa dapat dilihat pula dalam contoh data berikut.

- (91) Tak hanya **mahasiswa**, ibu-ibu rumah tangga juga banyak direkrut menjadi agen asuransi. (ID-12/T/6-07)

- (92) Kita menyambut baik rencana pemerintah merevitalisasi **industri** strategis dalam negeri, termasuk industri pertahanan dan keamanan. (R-1/T/6-07)
- (93) Keputusan pemerintah itu ditentang sebagian anggota **masyarakat** dan direspons oleh DPR. (SP-1/TR/6-07)
- (94) Tidak kalah pentingnya peran **swasta** dan bahkan di banyak negara sekarang ini swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. (K-2/TR/6-07)
- (95) Bukan hanya dalam hal kebutuhan industri persenjataan dan suku cadang **pesawat**, tapi juga berbagai macam industri lainnya. (R-1/T/6-07)

Contoh (91–95) menunjukkan pemakaian atau pemilihan kata yang masing-masing memiliki arti tunggal dan maknanya dapat disimpulkan secara eksplisit atau langsung dari setiap kata yang menjadi unsur-unsur pembentuknya.

Kelima kata denotatif yang dianalisis adalah kata yang dicetak miring tebal. Kata *mahasiswa* dalam contoh (91) bermakna ‘orang yang belajar di perguruan tinggi’. Pada contoh (92) kata *industri* bermakna ‘kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misal mesin’. Kata *masyarakat* dalam contoh (93) bermakna ‘sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama’. Pada contoh (94) kata *swasta* bermakna ‘bukan milik pemerintah; partikelir’. Kata *pesawat* dalam contoh (95) bermakna ‘(1) alat perkakas; mesin; (2) kapal terbang’.

Berikut ini adalah contoh pemakaian kata denotatif.

- (96) Berbagai **kekayaan** alam kita harus dikelola secara **modern**. (R-1/T/6-07)
- (97) Perbaikan iklim **investasi** memang sangat mendesak dilakukan. (KT-1/E/6-07)
- (98) Target harga **minyak goreng** tersebut diharapkan tercapai paling lambat awal Juli 2007. (R-2/T/6-07)
- (99) Semua itu adalah tuntutan atas kesadaran bersama bahwa **negeri** ini tidak boleh lagi menjadi milik orang-orang berkuasa, elit pemerintah, dan partai politik. (BK-1/B/5-07)
- (100) Sudi mengaku permohonan **polisi** atau jaksa kepada Presiden masih menumpuk. (MI-1/E/6-07)

Kelima contoh memperlihatkan pemakaian atau pemilihan kata yang masing-masing memiliki makna tunggal yang lugas. Secara langsung dapat dipahami makna masing-masing kata yang bercetak miring tebal.

Dalam contoh (96–100), kata denotatif yang dianalisis adalah kata yang dicetak miring tebal. Kata *modern* dalam contoh (96) bermakna '(1) terbaru; mutakhir; (2) sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman'. Pada contoh (97) kata *investasi* bermakna '(1) penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; jumlah uang atau modal yang ditanam'. Kata *minyak goreng* dalam contoh (98) bermakna 'minyak yang dipakai untuk menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak kacang'. Pada contoh (99) kata *negeri* bermakna '(1) tanah tempat tinggal suatu bangsa; (2) negara; pemerintah'. Kata *polisi* dalam contoh (100) bermakna '(1) badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang); (2) anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan)'

5.4 Makna Konotasi

Pada umumnya makna konotasi lebih banyak dijumpai dalam bentuk kiasan atau majas. Menurut Luxemburg (1984:187), makna kiasan atau majas memperlihatkan gejala bahwa suatu arti tertentu dialihkan kepada suatu hal lain sehingga timbul suatu arti yang baru. Pengertian yang satu dipergunakan dalam arti lain dan dibandingkan dengan yang pertama. Peralihan arti itu dapat terjadi apabila ada yang dikatakan dan apa yang sebetulnya dimaksudkan dapat dikaitkan satu dengan yang lain.

Sehubungan dengan hal itu, majas atau makna kiasan tidak hanya digunakan dalam puisi—yang pemakaiannya dapat menimbulkan citraan dan imajinasi pembaca—tetapi juga digunakan dalam rubrik tajuk rencana atau editorial. Majas yang baik menyarankan dan menimbulkan citra tertentu di dalam pikiran pembaca atau pendengarnya. Pada umumnya dibedakan 3 jenis majas: (1) majas perbandingan, seperti umpamaan, metafora atau kiasan, analogi, insanan; (2) majas pertentangan, seperti ironi, hiperbol, litotes; (3) majas pertautan, seperti metonim, sinekdoke, kilatan, dan eufimisme.

Keraf (1991:129) menyebut majas dengan memakai gaya bahasa kiasan yang merupakan penyimpangan makna (*figurative of speech*). Gaya

bahasa kiasan dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan. Dijelaskan pula bahwa membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain berarti mencoba menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan di antara dua hal. Berdasarkan perbandingan tersebut, Keraf (1991:138–145) membagi gaya bahasa kiasan menjadi 16, antara lain, metafora dan personifikasi.

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal itu, tetapi dalam bentuk yang sangat singkat dengan menghilangkan kata-kata, seperti *bagaikan*, *seperti*, dan *laksana*. Bagian pokok pertama langsung dihubungkan dengan bagian pokok kedua sehingga metafora tidak menyatakan suatu perbandingan secara terbuka atau secara eksplisit, tetapi sekadar memberikan sugesti adanya suatu perbandingan. Arti yang lengkap dari suatu metafora tergantung dari konteksnya. Majas metafora dapat berdiri sendiri sebagai kata kerja, kata sifat, kata benda, frasa, atau klausa.

Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Benda-benda tersebut dapat bertindak, berbuat, atau berbicara seperti manusia, baik dalam tindak-tanduk, perasaan, maupun perwatakan manusia lainnya.

Berikut adalah contoh yang memperlihatkan makna konotasi dalam majas.

- (101) *Kalau memberantas rekening liar di departemen saja tidak mampu, bagaimana mengejar kekayaan konglomerat yang sudah dilarikan ke luar negeri?* (MI-2/E/6-07)
- (102) *Bila borok yang ada di bank BPMN bisa dibuang, maka kinerjanya bisa lebih baik dan mampu menggerakkan sektor riil lebih cepat, sehingga bank pelat merah dapat menyumbang pemasukan beruntung dividen lebih besar kepada negara.* (BI-3/TU/6-07)
- (103) *Upaya penghapusan dan penyelesaian kredit macet di bank BUMN sebenarnya bisa mengandalkan PP No. 33/2006 yang mengatur tentang tata cara penyelesaian utang bermasalah atau penghapusan piutang BUMN.* (MI-3/E/6-07)
- (104) *Sumbangan ini berbau suap karena umumnya yang disumbang adalah wakil rakyat yang bertugas mengawasi kinerja Departemen Kelautan. Sumbangan ini berbau suap karena umumnya yang di-*

sumbang adalah wakil rakyat yang bertugas mengawasi kinerja Departemen Kelautan. (KT-3/E/6-07)

(105) *Apa pun argumennya, rekening gelap milik departemen harus dianggap sebagai kejahatan. (MI-2/E/6-07)*

Data pada contoh (101) menunjukkan frasa *rekening liar*. Makna *rekening* adalah ‘hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa)’. Makna *liar* adalah ‘tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang tanpa izin resmi dari yang berwenang; tidak memiliki izin usaha, mendirikan, atau membangun’. Di dalam konteks kalimat, makna *rekening liar* berubah. Ciri makna yang dimiliki oleh tiap kata tersebut membentuk makna baru yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Dengan demikian, frasa *rekening liar* dapat bermakna ‘hitungan pembayaran untuk negara, tetapi menjadi milik pribadi’.

Contoh (102) memperlihatkan kata benda atau nomina *borok* dan frasa *pelat merah*. Makna kiasan *borok* adalah ‘cacat’. Makna frasa *pelat merah* adalah ‘pelat nomor kendaraan yang berdasar merah sebagai tanda kendaraan pemerintah’. Di dalam konteks kalimat, makna *borok* tetap dan makna *pelat merah* berubah. Ciri makna yang dimiliki oleh frasa tersebut membentuk makna baru yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Dengan demikian, frasa *pelat merah* dapat bermakna ‘pemerintah’.

Data pada contoh (103) menunjukkan frasa *kredit macet*. Makna *kredit* adalah ‘cara menjual barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur); pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur; penambahan saldo rekening; sisa utang, modal, dan pendataan; pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain; sisi kanan neraca (di Indonesia)’. Makna *macet* adalah ‘terhenti, tidak lancar’. Di dalam konteks kalimat, makna *kredit macet* berubah. Ciri makna yang dimiliki oleh tiap kata tersebut membentuk makna baru yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Dengan demikian, frasa *kredit macet* dapat bermakna ‘pinjaman yang tidak dibayar, pinjaman yang terhenti pembayaran angsurannya’.

Contoh (104) memperlihatkan kata benda atau nomina *suap*. Makna kiasan *suap* adalah ‘uang sogok’. Di dalam konteks kalimat, makna *suap* tetap.

Data pada contoh (105) menunjukkan frasa *rekening gelap*. Makna *rekening* adalah ‘hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa)’. Makna *gelap* adalah ‘rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku. Di dalam konteks kalimat, makna *rekening gelap* berubah. Ciri makna yang dimiliki oleh tiap kata tersebut membentuk makna baru yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Dengan demikian, frasa *rekening gelap* dapat bermakna ‘hitungan pembayaran untuk negara, tetapi tidak dilaporkan ke negara’.

Contoh makna konotasi dalam majas personifikasi adalah sebagai berikut.

- (106) Saat melantik kabinetnya pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan salah satu programnya adalah memberantas korupsi yang begitu **merajalela**. (SP-3/TR/6-07)
- (107) Ekonomi berjalan **tertatih-tatih** karena industri pariwisata hanya **gigit jari** akibat sepihnya kunjungan wisatawan mancanegara yang takut menjadi korban pengeboman. (BI-4/TU/6-07)
- (108) Kedua, pemerintah harus serius **mengerem** laju konversi lahan. (ID-2/T/6-07)
- (109) Tahun ini tampak di permukaan, dan sebagian kita rasakan, perekonomian mulai **menggeliat**; bergerak meskipun pelan. (MI-1/E/6-07)
- (110) Pemerintah tengah menyiapkan paket ekonomi baru untuk **menggenjot** sektor riil yang **masih loyo**. (KT-1/E/6-07)

Data (106–110) memperlihatkan bahwa kata *merajalela*, *tertatih-tatih*, *gigit jari*, *mengerem*, *menggeliat*, dan *loyo* adalah kata atau frasa yang bersifat majasi. Di dalam konteks kalimat, kata atau frasa yang bersifat majasi menggambarkan benda mati seolah-olah mempunyai sifat dan tingkah laku seperti manusia yang dapat melakukan suatu perbuatan. Padahal, subjek atau objek dalam konteks kalimat itu bukan manusia. Namun, di dalam kalimat itu, deskripsi kiasan dilakukan dengan menggunakan sifat dan tingkah laku manusia. Benda mati yang dikiaskan dapat bertindak dan berbuat seperti manusia. Objek *korupsi* di dalam data (106) adalah tindakan penyelewengan atau penggelapan yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *merajalela*. Subjek *ekonomi* di dalam data (107) adalah tata kehidupan perekonomian yang dikiaskan

sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *tertatih-tatih*. Subjek *industri pariwisata* di dalam data (108) adalah usaha di bidang pariwisata yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *gigit jari*. Subjek *pemerintah* di dalam data (108) adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *mengerem*. Subjek perekonomian di dalam data (109) adalah tindakan berekonomi yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *menggeliat*. Subjek *pemerintah* di dalam data (110) adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *menggenjot*. Objek *sektor riil* di dalam data (110) adalah lingkungan suatu usaha yang nyata yang dikiaskan sebagai manusia yang *loyo*.

- (111) *Pemerintah perlu langkah drastis **memangkas** birokrasi pengurusan izin usaha.* (KT-1/E/6-07)
- (112) *Sungguh mahal harga yang harus dibayar bila perekonomian nasional kembali **terseok-seok** hanya karena kita tidak bisa menjaga rasa aman lantaran terus-menerus diganggu teroris.* (BI-4/TU/6-07)
- (113) *Dalam kondisi ekonomi yang cukup bagus saat ini, yang ditandai inflasi rendah, tren penurunan suku bunga, dan mulai **menggeliatnya** daya beli masyarakat adalah momen tepat untuk membangkitkan industri asuransi.* (ID-1/T/6-07)
- (114) *Ketika embargo itu dilakukan, kita ternyata tidak bisa berbuat banyak karena posisi Indonesia yang **lemah**.* (R-1/T/6-07)
- (115) *Kalau kali ini kedua partai mencoba **merajut** kembali aliansi taktis politik yang sempat robek tahun 2004, bisa diduga kesamaan kepentinganlah yang menyatukannya.* (BK-4/B/6-07)

Subjek *pemerintah* di dalam data (111) adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *memangkas*. Subjek perekonomian nasional di dalam data (112) adalah tindakan berekonomi secara nasional yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *terseok-seok*. Subjek kondisi ekonomi di dalam data (113) adalah tindakan keadaan tata kehidupan perekonomian yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *menggeliatnya*. Subjek posisi Indonesia di dalam data

(114) adalah kedudukan Indonesia yang dikiaskan sebagai manusia yang *lemah*. Subjek kedua partai di dalam data (115) adalah dua partai yang ada di Indonesia yang dikiaskan sebagai manusia yang dapat melakukan kegiatan *merajut*.

5.5 Makna Asosiatif

Makna asosiatif merupakan tautan dalam ingatan pada orang atau barang lain yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Asosiasi dipengaruhi unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Data dalam penelitian ini menunjukkan makna asosiatif. Contoh yang mengandung makna asosiatif adalah sebagai berikut.

(116) *Pemerintah mungkin lupa sekarang ini hampir semua komoditas sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, sesuatu yang sulit dikendalikan cuma dengan operasi pasar.* (R-2/T/6-07)

(117) **Pemerintah** mengeluarkan lagi paket kebijakan ekonomi baru. (MI-3/E/6-07)

(118) Kita berterima kasih karena sebuah perusahaan swasta dari jaringan bisnis Artha Graha telah mengikat kerja sama demonstrasi sebuah perusahaan perbenihan di China untuk membantu Indonesia menghasilkan benih padi hibrida di Tanah Air. (MI-4/E/6-07)

(119) *Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa pemerintah akan membagikan tanah ke rakyat.* (R-4/T/6-07)

(120) *Di era Orde Baru, negara ini pernah mencatat swasembada beras, tetapi sekarang kita menjadi importir rutin.* (MI-4/E/6-07)

Pada contoh (116–120) tampak kata-kata yang mengandung makna asosiatif. Makna denotatif *pasar* pada contoh (116) adalah ‘tempat orang berjual beli’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *pasar* juga mengandung makna asosiatif ‘tempat orang berjual beli yang kurang nyaman’, bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *pemerintah* pada contoh (117) adalah ‘badan tertinggi yang memerintah suatu negara’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *pemerintah* juga mengandung makna asosiatif ‘penyelenggara negara’, bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *tanah air* pada contoh (118) adalah ‘negeri tempat kelahiran’. Selain makna denotatif itu,

bagi sebagian orang Indonesia *tanah air* juga mengandung makna asosiatif ‘tanah kelahiran yang subur dan makmur’, bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *tanah* pada contoh (119) adalah ‘keadaan bumi di suatu tempat’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *tanah* juga mengandung makna asosiatif ‘tempat tinggal’, bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *era orde baru* pada contoh (120) adalah ‘masa pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *era orde baru* juga mengandung makna asosiatif ‘masa yang makmur dan aman’, bergantung pada pengalaman seseorang.

Contoh yang mengandung makna asosiatif adalah sebagai berikut.

- (121) *Interpelasi soal Resolusi DK PBB 1747 tentang nuklir Iran belum selesai, diikuti prakarsa sejumlah anggota DPR untuk mengajukan interpelasi soal lumpur Lapindo.* (K-1/TR/6-07)
- (122) *Riset biasanya hadir dan penting di negara yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.* (MI-4/E/6-07)
- (123) *Misalnya bagaimana menciptakan industri yang dapat melipatgandakan hasil pertanian, pengelolaan hasil hutan, hasil laut, dan berbagai macam hasil tambang.* (R-1/T/6-07)
- (124) *Lihat saja nasib lembaga riset yang ada di departemen maupun perguruan tinggi.* (MI-4/E/6-07)
- (125) *Permintaan itu diikuti dengan ancaman secara halus bahwa secara politik mereka yang tidak menunjukkan keberpihakan akan bisa tergusur dari kursinya.* (K-2/TR/6-07)

Contoh (121–125) memperlihatkan kata-kata yang mengandung makna asosiatif. Makna denotatif *lumpur Lapindo* pada contoh (121) adalah ‘tanah lunak dan berair di Lapindo’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *lumpur Lapindo* juga mengandung makna asosiatif ‘bencana alam’ atau ‘bencana nasional’; ‘membuat warga sekitar Lapindo menderita’. bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *teknologi* pada contoh (122) adalah ‘kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis; ilmu teknik’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *teknologi* juga mengandung makna asosiatif ‘serba canggih’, bergantung pada pengalam-

an seseorang. Makna denotatif *hutan* pada contoh (123) adalah ‘tanah yang luas ditumbuhi pohon-pohon’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *hutan* juga mengandung makna asosiatif ‘tambang emas’ atau ‘tempat yang sejuk dan menyenangkan’, bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *perguruan tinggi* pada contoh (124) adalah ‘tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *perguruan tinggi* juga mengandung makna asosiatif ‘perlu biaya besar untuk sekolah tinggi’, bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *kursi* pada contoh (125) adalah ‘tempat duduk yang berkaki dan bersandaran’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *kursi* juga mengandung makna asosiatif ‘kedudukan atau jabatan’, bergantung pada pengalaman seseorang.

Berikut ini adalah contoh yang mengandung makna asosiatif.

- (126) *Belum lagi sektor pertanian, di mana sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor itu, sama sekali tidak disinggung dalam kebijakan ini. (R-4/T/6-07)*
- (127) *Kita tidak boleh terlena dengan julukan negara kaya dan demokrasi yang berkembang pesat. (K-2/TR/6-07)*
- (128) *Ini kabar baru yang mengagetkan: Pemerintah mengkaji kemungkinan mencabut subsidi untuk bensin jenis premium. (B1-1/TU/6-07)*
- (129) *Pemahaman inilah yang selalu harus terus didengungkan agar kita tidak sekadar menikmati kebebasannya saja dari sistem demokrasi yang kita terapkan. (K-2/TR/6-07)*
- (130) *Seharusnya kita merasa bangga memiliki berjuta hektar lahan sangat subur dan petani-petani andal yang bisa mengolah lahan gersang menjadi lahan produktif, terutama jika ada jaringan irigasi yang bisa mengairi kebun, sawah, dan berbagai tanaman pangan. (SP-2/TR II/6-07)*

Pada contoh (126–130) tampak kata-kata yang mengandung makna asosiatif. Makna denotatif *pertanian* pada contoh (126) adalah ‘perihal bertani; segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah)’. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *pertanian* juga mengandung makna asosiatif ‘tanaman’, ‘sumber

kehidupan', 'berkebun', dan 'bercocok tanam', bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *negara* pada contoh (127) adalah 'organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat'. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *negara* juga mengandung makna asosiatif 'kesatuan', bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *premium* pada contoh (128) adalah 'jenis bensin'. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *premium* juga mengandung makna asosiatif 'bensin yang termurah', bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *demokrasi* pada contoh (129) adalah 'pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara'. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *demokrasi* juga mengandung makna asosiatif 'kebebasan', bergantung pada pengalaman seseorang. Makna denotatif *petani-petani* pada contoh (130) adalah 'orang-orang yang pekerjaannya bercocok tanam'. Selain makna denotatif itu, bagi sebagian orang Indonesia *petani-petani* juga mengandung makna asosiatif 'pengolah sawah', bergantung pada pengalaman seseorang.

5.6 Makna Afektif/Emotif

Makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat positif atau negatif. Kata *baik*, *ramah*, dan *sopan* menimbulkan makna afektif yang positif, sedangkan *koruptor* dan *penjahat* menimbulkan makna afektif yang negatif. Data dalam penelitian ini memperlihatkan makna afektif atau emotif. Berikut ini adalah contohnya.

- (131) *Kita tampaknya akan tetap sulit membawa pulang para koruptor dan uang yang mereka bawa lari. (R-3/T/6-07)*
- (132) *Permufakatan itu pun haruslah dipandang sebagai upaya menghambat pemberantasan korupsi secara legal dan sistematis. (M1-1/E/6-07)*
- (133) *Sebab, kita pun menjunjung prinsip serta urutan preferensi bahwa yang merupakan komitmen tertinggi adalah kepentingan rakyat banyak, kesejahteraan rakyat banyak. (K-1/TR/6-07)*
- (134) *Padahal, rekening liar itu semuanya milik departemen atau lembaga di bawah departemen. (M1-2/E/6-07)*

- (135) Kita, warga, harus ikut **berkontribusi** dengan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita bersama. (K-3/TR/6-07)

Kelima contoh (131–135) memperlihatkan adanya makna afektif atau emotif. Contoh itu dicetak tebal. Kata *koruptor* pada contoh (131), *korupsi* pada contoh (132), *rekening liar* (134) menimbulkan makna afektif yang negatif. Kata *kepentingan rakyat banyak* pada contoh (133) dan *berkontribusi* pada contoh (135) menimbulkan makna afektif yang positif.

Contoh berikut menunjukkan adanya makna afektif.

- (136) **Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, rasa frustrasi** sangat mudah untuk membuat seseorang kemudian terjebak dalam cara berpikir yang ekstrem. (K-5/TR/6-07)
- (137) Keduanya bersinergi memacu produktivitas nasional hingga tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang **memadai**. (SP-4/TR 1/6-07)
- (138) Hampir di semua negara, termasuk Inggris dan bahkan Amerika Serikat, **para pelaku teror** berbaur di tengah masyarakat umum sehingga semakin tidak mudah untuk dideteksi. (K-5/TR/6-07)
- (139) Kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan dengan PP, maka tidak heran bila para penegak hukum dan lembaga peradilan lebih berpedoman pada KUH Perdata dalam menangani **kredit macet** bank BUMN. (BI-3/TU/6-07)
- (140) Akan tetapi, perbankan tetap saja mematok **bunga tinggi** pada kredit investasi, khususnya kepada sektor kecil dan menengah. (MI-3/E/6-07)

Pada contoh (136–140) tampak kata yang menimbulkan makna afektif atau emotif. Kata tersebut dicetak tebal. Kata *ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, dan rasa frustrasi* pada contoh (136), *para pelaku teror* pada contoh (138), *kredit macet* pada contoh (139), dan *bunga tinggi* (140) menimbulkan makna afektif yang negatif. Kata *memadai* pada contoh (137) menimbulkan makna afektif yang positif.

- (141) Dukungan terhadap upaya polisi haruslah kita lakukan secara penuh sebab **kejahatan** yang satu ini berbeda dengan kejahatan biasa. (K-5/TR/6-07)
- (142) Untuk itu, kita menuntut pemerintah harus punya keseriusan untuk memperbaiki diri, yakni mampu melaksanakan semua ke-

bijakan itu secara konsekuen dan bertanggung jawab. (SP-4/TR 1/6-07)

- (143) *Selama ini, API di bidang asuransi masih sebatas wacana, sementara API di bidang perbankan sudah berjalan dengan baik.* (DI-1/T/6-07)
- (144) *Semua itu adalah tuntutan atas kesadaran bersama bahwa negeri ini tidak boleh lagi menjadi milik orang-orang berkuasa, elit pemerintah, dan partai politik.* (BK-3/B/7-07)
- (145) *Sepanjang peradaban manusia, sudah terlalu banyak contoh nyata akan kehancuran suatu bangsa yang dipicu oleh fitnah, hasutan, dan aneka pernyataan yang dilontarkan tanpa dasar dan bukti.* (BK-4/B/7-07)

Contoh (141–145) menunjukkan adanya makna afektif atau emotif. Contoh itu dicetak tebal. Kata *kejahatan* pada contoh (141), *orang-orang berkuasa* pada contoh (144), dan *fitnah* serta *hasutan* pada contoh (145) menimbulkan makna afektif yang negatif. Kata *bertanggung jawab* pada contoh (142) dan *baik* pada contoh (143) menimbulkan makna afektif yang positif.

BAB VI

PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK DARI SURAT KABAR IBU KOTA

6.1 Kelas Kata yang Dominan

Frekuensi kosakata berdasarkan kelas kata yang dominan adalah nomina, seperti pada Tabel 3, yaitu 46,4%. Kelas kata nomina dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kelas kata ini sering berpadanan dengan orang, benda, atau hal lain yang dibendakan dalam alam di luar bahasa.

Data dalam penelitian ini memperlihatkan adanya kosakata yang mempunyai kelas kata nomina, antara lain, *tabungan, asuransi, dana, modal, pasar modal, hukum, teroris, terorisme, swasembada, pangan, kemiskinan, pengangguran, korupsi, pejabat, publik, negara, rekening, ekonomi, debitor, pemerintah, presiden, bank, agenda, uang, lokal, izin, administrasi, subsidi, harga, lingkungan, pinjaman, penyidikan, partai, koalisi, dan wartawan.*

Pembentukan opini publik dilihat dari frekuensi kelas kata, seperti kata *asuransi, rekening, bank, dana, partai, dan koalisi* termasuk kelas kata nomina yang mempunyai citraan yang identik dengan bidang ekonomi dan politik.

6.2 Makna Kata dalam Konteks

Yang dimaksud konteks dalam penelitian ini adalah ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada wacana. Contoh makna dalam konteks adalah sebagai berikut.

- (146) *Tabungan jangka panjang dan proteksi **asuransi** bagi masyarakat untuk dana pensiun harus digalakkan dan tabungan asuransi harus dilindungi.* (ID-1/T/6-07)
- (147) *Meski Jakarta kerap dituduh terlalu mengikuti agenda pemberantasan terorisme yang didengungkan Gedung Putih, bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak memiliki kemampuan menumpas aksi **teroris** dengan caranya sendiri.* (BI-4/TU/6-07)
- (148) *Kendati demikian, jalan menuju **swasembada** pangan tetap terbentang luas.* (ID-2/T/6-07)
- (149) *Para **penegak hukum** pun sering rancu dalam menafsirkan kekayaan negara dengan modal bank BUMN, sehingga saat menggiring masalah itu dengan memakai UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal.* (BI-3/TU/6-07)
- (150) *Untuk menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memangkas angka kemiskinan dan pengangguran, **pemerintah** mestinya memberikan arahan, bukan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.* (ID-3/T/6-07)

Kata *asuransi* yang berfungsi sebagai subjek pada contoh (146) bermakna ‘pertanggungan’. Makna *asuransi* dalam konteks adalah perlu adanya perlindungan terhadap asuransi sehingga industri asuransi dapat tumbuh sehat dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi meningkat. Kata *teroris* yang berfungsi sebagai objek pada contoh (147) bermakna ‘orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik’. Makna *teroris* dalam konteks adalah para pelaku aksi yang harus ditindak secara hukum.

Kata *swasembada* yang berfungsi sebagai objek pada contoh (148) bermakna ‘usaha mencukupi kebutuhan sendiri’. Makna *swasembada* dalam konteks adalah usaha mencukupi kebutuhan sendiri akan berhasil jika ada bibit berkualitas dan perbaikan jaringan irigasi. Kata *penegak hukum* yang berfungsi sebagai subjek pada contoh (149) bermakna ‘petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan’. Makna *penegak hukum* dalam konteks adalah petugas belum dapat menafsirkan kekayaan negara dengan modal bank BUMN sehingga perlu ditata ulang aturan yang mendasarinya.

Kata *pemerintah* yang berfungsi sebagai subjek pada contoh (150) bermakna ‘badan tertinggi yang memerintah suatu negara’. Makna

pemerintah dalam konteks adalah penyelenggara negara sebaiknya memberikan kebijakan.

Berikut ini adalah contoh makna dalam konteks.

- (151) *Pasal 18 RUU yang disiapkan tim dari Departemen Hukum dan HAM tersebut menyebutkan **penyidikan**, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik tidak lagi memerlukan surat izin presiden. (MI-1/E/6-07)*
- (152) *Aneh karena dalam sebuah negara yang memiliki sistem administrasi yang (seharusnya) tertib, yang mengagung-agungkan transparansi dan akuntabilitas, terdapat 1.303 **rekening** liar. (MI-2/E/6-07)*
- (153) *Dengan menanamkan dana di instrumen yang tepat di pasar modal, **keuntungan** yang diraih bisa di atas 20% setahun. (ID-4/T/6-07)*
- (154) *Sebab, tanpa kucuran modal baru dari swasta lokal dan asing, sulit berharap **ekonomi** Indonesia bergerak lebih cepat. (KT-2/E/6-07)*
- (155) *Sangatlah ironis jika perang terhadap korupsi yang dikatakan semakin gencar dan tidak pandang bulu ternyata dipatahkan fakta bahwa jumlah **uang negara** yang disimpan pemerintah di rekening gelap bertambah delapan kali lipat. (MI-2/E/6-07)*

Kata *penyidikan* yang berfungsi sebagai objek pada contoh (151) bermakna 'serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku untuk pidana'. Makna *penyidikan* dalam konteks adalah tindakan penyidik terhadap pejabat tanpa surat izin presiden sehingga tidak menghambat pemberantasan korupsi. Kata *rekening* pada contoh (152) bermakna 'hitungan pembayaran'. Makna *rekening* dalam konteks adalah hitungan pembayaran untuk negara, tetapi menjadi milik pribadi. Kata *keuntungan* yang berfungsi sebagai subjek pada contoh (153) bermakna 'hal mendapat untung atau laba'. Makna *keuntungan* dalam konteks adalah laba *di atas 20% setahun* dari dana di pasar modal. Kata *ekonomi* pada contoh (154) bermakna 'tata kehidupan perekonomian (suatu negara)'. Makna *ekonomi* dalam konteks adalah tata kehidupan perekonomian Indonesia yang perlu modal untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Kata *uang negara* yang berfungsi sebagai subjek pada contoh (155) bermakna 'harta pemerintah'. Makna *uang negara* dalam

konteks adalah kekayaan pemerintah yang tidak dilaporkan ke negara bertambah jumlahnya.

Contoh makna dalam konteks adalah sebagai berikut.

- (156) *Pengusutan penting dilakukan karena **wartawan** adalah profesi yang berbasis pada kepercayaan publik.* (KT-3/E/6-07)
- (157) *Ada juga **debitor** yang berhasil mendapatkan pinjaman dari bank luar negeri dengan tingkat bunga 6-7%.* (ID-5/T/6-07)
- (158) *Ketika kenaikan harga akibat pencabutan **subsidi** benar-benar jalan, kerugian ekonomi jauh lebih besar ketimbang asumsi-asumsi yang sudah diperhitungkan.* (BI-1/TU/6-07)
- (159) *Namun, secara umum ketimpangan kesejahteraan antara **negara** kaya dan miskin semakin lebar, kerusakan lingkungan kian menjadi-jadi, begitu pula penyebaran wabah penyakit.* (BI-2/TU/6-07)
- (160) *Pemerintah pusat sampai sekarang belum menganggap pemda yang menyimpan **dana** APBN dalam SBI sebagai penyimpangan serius.* (MI-2/E/6-07)

Kata *wartawan* yang berfungsi sebagai subjek pada contoh (156) bermakna 'orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Makna *wartawan* dalam konteks adalah jurnalis yang perlu diusut karena berkaitan dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri. Kata *debitor* pada contoh (157) bermakna 'orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain'. Makna *debitor* dalam konteks adalah orang yang mendapat pinjaman dari luar negeri. Kata *subsidi* pada contoh (158) bermakna 'bantuan uang kepada yayasan atau perkumpulan dari pihak pemerintah'. Makna *subsidi* dalam konteks adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang ditiadakan sehingga kerugian ekonomi lebih besar'. Kata *negara* pada contoh (159) bermakna 'organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat'. Makna *negara* dalam konteks adalah negara yang pendapatan per kapita lebih tinggi dan sangat rendah. Kata *dana* yang berfungsi sebagai objek pada contoh (160) bermakna 'uang yang disediakan untuk suatu keperluan'. Makna *dana* dalam konteks adalah penyediaan uang yang disimpan dalam SBI.

BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan

Perkembangan kosakata bahasa Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Dari segi frekuensi kosakata dominan dalam surat kabar ibu kota memperlihatkan tingginya frekuensi pemakaian kata gramatikal yang sebanyak 596. Hal ini sesuai dengan perhitungan kosakata yang dilakukan oleh Le Prevost (1852), Hardjadibrata (1969), dan Muhadjir *et al.* (1996). Le Prevost (1852) berhasil menerbitkan kosakata bahasa Melayu (Malaysia) untuk kepentingan pengajaran yang cepat dan efisien. Kosakata tersebut memperlihatkan tingginya frekuensi pemakaian kata gramatikal yang sebanyak 15.737. Berbeda dengan Le Prevost, Hardjadibrata (1969) menghitung frekuensi kosakata berdasarkan majalah dan koran pada tahun 1969. Kosakata itu menunjukkan tingginya frekuensi pemakaian kata gramatikal yang sebanyak 48.079. Muhadjir *et al.* (1996) dalam penelitiannya menghitung frekuensi kemunculan kata dengan sumber data surat kabar *Kompas* tahun 1994. Data itu memperlihatkan tingginya frekuensi pemakaian kata gramatikal yang sebanyak 66.872. Berdasarkan hasil penelitian 155 tahun yang lalu (1852–2007), 38 tahun yang lalu (1969–2007), 11 tahun yang lalu (1996–2007), dan sekarang (2007), pemakaian kata yang menempati urutan pertama dari keempat penelitian tersebut.

Penelitian ini memperlihatkan pemakaian kelas kata nomina, verba, adjektiva, adverbial, partikel, pronominal kata tugas, dan numeralia. Frekuensi kosakata berdasarkan kelas kata yang dominan adalah nomina (46,4%).

Berdasarkan jenis kalimat, ditemukan 3 jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif atau berita, kalimat interogatif atau tanya, dan kalimat imperatif atau perintah. Frekuensi jenis kalimat yang dominan adalah kalimat deklaratif atau berita (97,4%). Jenis kalimat deklaratif atau berita dalam surat kabar ibu kota dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik sudah tepat karena isi kalimat mengandung makna yang menyatakan atau memberitahukan sesuatu.

Pemakaian diksi atau pilihan kata yang terdapat dalam surat kabar ibu kota ditinjau dari segi kelayakan stilistik, ragam formal lebih dominan daripada ragam takformal dan unsur bahasa asing. Hal ini sesuai dengan data yang berupa tajuk rencana atau editorial yang menggunakan bahasa Indonesia ragam tinggi. Bahasa Indonesia ragam tinggi digunakan dalam situasi resmi.

Berdasarkan pemakaian kata yang tepat dan cermat, penelitian ini cenderung diwarnai oleh pemakaian kata yang denotatif (harfiah) diikuti oleh pemakaian atau pemilihan kata konotatif (tidak harfiah, pada umumnya makna konotatif lebih banyak dijumpai dalam bentuk kiasan atau majas), hiponimi dalam pilihan kata, makna asosiatif, dan makna afektif atau emotif. Dalam data penelitian ini pemakaian kata denotatif memperlihatkan kekerapan tertinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor situasional, yang antara lain tampak melalui dominasi topik dalam rajuk rencana atau editorial yang cenderung resmi, jarak sosial antara penulis dan pembaca yang resmi.

Pembentukan Opini publik dilihat dari frekuensi kelas kata nomina yang mempunyai citraan yang identik dengan bidang ekonomi dan politik. Makna kata dalam konteks adalah ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada wacana.

7.2 Saran

Masalah kosakata dalam kaitannya dengan pembentukan opini publik yang dibahas dalam penelitian ini hanya bagian-bagian kecil dalam tataran leksikal. Jelasnya, tataran morfologi belum diteliti. Aspek semantik yang lain pun belum diteliti, misalnya kolokasi.

Data atau temuan penelitian yang ditinjau dari aspek semantik sangat diperlukan untuk penyusunan tata bahasa bahasa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, seyogianya pada penelitian berikutnya dilakukan penelitian tentang aspek morfologi, kolokasi, atau unsur-unsur lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, *et al.* 1992. *Seri Penyuluhan 3: Bentuk dan Pilihan Kata*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1996. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- , dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, E. Zaenal dan S. Amran Tasai. 1998. *Cermat Berbahasa Indonesia: untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Bloomfield, L. 1939. *Language in Contact: Finding and Problems*. The Hague: Mouton.
- Chaer, Abdul. 1990. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Rineka Cipta.
- Darmojuwono, Setiawati. 2005. "Semantik" dalam *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Kushartanti *et al.* (Penyunting). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1994. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: Eresco.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1990. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Keraf, Gorys. 1981. *Diksi dan Gaya Bahasa: Komposisi Lanjutan I*. Ende: Nusa Indah.
- Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- , 1986. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kurniawati, Wati. 1992. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lirik Lagu Kanak-Kanak" dalam *Bahasa dan Sastra*. Tahun IX Nomor 5 1992. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1998. "Diksi dalam Brosur Pariwisata". Makalah Seminar Nasional Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) VII di Semarang.
- Leech, Geoffrey. 1981. *Semantics*. Cambridge University Press. Harmondswort: Penguin Books.
- Lumintintang, Yayah B. *et al.* 1998. *Bahasa Indonesia Ragam Lisan Fungsional: Bentuk dan Pilihan Kata*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Luxemburg, Jan van, *et al.* 1984. *Pengantar Ilmu Sastra. Diindonesiakan oleh Dick Hartoko*. Jakarta: Gramedia.
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Jilid 1. Cambridge University Press.
- , 1996. *Linguistics Semantics*. Cambridge University Press.
- Mackey, William F. 1968; 1970. "The Description of Bilingualism" dalam J.A. Fishman. Editor. *Reading in Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- , 1989. *Kembara Bahasa*. C. Ruddyanto (Penyunting). Jakarta: Gramedia.
- Muhadjir *et al.* 1996. *Frekuensi Kosakata Bahasa Indonesia*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Nababan, P.W.J. 1984. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, S. 1987. *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nida, Eugene A. 1975. *Componential Analysis of Meaning: Introduction to Semantic Structure*. The Hague: Mouton.
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia. 2002. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Cetakan ke-4. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Pateda, Mansoer. 1987. *Sosiolinguistik*. Bandung: Angkasa.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pusat Bahasa. 1995/1996. *Pedoman Pengindonesiaan Nama da Kata Asing*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ramlan, M. 1980. *Kata Depan atau Preposisi dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: UP Karyono.
- Rusyana, Yus. 1984. *Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan*. Bandung: Diponegoro.
- Saeed, John I. 2000. *Semantics*. Massachusetts: Blackwell.
- Samarin, William, J. 1966. *Field Linguistic: A Guide Linguistic Field Work*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Simatupang, M.D.S. 1979. *Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sudaryanto. 1986. *Metode Linguistik I: ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudjiman, Panuti. 1984. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Sugono, Dendy. 1991. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Priastu.
- Suwito. 1983. *Pengantar Awal Sosiolinguistik: Teori dan Problema*. Edisi Kedua. Surakarta: Henry Offset.
- Turner, G.W. 1975. *Stylistics*. Harmondswort: Penguin Books.
- Verhaar, J.W.M. 2001. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Weinreich, Uriel. 1970. *Language in Contact: Finding and Problems*. The Hague: Mouton.
- Wray, Alison et al. 1998. *Project in Linguistics a Practical Guide to Researching Language*. London: Arnorld.

Lampiran 1

**PERINGKAT KORAN YANG MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA
DALAM RANGKA BULAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2006**

No.	Kode	Surat Kabar	Rata-Rata
1.	11	<i>Media Indonesia</i>	77,54
2.	10	<i>Koran Tempo</i>	76,96
3.	09	<i>Kompas</i>	76,90
4.	26	<i>Bisnis Indonesia</i>	74,92
5.	20	<i>Jawa Pos</i>	72,66
6.	27	<i>Investor Daily</i>	72,64
7.	13	<i>Suara Pembaruan</i>	72,46
8.	12	<i>Republika</i>	72,24
9.	28	<i>Berita Kota</i>	71,90
10.	03	<i>Haluan</i>	71,86

Lampiran 2

Media Indonesia

Senin, 11 Juni 2007, Editorial

Hapuskan Izin Presiden



KONSTITUSI menjamin warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Tapi, praktik yang terjadi selama ini pemeriksaan penyelenggara negara yang diduga terlibat tindak pidana korupsi harus seizin presiden.

Ketentuan tentang izin presiden itu tertuang dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Lembaga perizinan itu, sadar atau tidak, menyimpan celah masuknya politisasi dan intervensi. Tudingan bahwa telah terjadi tebang pilih dalam pemberantasan korupsi sulit ditampik. Seorang presiden bisa saja tidak memberikan izin pemeriksaan karena pejabat negara yang diduga terlibat dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi berasal dari partai yang sama atau memiliki afiliasi politik yang sama.

Menurut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, hingga awal Juni 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui pemeriksaan 105 kepala daerah. Sudi mengaku permohonan polisi atau jaksa kepada Presiden masih menumpuk. Banyak di antara permohonan itu yang sulit dikabulkan. Dalam hal kasus yang sulit dipastikan kerugian negara, siapa yang diuntungkan, dan kesalahan hanya soal administrasi serta prosedur, misalnya, Presiden sulit mengabulkan.

Di situlah pokok persoalannya. Mestinya hanya pengadilan yang bisa menentukan apakah seseorang telah merugikan keuangan negara. Apakah kesalahan seseorang hanya soal administrasi dan prosedur mestinya lembaga peradilan yang memutuskan, bukan presiden, karena itulah hakikat negara hukum.

Karena itu, kewenangan presiden memberi izin pemeriksaan kepada para penyelenggara negara harus dicabut. Lembaga perizinan itu sama sekali tidak membantu tekad bangsa ini memberantas korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Harus dicegah, lembaga perizinan itu menjelma menjadi bentuk kolusi baru. Aparat penyidik cukup memberitahukan presiden jika memeriksa seorang penyelenggara negara. Bukan minta izin.

Lembaga perizinan sering pula dipakai sebagai alat politik untuk menjegal seseorang menjadi calon kepala daerah. Permohonan izin disampaikan menjelang pemilihan kepala daerah atau presiden baru mengeluarkan izin pemeriksaan justru menjelang pemilihan kepala daerah. Lembaga perizinan pun berpotensi masuk agenda politik sehingga harus segera dihapus.

Penghapusan lembaga perizinan itu harus dibarengi demonstrasi peningkatan profesionalitas penyidik. Kerap pula terjadi, misalnya, izin dari presiden dijadikan alasan untuk memperlambat proses penyidikan. Padahal, di balik keterlambatan itu, penyidik menjadikan terperiiksa sebagai sumber rezeki ilegal.

Sangat jelas, lembaga perizinan itu telah menempatkan segala warga negara tidak bersamaan kedudukannya di depan hukum. Seakan-akan para penyelenggara negara menjadi warga negara kelas satu sehingga pemeriksaan mereka harus seizin presiden. Sebaliknya mereka yang bukan penyelenggara negara menjadi warga negara kelas dua, kapan pun bisa diperiksa.

Undang-undang yang mengatur lembaga perizinan itu dibuat bersama oleh eksekutif dan legislatif. Sangat terang-benderang ada persekongkolan di balik persetujuan pasal-pasal tersebut. Permufakatan itu pun haruslah dipandang sebagai upaya menghambat pemberantasan korupsi secara legal dan sistematis. Tidaklah mengherankan, berdasarkan hasil survei, lembaga eksekutif dan legislatif menempati peringkat atas dalam hal korupsi.

Kita mendorong pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 RUU yang disiapkan tim dari Departemen Hukum dan HAM tersebut menyebutkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik tidak lagi memerlukan surat izin presiden.

Izin presiden tidak hanya menghambat pemberantasan korupsi, tapi sudah mengingkari hakikat Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

Selasa, 12 Juni 2007

Negara demonstrasi 1.000 Rekening Liar



SUNGGUH aneh, tapi juga sungguh nyata. Aneh karena dalam sebuah negara yang memiliki sistem administrasi yang (seharusnya) tertib, yang mengagung-agungkan transparansi dan akuntabilitas, terdapat 1.303 rekening liar. Dan, sungguh nyata karena rekening liar itu ada sejak era Pak Harto dan terus ada sampai sekarang. Bahkan jumlah uangnya bertambah sekarang ini, jika dibandingkan dengan pada 2001.

Aneh, tapi nyata. Perang korupsi yang dideklarasikan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di bawah pimpinannya belum bisa menertibkan rekening liar. Padahal, rekening liar itu semuanya milik departemen atau lembaga di bawah departemen.

Pada 2001, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan Rp1,8 triliun uang negara yang disimpan di rekening liar. Setelah ditertibkan, sampai sekarang yang belum disetor ke kas negara masih sekitar Rp300 miliar.

Bila temuan BPKP adalah seluruh rekening liar pemerintah pada waktu itu (2001), temuan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan memperlihatkan peningkatan, paling tidak dalam soal jumlah uang yang disimpan di rekening-rekening gelap. Jumlahnya delapan kali lebih besar daripada posisi 2001.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang belum dipublikasikan, saat ini terdapat Rp8,5 triliun uang negara yang bersembunyi atau disembunyikan di 1.303 rekening liar. Tercatat 35 kementerian memiliki rekening gelap yang tersebar di sejumlah bank.

Sangatlah ironis jika perang terhadap korupsi yang dikatakan semakin gencar dan tidak pandang bulu ternyata dipatahkan fakta bahwa jumlah uang negara yang disimpan pemerintah di rekening gelap bertambah delapan kali lipat. Kalau jumlahnya meningkat demikian signifikan, tentu itu bukan lagi rekening liar per departemen. Melainkan rekening liar yang diketahui bersama dan bisa dijinakkan secara kolektif. Itu seharusnya bisa dianggap sebagai korupsi kolektif pemerintah terhadap uang rakyat.

Kalau pemerintah saja tidak transparan, bagaimana mendidik atau mengajak masyarakat, pembayar pajak misalnya, jujur melapor dan membayar sesuai dengan angka yang seharusnya? Bila pemerintah memiliki ribuan rekening gelap, pembayar pajak tidak merasa bersalah ketika memiliki pembukuan ganda. Satu yang sah, satu yang liar.

Tatkala uang negara yang disimpan di rekening liar meningkat demonstrasi amat pesat, dan diketahui, pertanyaannya, seriuskah negara memerangi korupsi? Apakah rekening liar itu sekadar penyimpangan administratif atau kejahatan? Kalau dianggap penyimpangan administratif, siapa yang harus menertibkan? Bila kejahatan, siapa yang harus melapor dan siapa yang harus mengusut?

Undang-Undang No 20/1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak demonstrasi jelas memerintahkan seluruh uang negara harus disetorkan ke kas negara dan digunakan melalui mekanisme APBN. Demonstrasi undang-undang itu sesungguhnya jelas tidak ada uang negara yang disimpan di rekening-rekening liar.

Apa pun argumennya, rekening gelap milik departemen harus dianggap sebagai kejahatan. Ia mengandung niat penggelapan sejak dibuka. Pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus berani memecat menteri atau pejabat departemen yang masih memiliki dan mengelola rekening-rekening liar itu.

Kalau memberantas rekening liar di departemen saja tidak mampu, bagaimana mengejar kekayaan konglomerat yang sudah dilarikan ke luar negeri? Itulah ironi Indonesia. Kutu di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tidak.

Rabu, 13 Juni 2007

Paket Ekonomi yang Miskin Implementasi

PEMERINTAH mengeluarkan lagi paket kebijakan ekonomi baru. Itu paket ekonomi keempat dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang semuanya diarahkan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil. Tiga paket sebelumnya mengatur investasi, keuangan, dan infrastruktur.

Paket terbaru yang diumumkan kemarin melalui Inpres No 6/2007 bertajuk Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bila belajar dari pengalaman tiga paket ekonomi sebelumnya yang tidak berhasil sepenuhnya, untuk tidak mengatakan gagal, yang harus menjadi perhatian paket kali ini adalah bagaimana implementasinya. Sebagaimana paket-paket ekonomi sebelumnya, semuanya bagus dalam soal keinginan dan tujuan. Tetapi pada umumnya macet dalam implementasi.

Di bidang investasi, misalnya, tidak terlihat peningkatan signifikan, terutama investasi asing sampai demonstrasi hari ini. Di bidang infrastruktur, target-target ambisius pemerintah membangun 90 proyek, yang terealisasi tidak lebih dari 10. Yang lain mandek karena berbagai soal seperti koordinasi antarsektor yang belum beres.

Di bidang keuangan, kita masih menghadapi paradoks lama. Yaitu uang berlebihan di lingkungan perbankan, sementara sektor riil dan UMKM tidak tumbuh karena kesulitan modal untuk membiayai investasinya. Suku bunga patokan Bank Indonesia atau SBI terus menurun hingga 8,75% saat ini. Akan tetapi, perbankan tetap saja mematok bunga tinggi pada kredit investasi, khususnya kepada sektor kecil dan menengah.

Yang lebih mengherankan lagi, APBN yang seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan malah dipergunakan daerah untuk membeli SBI. Pemerintah pusat sampai sekarang belum menganggap pemda yang menyimpan dana APBN dalam SBI sebagai penyimpangan serius.

Bagaimana nasib paket ekonomi keempat ini? Tanpa perubahan dan komitmen serius dan menyeluruh di dalam badan dan otoritas pemerintahan, kita khawatir nasib paket ini akan sama demonstrasi tiga paket sebelumnya. Yaitu terganjal dan gagal karena miskin implementasi.

Pemerintah sekarang lebih cenderung menyebut paket ekonomi untuk memperlihatkan sebuah keberanian kebijakan. Dahulu kebijakan-kebijakan yang sifatnya berani dan menyeluruh disebut demonstrasi deregulasi. Deregulasi memerangi birokratisasi, paket memerangi disorganisasi.

Namun, kedua nama ini, deregulasi dan paket, membutuhkan satu hal utama, yaitu keterpaduan dalam implementasi. Tanpa implementasi yang padu dan konsisten, itu dapat dipastikan akan gagal.

Sebuah paket atau deregulasi pada hakikatnya membutuhkan regulasi-regulasi baru. Bila melihat paket sekarang yang jangka waktunya hingga 2008, implementasi menjadi amat serius dan krusial.

Mengapa tidak? Karena sektor yang disentuh sebenarnya itu-itu lagi. Yakni investasi, keuangan, dan infrastruktur, ditambah UMKM. Untuk bisa berjalan, paket ini memerlukan 141 tindakan yang melibatkan 19 instansi.

Bukan pekerjaan gampang, tentu, menyelesaikan 141 tindakan dalam tempo satu tahun. Karena tindakan-tindakan itu sebagian mungkin tidak memerlukan proses yang berbelit karena menjadi wewenang instansi. Akan tetapi, banyak juga yang harus ditempuh demonstrasi mengubah undang-undang, yang berarti berurusan demonstrasi DPR, termasuk menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan kebijakan tersebut.

Sebuah paket atau deregulasi pasti tidak menyenangkan semua orang. Kendati demikian, nasib sebuah paket tetap ditentukan seberapa besar pemerintah teguh dan konsisten dalam menjaga implementasinya. Paket yang miskin implementasi akan menggerogoti wibawa kebijakan

Kamis, 14 Juni 2007

Ingin Swasembada? Belajarlah dari China



KUNJUNGAN Wakil Presiden Jusuf Kalla ke China, pekan lalu, selain menyepakati sejumlah hal, menggugat kembali sebuah keharusan tentang swasembada beras. Perkara yang di Indonesia menjadi ironi besar. Ironis karena Indonesia adalah negara agraris dengan luas lahan yang masih mencukupi, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi di dalam negeri. Di era Orde Baru, negara ini pernah mencatat swasembada beras, tetapi sekarang kita menjadi importir rutin. Tidak hanya beras. Garam dan cabai pun masih dibeli dari luar negeri.

Berbeda jauh demonstrasi China. Negara demonstrasi penduduk 1,3 miliar ini—enam kali lebih banyak daripada penduduk Indonesia—tidak menghadapi persoalan pangan karena produksi di dalam negeri mencukupi. Padahal, mereka bisa saja mengimpor karena memiliki cadangan devisa yang melimpah.

Boleh saja kita berdebat soal sistem kenegaraan yang menyebabkan rakyat China dipaksa untuk menanam padi atau bahan pangan lain. Tetapi, terlepas dari dipaksa atau tidak, mereka memiliki sistem budi daya yang bagus dan karena itu, menuai hasil yang bagus pula.

China sekarang muncul sebagai produsen padi hibrida terbesar di dunia. Posisi prestisius itu tidak turun dari langit begitu saja. Itulah sebuah posisi yang sengaja dirancang dengan sadar dan konsisten disertai komitmen tidak setengah-setengah.

Padi hibrida, apalagi varietas unggul, tidak lahir dari kultur budi daya yang malas. Tidak lahir dari komitmen dan kemauan politik setengah-setengah. Hibrida lahir dari sebuah sikap yang sangat konsisten di bidang riset dan pengembangan.

Itulah yang harus kita pelajari dari China. Indonesia tidak memiliki kultur riset yang baik dan benar. Tidak di perguruan tinggi, apalagi di pemerintahan. Kita hanya mengagumi sukses orang lain dan kemudian bekerja keras untuk mengimpor.

Kultur riset tentu tidak tumbuh begitu saja. Riset biasanya hadir dan penting di negara yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus disadari industri-industri yang lestari di masa depan, termasuk sektor pertanian, adalah industri yang dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penghargaan terhadap riset diperlihatkan pada alokasi anggaran negara untuk itu. Bila China memasukkan riset sebagai salah satu prioritas anggaran, Indonesia menempatkannya pada posisi tidak penting. Lihat saja nasib lembaga riset yang ada di departemen maupun perguruan tinggi. Yang lebih celaka lagi, dunia pendidikan di Indonesia tidak dibangun dalam kultur riset.

Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produksi padi di Indonesia adalah kadar keasaman lahan yang sangat tinggi akibat pemakaian pupuk urea yang lama. Kalau riset kita betul dan kultur pengetahuan benar, seharusnya segera menggantikan urea dengan pupuk alam atau kompos. Tetapi apa yang terjadi, urea tetap saja menjadi pilihan.

Selain pupuk, faktor yang amat penting bila berbicara tentang swasembada pangan, khususnya beras, adalah benih. Indonesia tidak menganggap penting perbenihan itu. Semuanya maunya dibeli.

Kita berterima kasih karena sebuah perusahaan swasta dari jaringan bisnis Artha Graha telah mengikat kerja sama dengan sebuah perusahaan perbenihan di China untuk membantu Indonesia menghasilkan benih padi hibrida di Tanah Air. Mudah-mudahan, itu menjadi batu loncatan yang kukuh bagi ambisi dan keharusan Indonesia mencapai swasembada beras.

Jumat, 15 Juni 2007

Tekad Menertibkan 1.000 Rekening Liar



REKENING liar di berbagai departemen membuat kita menggeleng-gelengkan kepala. Sebab, jumlahnya amatlah fantastis, yakni 1.303 buah. Adapun nilai uangnya juga tak kalah mencengangkan, yakni Rp8,5 triliun.

Dana sebanyak itu, jika dipakai untuk membangun infrastruktur jalan atau pelabuhan, sungguh membuat paket kebijakan investasi tidak hanya berhenti pada wacana. Ia menjadi stimulus yang konkret untuk investasi yang secara otomatis mengurangi pengangguran. Dan, ekonomi pun bisa bertumbuh lebih baik.

Dari sekian banyak kementerian, tiga teratas yang memiliki rekening liar berturut-turut Departemen Agama, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keuangan. Departemen Agama menyimpan dana Rp2,89 triliun, Departemen Pertahanan Rp1,83 triliun, dan Departemen Keuangan Rp1,06 triliun.

Menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), uang sebanyak itu tersimpan dalam bentuk deposito dan giro. Disebut rekening liar karena dana itu tidak terdaftar sebagai rekening milik negara. Karena liar, sudah amat pasti peruntukannya bisa semau-maunya.

Pemerintah berjanji segera membereskan rekening-rekening liar itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tenggat waktu enam bulan kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk menertibkannya. Bahkan, kepada departemen yang ia pimpin, Sri Mulyani hanya memberikan waktu tiga bulan untuk membereskannya. Sebuah kebijakan yang tepat.

Tekad Menteri Keuangan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (12/6). Sri juga menjelaskan ihwal terjadinya rekening liar itu karena ketidakpahaman para pengelola institusi terkait akan adanya aturan. Ini memang aneh! Padahal, Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, amat jelas mengamanatkan setiap membuka rekening di lingkup kerja kementerian dan lembaga negara wajib memperoleh izin Menteri Keuangan.

Selain itu, juga masih ada Undang-Undang No 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Amat jelas dan gamblang pula undang-

undang ini memerintahkan seluruh uang negara harus disetorkan ke kas negara dan digunakan melalui mekanisme APBN. Dengan undang-undang itu sesungguhnya jelas tidak ada uang negara yang disimpan di rekening-rekening liar.

Sri Mulyani melihat betapa seriusnya perkara rekening liar itu. Oleh karena itu, ia telah menerbitkan dua peraturan baru yang lebih teknis, yakni Peraturan Menteri Keuangan No 57/PMK 05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor. Satu lagi Peraturan Menteri Keuangan No 254/KMK 05/2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Kantor.

Kedua peraturan itu tertanggal 13 Juni 2007. Ini artinya, peraturan itu dibuat atas respons segera atas temuan BPK tentang rekening liar yang dimuat *Media Indonesia* dua hari sebelumnya (11/6). Dengan peraturan itu, ia berharap dalam waktu 12 bulan tak ada lagi rekening liar beroperasi.

Kita mengapresiasi upaya yang dilakukan Menteri Keuangan untuk segera menertibkan temuan BPK yang sungguh fantastis itu. Selain sosialisasi peraturan kepada para pengelola institusi pemerintah/negara, pengawasan ketat dalam tataran implementasi juga penting.

Publik menunggu tekad penertiban itu sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, yang dalam pencapaiannya sungguh masih amat jauh dari harapan.

Koran Tempo

Senin, 11 Juni 2007, Editorial

Pangkas Birokrasi tanpa Kompromi

Pemerintah tengah menyiapkan paket ekonomi baru untuk menggenjot ektor riil yang masih loyo. Tapi rencana bagus saja tidak cukup. Pemerintah perlu langkah drastis memangkas birokrasi pengurusan izin usaha. Tindakan itu penting untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, yang kalah menarik dibanding negara-negara lain di Asia.

Kebijakan baru nanti sesungguhnya kelanjutan dari tiga paket yang dikeluarkan tahun lalu: perbaikan iklim investasi, infrastruktur, dan sektor

keuangan, ditambah satu bidang baru, yaitu pemberdayaan usaha mikro dan kecil-menengah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani instruksi presiden yang mengatur paket ini.

Perbaikan iklim investasi memang sangat mendesak dilakukan. Sebab, tanpa kucuran modal baru dari swasta lokal dan asing, sulit berharap ekonomi Indonesia bergerak lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi 6 persen pada kuartal pertama tahun ini—dibanding kuartal yang sama tahun lalu—merupakan pencapaian yang tergolong tertinggi di dunia; hanya di bawah Cina, India, dan Vietnam. Tapi, untuk bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan pertumbuhan paling sedikit 6,6 persen per tahun.

Banyak kalangan menilai masih terpuruknya sektor riil merupakan penghambat pertumbuhan. Pernyataan ini tak sepenuhnya benar. Sebab, pertumbuhan sektor usaha bidang jasa (*non-tradable*)—seperti pengangkutan, keuangan, komunikasi, konstruksi, dan jasa-jasa di luar industri—terbilang tinggi: 8,3 persen.

Pernyataan itu lebih tepat ditujukan pada sektor barang (*tradable*), yang berkaitan dengan ekspor-impor, yaitu agrokultur, pertambangan, dan manufaktur. Meski sektor ini sudah mulai pulih, pertumbuhannya hanya separuh sektor jasa. Padahal, sumbangan kedua sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) hampir berimbang. Bahkan, sebagian besar nafkah penduduk Indonesia datang dari sektor barang ini. Penyerapan tenaga kerja juga lebih bergantung pada sektor ini.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada manufaktur, sebagai penyumbang lebih dari setengah bagian sektor *tradable* terhadap PDB. Perkembangan bisnis manufaktur masih lamban akibat seretnya investasi baru di bisnis itu. Beberapa perusahaan bahkan hijrah ke luar negeri. Itu menandakan daya kompetisi manufaktur Indonesia merosot. Sebabnya, antara lain, kemudahan bisnis di dalam negeri masih kurang menarik.

Penyakit lama yang tak kunjung sembuh: rantai birokrasi izin usaha terlalu panjang. Akibatnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam laporan Bank Dunia bertajuk "Doing Business 2007", posisi Indonesia merosot empat tingkat ke urutan 135 dari 175 negara yang disurvei dalam hal kemudahan berbisnis—meski dinilai ada perbaikan dalam proses pendirian usaha. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia lebih rendah daripada Singapura, yang menempati urutan pertama, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, Vietnam, dan Filipina.

Dalam pengurusan izin usaha, Indonesia memang baru berhasil memangkas waktunya dari 155 hari menjadi 97 hari—hampir sama dengan Timor Leste. Padahal di Malaysia dan Thailand cuma sekitar 30 hari. Dan di Singapura hanya enam hari. Karena itu, dalam paket ekonomi baru nanti, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan birokrasi. Itu berarti praktek korupsi dalam mengurus izin usaha, yang sudah bagaikan "kanker stadium tiga", mesti dibabat habis. Hanya itulah cara meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor.

Selasa, 12 Juni 2007

2 Perang Melawan Teroris

Polisi kembali melakukan operasi penangkapan orang-orang yang diduga bagian dari jaringan teroris. Namun, lagi-lagi yang tertangkap baru kaki-tangan, bukan tokoh utama terorisme. Pentolan seperti Abu Dujana dan Noor Din M. Top masih melenggang. Padahal, mereka inilah yang mampu merekrut anggota baru dan melancarkan aksi teror berikutnya. Sekali lagi terbukti jaringan terorisme sulit dipatahkan. Tertangkap satu, muncul seribu.

Teror dan terorisme memang bukan persoalan khas Indonesia. Bahkan, boleh dikatakan dewasa ini nyaris tak ada negara yang bebas dari terorisme. Jaringan teroris pun tak terbatas hanya di satu negara, tapi sudah lintas negara. Meski demikian, tidak berarti kita lalu membiarkan teror dan terorisme merajalela. Keduanya harus dilawan dan dibasmi.

Aksi teror yang paling mengguncang dunia terjadi pada 11 September 2001, yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaidah. Saat itu dua pencakar langit di New York, Amerika Serikat, diledakkan lewat terjangan pesawat yang disandera. Peristiwa itu bukan semata dipicu oleh alasan ideologi, melainkan juga ketidakadilan tatanan dunia.

Jaringan Al-Qaidah diduga terlibat pula serangkaian aksi pengeboman di Indonesia. Kelompok yang berideologi radikal ini mampu merekrut pemuda-pemuda Islam untuk "berjihad". Kebetulan negeri kita menyediakan begitu banyak pemicu tambahan. Isu kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, rendahnya pendidikan, serta konflik etnis dan agama merupakan bahan bakar yang membuat orang-orang seperti Noor Din Top dan Abu

Dujana seakan menemukan "rumah besar"-nya di sini. Ide yang ditawarkan tokoh ini ternyata laku dan disambut banyak anak muda.

Selain aksi penangkapan oleh aparat keamanan, diperlukan usaha bersama melawan Abu Dujana atau Noor Din dan sekutunya yang terus memperluas jaringannya. Para ulama, misalnya, bisa ikut ambil bagian besar dalam perang melawan terorisme. Mereka dapat menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa, atas nama apa pun, terorisme itu salah.

Kerja sama dengan tokoh masyarakat sampai tingkat RT dan RW juga perlu digalang untuk membarikade meluasnya jaringan teroris. Sebab, selama ini diketahui bahwa para tersangka teror itu sebenarnya warga biasa yang sudah lama dikenal tetangganya. Ada tukang jahit, tukang servis elektronik, guru mengaji, dan orang-orang lainnya yang biasa kita temui sehari-hari. Hanya karena kurangnya pergaulan dengan mereka, kita sering terkaget-kaget begitu mendengar penangkapan mereka.

Langkah Departemen Agama membentuk tim penanggulangan teroris, yang beranggotakan pemimpin organisasi Islam, cukup baik. Tim ini mesti lebih giat berkunjung ke pesantren-pesantren untuk memberikan penyadaran jihad dalam konteks negara yang aman seperti Indonesia ini. Pemerintah juga harus mempercepat pekerjaan besar jangka panjangnya: memberantas kemiskinan dan kebodohan. Tanpa itu semua, terorisme niscaya akan selalu mendapatkan lahan baru dan kian sulit diberantas.

Rabu, 13 Juni 2007

Wartawan dan Dana Rokhmin

Jika belakangan ini terungkap ada sejumlah wartawan yang menikmati duit itu, saran serupa mesti pula diberikan.

Sudah selayaknya kita tidak menggunakan standar ganda dalam memerangi korupsi. Selama ini pers kerap menganjurkan agar penegak hukum mengusut para politikus penerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Jika belakangan ini terungkap ada sejumlah wartawan yang menikmati duit itu, saran serupa mesti pula diberikan.

Nama-nama wartawan itu muncul dalam berkas pemeriksaan Andin Taryoto, bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan, yang menjadi tersangka kasus dana nonbujeter. Gara-gara kasus yang sama, mantan

Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri juga diadili. Duit yang dikumpulkan secara ilegal oleh Rokhmin dan Andin memang disumbangkan ke mana-mana: dari nelayan sampai calon presiden, seperti Amien Rais.

Kalaupun para penerima sulit dijerat dengan alasan tak terlibat langsung dalam dugaan korupsi, mereka sebenarnya tidak bisa mengelak dari tuduhan lain. Sumbangan buat Amien, misalnya, bisa dipersoalkan karena dipakai untuk kampanye pemilihan presiden. Aturannya, calon presiden tak boleh menerima sumbangan dari pemerintah. Kalaupun pemberian itu atas nama Rokhmin pribadi, tetap menyalahi aturan karena jumlahnya melampaui batas.

Begitu pula aliran dana Rokhmin ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sumbangan ini berbau suap karena umumnya yang disumbang adalah wakil rakyat yang bertugas mengawasi kinerja Departemen Kelautan. Dugaan ini sekarang sedang diselidiki oleh Badan Kehormatan DPR.

Bagaimana dengan wartawan? Dengan mudah khalayak akan menganggap pula sumbangan dari Rokhmin sebagai suap jika ada penjelasan yang masuk akal. Apalagi wartawan juga terikat kode etik profesinya. Mereka dilarang menerima sumbangan dari sumber berita yang berpotensi mempengaruhi berita mereka tulis.

Itu sebabnya, disarankan agar aliran dana ke kalangan pers itu diklarifikasi, dan jika perlu, diusut. Tentu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Bisa saja yang terjadi adalah transaksi bisnis biasa, tidak bersangkutan paut dengan profesi kewartawanan. Mungkin saja sebuah media pernah melakukan kerja sama bisnis dengan Departemen Kelautan yang tidak terkait dengan fungsi jurnalistik media tersebut. Semua kemungkinan bisa terjadi.

Pengusutan penting dilakukan karena wartawan adalah profesi yang berbasis pada kepercayaan publik. Sebuah berita hanya bisa diyakini kebenarannya bila disampaikan oleh lembaga yang kredibel. Tanpa kepercayaan, media tak memiliki kekuatan apa pun.

Kredibilitas itulah yang harus dijaga. Kita berharap, dugaan wartawan disuap oleh Departemen Kelautan tidak terbukti. Sebab, jika ternyata dugaan itu benar, di tengah munculnya kecenderungan sinisme terhadap media dan wartawan, makin sulit meletakkan posisi media sebagai lembaga yang bisa dipercaya.

Kamis, 14 Juni 2007

Dakwaan Lemah Kasus Hilton

Wajar bila kita menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Hotel Hilton. Dua hari lalu hakim membebaskan Pontjo Sutowo dan Ali Mazi dari dugaan korupsi dalam perpanjangan hak guna bangunan. Vonis diambil bahkan sebelum terdakwa lain, dua bekas pejabat Badan Pertanahan Nasional yang memuluskan perpanjangan hak itu, dipastikan nasibnya.

Kekecewaan bertumpuk karena sebelumnya, Januari lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Pontjo Sutowo terhadap BPN dan Sekretariat Negara. Perpanjangan hak guna bangunan untuk Hotel Hilton (kini Hotel Sultan) dianggap sah. Tapi sebenarnya bukan hanya putusan pengadilan yang perlu dipertanyakan. Dalam kasus yang terakhir, keseriusan jaksa menjerat Pontjo dan Ali Mazi demonstrasi pasal-pasal korupsi mesti juga dipersoalkan.

Menurut hakim, kedua terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Mereka pun tak menyalahgunakan wewenang karena bukan pejabat publik. Pontjo seorang pengusaha dan Ali Mazi adalah pengacara yang diberi kuasa mengurus perpanjangan hak itu.

Jerat yang dipasang jaksa, yakni Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, seolah sia-sia saja. Bukan berarti orang yang bukan pejabat tak bisa dijebloskan ke penjara dengan alasan merugikan negara. Persoalannya, jaksa tidak bisa menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum. Kata hakim, jaksa tidak mengungkap upaya terdakwa mempengaruhi pejabat BPN.

Kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp1,9 triliun itu dibawa ke pengadilan karena Pontjo dianggap memperpanjang hak guna bangunan secara ilegal. Ia mendapat perpanjangan hak ini pada 2002 tanpa seizin Sekretariat Negara, yang mengelola lahan di kawasan Senayan, termasuk tanah yang dipakai Hilton. Muladi, Menteri Sekretaris Negara waktu itu, memang pernah menandatangani surat rekomendasi. Tapi ia kemudian berubah pikiran dan meminta surat itu diblokir.

Dalam persidangan terungkap bahwa surat itu ternyata diberikan oleh Ali Rahman, Menteri Sekretaris Negara berikutnya, kepada pihak Pontjo. Muladi pun menuding Ali telah mengganti nomor dan tanggal surat

yang pernah ditandatanganinya. Tuduhan ini mengisyaratkan adanya ketidakberesan, bahkan mungkin kolusi yang bisa melibatkan para terdakwa. Inilah yang seharusnya diusut oleh kejaksanaan. Mengapa surat yang dikeluarkan secara aneh itu tetap dijadikan landasan oleh pejabat BPN?

Upaya kejaksanaan mengajukan kasasi patut dihargai. Tapi Jaksa Agung Hendarman Supandji mesti pula mengusut jaksa yang sembrono dalam menangani perkara itu. Mereka tak mampu menyediakan bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum. Dakwaan yang berlapis-lapis, misalnya dengan menggunakan pula pasal-pasal suap, juga tidak dibuat. Sanksi berat perlu diberikan bila jaksa sengaja membuat dakwaan yang berlubang-lubang.

Jumat, 15 Juni 2007

Upaya Mengubur Kebebasan Pers

Sungguh kita sesalkan adanya upaya pemerintah mematikan lagi kebebasan pers. Langkah ini akan membunuh hak warga mendapatkan dan menyampaikan informasi. Tindakan memberangus pers juga akan mengancam demokrasi dan menggagalkan reformasi yang mulai dikibarkan sembilan tahun lalu.

Keinginan itu tecermin dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ada aturan tambahan yang berusaha menganulir kembali jaminan tidak adanya penyensoran dan pembreidelan. Ini diatur dalam ayat "pengecualian". Intinya, jaminan itu tak berlaku bagi pers yang memuat berita, gambar, atau iklan yang merendahkan martabat suatu agama atau mengganggu kerukunan umat beragama. Begitu pula bagi pers yang memuat hal yang bertentangan dengan rasa kesusilaan atau membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.

Draf tersebut disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ketika masih dipimpin Sofyan Djalil, tapi baru terkuak belakangan ini. Menteri penggantinya, Muhammad Nuh, terkesan tak berani terang-terangan mengungkapkan keinginan pemerintah itu. Ketika berkunjung ke Dewan Pers, ia menyatakan bahwa tidak pantas pihaknya berinisiatif merevisi Undang-Undang Pers. Kata Nuh, yang lebih tahu

mengenai hal itu adalah Dewan Pers. Tapi seorang anak buahnya memberikan draf revisi undang-undang itu ke anggota Dewan.

Kita mendukung sikap Dewan Pers menolak aturan baru dalam rencana revisi itu. Apa pun alasannya, menyensor, apalagi membreidel media, akan mengubur kebebasan pers. Kebebasan menyampaikan informasi kepada publik tidak bisa ditempatkan lebih rendah demi kepentingan lain. Jika memang ada pemberitaan yang benar-benar merugikan, misalnya merendahkan suatu agama, pembreidelan bukanlah jalan keluar. Sudah ada mekanisme yang cukup bagus: pihak yang dirugikan bisa mengajukan hak jawab, bahkan menggugat lewat pengadilan.

Tidak bisa dimungkiri, dampak dari kebebasan pers, selalu muncul pula media-media yang kurang bermutu dan kurang mendidik. Tapi, dibandingkan dengan mudaratnya, manfaat kebebasan itu jauh lebih besar. Hanya dengan adanya pers yang bebas, demokrasi bisa dijaga. Media juga berperan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Lewat media pula, praktek tak sehat di lembaga penegak hukum dan peradilan bisa diawasi.

Lagi pula hak warga mendapatkan dan menyampaikan informasi telah dijamin oleh konstitusi. Begitu juga kebebasan pers. Akan sia-sia saja upaya pemerintah menghidupkan lagi senjata pembreidelan karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Mahkamah Konstitusi bisa mengoreksinya lagi seandainya aturan itu diundangkan.

Pemerintah lebih baik berkonsentrasi mewujudkan harapan-harapan rakyat ketimbang berusaha mencari jalan buat mengekang pers. Soalnya, upaya ini bisa mengundang keinginan yang lebih berbahaya, yakni berpaling dari amendemen konstitusi, lalu kembali ke tatanan politik yang otoriter.

Kompas

Senin, 11 Juni 2007, Tajuk Rencana
Perlu Sinergi Pemerintah-DPR

Sinergi pemerintah dan DPR kita pandang sudah seharusnya. Namun, yang sudah seharusnya itu belakangan ini terganggu, di antaranya soal tafsir interpelasi.

Muncul soal perlu hadir atau tidaknya Presiden di DPR menjawab interpelasi. Perbedaan tafsir bisa terjadi dan hal itu normal. Yang mem-

buat tidak normal adalah kondisi di mana kita kini berada, terutama kondisi yang menempatkan kedua lembaga itu memberi prioritas kepada komitmen dan kebijakan dan program memperbaiki perikehidupan rakyat banyak.

Interpelasi soal Resolusi DK PBB 1747 tentang nuklir Iran belum selesai, diikuti prakarsa sejumlah anggota DPR untuk mengajukan interpelasi soal lumpur Lapindo. Kita setuju, soal lumpur panas di Sidoarjo yang sudah berjalan setahun mempunyai dimensi yang mendesak. Pemerintah sewajarnya memberikan solusi tuntas.

Namun, dalam konteks politik sekarang, jika lewat interpelasi, apakah lebih efektif atau tidak. Dari perbedaan tafsir, interpelasi berkembang sebagai persoalan yang menyangkut prestise politik. Bahkan, disertai pertanyaan yang mengandung prasangka, ada ikutan politik apa lagi dalam langkah interpelasi itu. Ikut-ikutan semacam itu menambah sensitif dan rumitnya persoalan.

Padahal, saat ini justru amat diperlukan kerja sama pemerintah-DPR dengan tujuan mempercepat serta lebih menjamin keberhasilan komitmen dan kebijakan peningkatan perikehidupan rakyat banyak dan mengatasi ketertinggalan kita bersama. Barangkali bisa ditempuh pendekatan yang bisa menghilangkan prasangka, adu prestise politik serta hambatan psikologis politik. Misalnya, jika anggota DPR atau fraksi yang partainya diwakili dalam kabinet bertindak lebih konsisten. Konsisten dalam pengertian, jika partainya diwakili dalam pemerintahan, mestinya mempunyai tanggung jawab yang khas pula.

Sekali lagi, jangan salah paham. Bukan hak menempuh interpelasi yang kita persoalkan. Bahkan juga bukan anggota DPR yang ikut berinterpelasi meskipun partainya diwakili dalam kabinet. Sebab, kita pun menjunjung prinsip serta urutan preferensi bahwa yang merupakan komitmen tertinggi adalah kepentingan rakyat banyak, kesejahteraan rakyat banyak. Sebaliknya dalam politik, berlaku pertimbangan misalnya mana cara yang lebih lancar dan lebih efektif.

Pastilah mengganggu sinergi kerja sama pemerintah dan DPR, sekiranya soal interpelasi dibiarkan berkepanjangan. Awam pun tahu, dalam sistem demokrasi, termasuk bagi negara kita, kelancaran pemerintah dan pemerintahannya amat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh lancarnya sinergi antara pemerintah dan DPR. Sebut saja sebagai contoh, proses pembuatan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara.

Masuk akal jika publik mengikuti cermat kelanjutan masalah itu. Akhirnya yang bisa mencairkan kemacetan berikut beragam akibatnya adalah sikap kenegarawanan, baik pada pemerintah maupun pada DPR.

Selasa, 12 Juni 2007

Jangan Politik untuk Ekonomi

Semakin jauh mengikuti aliran uang Departemen Kelautan dan Perikanan, semakin sedih hati kita ini. Beginikah politik kita akan seterusnya dibangun?

Masih kuat praktik yang menggunakan kekuatan politik untuk mengganggu ekonomi. Padahal, itu menghambat upaya pemulihan. Kita tidak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan dan menyelesaikan masalah ekonomi bangsa ini apabila pendekatannya tidak atas dasar cara ekonomi. Penyelesaian ekonomi dengan pendekatan politik justru akan menjauhkan kita pada pembenahan ekonomi karena terlalu banyak kepentingan yang masuk di dalamnya.

Padaahal, dalam ekonomi, efisiensi merupakan syarat mutlak. Seperti halnya perusahaan, negara tidak akan bisa kompetitif dan memenangi persaingan apabila tidak ditopang oleh efisiensi yang tinggi.

Mendekati Pemilihan Umum 2009 kita mulai dengar juga keluhan dari direksi badan usaha milik negara yang didekati partai-partai politik. Entah motifnya pribadi atau memang untuk kepentingan partai, direksi BUMN dimintai untuk mendukung partai dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2009. Permintaan itu diikuti dengan ancaman secara halus bahwa secara politik mereka yang tidak menunjukkan keberpihakan akan bisa tergusur dari kursinya.

Terus terang kita sedih mendengar kenyataan seperti itu. Masalahnya, ketika sembilan tahun lalu kita melancarkan reformasi, tujuan utama adalah untuk meninggalkan praktik-praktik seperti itu. Ternyata sistem boleh berganti, perilakunya masih tetap saja.

Semakin sedih lagi ketika politik ditumpangi oleh kepentingan ekonomi kelompok. Hanya demi mencapai tujuan tertentu, politik dipakai untuk menakut-nakuti. Apalagi jika hal itu ditujukan kepada perusahaan asing. Sikap yang tidak bersahabat seperti itu akan semakin memurukkan

citra negara kita sebagai tempat yang pantas untuk didatangi dan ditanami modal.

Padahal, berulang kali kita sendiri mengatakan perlu adanya investasi. Kita membutuhkan adanya penanaman modal sekitar Rp1.000 triliun setiap tahun untuk mendorong ekonomi bertumbuh dengan 7 persen. Bagaimana kita bisa berharap ada investasi masuk apabila tidak pernah bersahabat dengan dunia usaha?

Kita sama-sama menyadari bahwa peran pembangunan tidak bisa lagi hanya bertumpu kepada pemerintah. Tidak kalah pentingnya peran swasta dan bahkan di banyak negara sekarang ini swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam dunia yang semakin terbuka, kita tidak hidup sendiri. Negeri-negeri yang dulu tertutup, seperti China atau Vietnam, kini telah membuka diri dan bahkan lebih terbuka dari kita. Tidak usah heran apabila investasi mengalir deras ke sana dan sekarang negara-negara itu menikmati pertumbuhan yang luar biasa.

Kita tidak boleh terlena dengan julukan negara kaya dan demokrasi yang berkembang pesat. Semua itu tidak akan ada artinya apabila tidak bisa memakmurkan kehidupan seluruh bangsa. Kita lihat begitu banyak yang hidup dalam kemiskinan dan pengangguran.

Rabu, 13 Juni 2007

Minyak Goreng Terus Bermasalah

Kita sengaja gugat persoalan ini karena bukan tidak ada langkah yang ditempuh untuk menangani masalah minyak goreng. Berbagai rapat koordinasi sudah digelar.

Pertanyaannya, mengapa meski rapat sudah digelar, rencana tindakan sudah ditetapkan, harga minyak goreng tetap saja tidak bisa dikendalikan? Memang, pengeluaran minyak goreng pada rumah tangga porsinya kecil. Namun, ketika harga terus melambung, tetap saja menjadi beban masyarakat karena minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan kebutuhan pokok.

Dari fakta yang didapat di lapangan terungkap, salah satu tidak jalannya rencana tindakan yang ditetapkan pemerintah adalah para pihak

tidak konsekuen untuk menjalankan kewajibannya. Terutama kalangan produsen, mereka tidak sepenuh hati menjalankan tugas melaksanakan *domestic market obligation*. Pemerintah memang tidak menggariskan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan yang ditetapkan.

Kita memang sedang hidup di zaman yang berbeda. Pemerintah tidak bisa seperti dulu yang ibaratnya tinggal tekan tombol, semuanya langsung berjalan seperti yang diharapkan. Pada sistem demokrasi, pemerintah tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya.

Hanya saja, kita juga ingin mengingatkan, meski tidak lagi memiliki unsur pemaksaan, bukan berarti dalam sistem demokrasi tidak ada efektivitas. Prinsip *checks and balances* berlaku ketika kita membahas persoalan dan akan mengambil keputusan. Semua orang boleh mengeluarkan pandangannya dan berdebat akan substansi persoalan. Namun, sekali keputusan ditetapkan, semua orang harus patuh kepada putusan itu.

Jangan atas nama kebebasan, kita lalu tidak pernah sepakat akan sebuah jalan keluar bersama. Kita terus terlibat dalam perdebatan yang tiada akhirnya sehingga tidak pernah ada eksekusi yang bisa kita lakukan. Ketika hal itu terjadi, bukan hanya akan berpengaruh terhadap kredibilitas pemerintah, tetapi yang kita khawatirkan merusak seluruh sistem. Dan ketika sistem itu tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itulah kita ingin mengingatkan tanggung jawab dari setiap warga, bahwa kemajuan kita sebagai bangsa tidak mungkin hanya menjadi tugas pemerintah. Kita, warga, harus ikut berkontribusi dengan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita bersama.

Terus terang kita mengkhawatirkan kecenderungan kita sekarang ini yang begitu cair. Akibatnya semua orang tidak terlalu peduli dengan tanggung jawabnya sebagai warga. Kasus minyak goreng hanyalah salah satu contoh. Yang lebih membuat kita waswas adalah jaringan terorisme yang terus merasuk di tengah masyarakat. Semua ini tidak akan pernah bisa dihentikan sepanjang tidak ada peran serta kita sebagai warga.

Pemahaman inilah yang selalu harus terus didengungkan agar kita tidak sekadar menikmati kebebasannya saja dari sistem demokrasi yang kita terapkan. Kebebasan itu pada akhirnya harus membawa manfaat bagi perbaikan perikehidupan kita sebagai bangsa dan bagi kemajuan negara kita.

Kamis, 14 Juni 2007

Setelah Inpres No. 6 Lalu...

Setiap kali keluar paket kebijakan perbaikan ekonomi, kita menyambutnya dengan penuh antusias. Kita memang tidak boleh berhenti untuk beruntung.

Harus kita sadari memang tidak mudah untuk bangkit setelah perekonomian kita terpukul begitu hebatnya sembilan tahun lalu. Selama ini kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan, meski belum memuaskan, tanda-tanda itu sudah mulai tampak.

Pertanyaannya, mengapa pemulihan itu berjalan lamban? Jawabnya, karena sikap dan cara kerja kita belum berubah. Sikap dan cara kerja kita masih sama dengan kemarin ketika sebelum krisis, padahal jelas keadaan dan tantangan yang kita hadapi menuntut perubahan sikap dan cara kerja yang benar-benar berbeda.

Sejak satu setengah tahun terakhir ini memang dicoba pendekatan lain. Paket pemulihan ekonomi dirumuskan dengan model matriks sehingga jelas siapa penanggung jawabnya dan batas waktu pencapaiannya.

Tentu itu harus kita hargai. Hanya saja, hal itu menjadi tidak cukup ketika menteri pelaksana hanya berpikir sektoral, tidak memerhatikan keterkaitannya dengan departemen lain. Itulah yang kemudian kita rasakan dari setiap paket kebijakan pemulihan ekonomi. Kecepatan pemenuhan target tidak berjalan beriringan, padahal program itu harus dilakukan secara bersamaan dengan kecepatan yang sama pula agar hasilnya optimal.

Untuk itulah kita sering mengingatkan bahwa kita membutuhkan para pemimpin yang punya mimpi besar, punya visi besar, dan yang lebih penting tahu bagaimana menerjemahkan visi besarnya itu dalam tindakan. Pemimpin di sini bukan hanya presiden, tetapi semuanya, termasuk para menteri dan juga anggota parlemen.

Krisis yang kita hadapi begitu beratnya. Tidak mungkin kita bisa menjawab tantangan yang berat itu apabila kualitas pemimpinnya pas-pasan, apalagi jika tidak punya visi akan tanggung jawab yang sedang diembannya. Jabatan hanya dinikmati kehormatannya seakan-akan itu amanah, tetapi tidak tanggung jawabnya.

Belajar dari pengalaman bangsa lain, di sinilah memang titik kelemahan kita. Setelah reformasi, kita justru seperti kehilangan cita-cita

besar yang ingin kita capai. Lebih menyedihkan lagi ketika kita sadar akan lemahnya kemampuan kita untuk melakukan eksekusi.

Lepas dari sistem politiknya yang berbeda, China mampu dalam waktu tidak sampai 20 tahun membawa bangsanya membuat sejarah besar. Caranya dengan membuat semua orang sadar akan tanggung jawabnya untuk mengimplementasikan cita-cita besar bangsanya.

Sanggupkah kita mentransformasikan diri kita guna merumuskan cita-cita besar bangsa ini? Tanpa itu, maka setiap kali paket pemulihan ekonomi dikeluarkan, paket tersebut hanya menjadi sebuah dokumen yang baik di atas kertas, tetapi tidak pernah bisa dilaksanakan.

Setelah paket perbaikan iklim investasi, paket terakhir yang berkaitan dengan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Untuk itulah dibutuhkan kerja keras dan kerja terbaik dari semua pihak, terutama birokrasi.

Jumat, 15 Juni 2007

Terus Ciptakan Rasa Aman

Tertangkapnya para pelaku teror oleh polisi sungguh merupakan berita baik. Dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi, kita membutuhkan rasa aman itu.

Setiap langkah perbaikan ekonomi yang kita lakukan menjadi sia-sia dan tidak ada artinya ketika kemudian terjadi lagi aksi teror. Sekecil apa pun aksi pengeboman segera memperkuat persepsi, Indonesia adalah negeri yang tidak aman. Empat kali teror besar, dua kali di Bali dan dua kali di Jakarta, memang mencitrakan negeri kita sebagai negeri penuh ancaman.

Kita menyadari upaya untuk memerangi aksi terorisme tidaklah mudah. Karena itulah kita menghargai upaya polisi untuk tidak pernah berhenti mengungkap jaringan terorisme yang ada di sini dan kemudian beruntung menangkap para pelakunya.

Dukungan terhadap upaya polisi haruslah kita lakukan secara penuh sebab kejahatan yang satu ini berbeda dengan kejahatan biasa. Cara menghadapinya tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa.

Bukan hanya sekadar dukungan teknologi dan finansial yang dibutuhkan, tetapi yang tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat. Penciptaan keamanan dan rasa aman tidak bisa hanya diserahkan kepada polisi, tetapi kita, masyarakat, juga memiliki tanggung jawab yang sama.

Para pelaku teror memang pintar dalam melakukan aksinya. Mereka mencoba membaaur dengan masyarakat dan berperilaku seperti masyarakat biasa. Itulah yang kemudian kita ketahui dari terungkap dan tertangkapnya para pelaku teror, mulai dari Serang, Lamongan, Malang, Yogyakarta, dan terakhir Banyumas ini.

Pola seperti itu bukan hanya merupakan ciri Indonesia. Hampir di semua negara, termasuk Inggris dan bahkan Amerika Serikat, para pelaku teror berbaur di tengah masyarakat umum sehingga semakin tidak mudah untuk dideteksi.

Kecerdikan dan keterampilan polisi memang diuji betul. Semua kemampuan terbaik harus dikerahkan untuk bisa mengungkap aksi teror yang bukan hanya menakutkan dan membahayakan masyarakat, tetapi juga bisa menggoyahkan stabilitas negara.

Untuk itulah semua negara di dunia mengerahkan segala kemampuan terbaik untuk mencegah jangan sampai para pelaku teror bisa beraksi di negerinya. Sekali saja lepas dari kendali, maka akan menimbulkan persepsi yang buruk, dan biaya untuk pemulihan citra tersebut akan sangat mahal.

Tentu yang tidak kalah penting untuk bisa diselesaikan adalah inti dari persoalan munculnya aksi terorisme ini. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, rasa frustrasi sangat mudah untuk membuat seseorang kemudian terjebak dalam cara berpikir yang ekstrem.

Pada kita potensi itu sangat besar karena memang sejak sembilan tahun terakhir kita belum bisa keluar dari jeratan krisis ekonomi. Terutama pengangguran dan kemiskinan belum bisa diselesaikan. Kunci untuk menyelesaikan persoalan itu tidak lain adalah pemulihan ekonomi. Untuk membuat perekonomian bisa bergerak lagi, salah satu kuncinya adalah terjaminnya keamanan.

Investor Daily

Senin, 11 Juni 2007, Tajuk

Menunggu Kebangkitan Industri Asuransi

Meskipun dalam sejarah keuangan Indonesia industri asuransi merupakan pemain lama, dalam perkembangannya tertinggal jauh dibanding perbankan dan pasar modal. Bahkan, dibanding instrumen baru, seperti reksa dana, mobilisasi dana publik oleh perusahaan asuransi masih terbilang kecil.

Per Maret 2007, dana publik yang dikelola oleh perbankan mencapai Rp1.291 triliun, pasar saham Rp855 triliun, dan reksa dana Rp59 triliun. Sementara itu, total perolehan premi per Desember 2006 sekitar Rp40 triliun, terdiri atas premi asuransi jiwa sekitar Rp26,29 triliun, asuransi umum sekitar Rp7,19 triliun, dan asuransi sosial sekitar Rp6,34 triliun.

Kontribusi asuransi jiwa terhadap produk domestik bruto pada 2006 juga masih kecil, sekitar 1,21%, turun dibanding 2005 sebesar 1,34%. Sementara itu, kontribusi premi asuransi umum terhadap PDB sekitar 0,7%. Jika dilihat dari penetrasi pasar asuransi, Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga. Peserta asuransi individual dibanding jumlah penduduk yang berjumlah 225 juta jiwa tak lebih dari 5%, Singapura sekitar 75%, dan Jepang mencapai 300%.

Di negara lainnya, kontribusi perusahaan asuransi dibanding perbankan dan pasar modal hampir sama. Umumnya negara maju sangat memperhatikan pilar ketahanan keuangan sehingga masing-masing industri diberi *playing field* yang sama. Ketika salah satu industri diterpa krisis, pilar lainnya masih cukup kokoh untuk menahan ekonomi agar tidak ambruk.

Di Indonesia, pilar keuangan terkonsentrasi pada perbankan. Saat perbankan dilanda ketidakpercayaan akibat sejumlah bank ditutup pada 1998, ekonomi Indonesia sulit bangkit karena industri lainnya tak cukup kuat untuk menahannya.

Asuransi sepertinya masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal, dana kelolaan asuransi yang bersifat jangka panjang sangat cocok untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur.

Selain itu, bisnis asuransi merupakan bisnis keuangan yang padat karya. Lapangan kerja yang disediakan cukup banyak, dari karyawan

kantor, *underwriter*, appraisal, hingga agen yang merambah sampai pelosok daerah. Tak hanya mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga juga banyak direkrut menjadi agen asuransi. Dan kini, profesi asuransi juga dilirik oleh kalangan terdidik karena menjanjikan pendapatan yang cukup besar. Sejumlah iklan koran menyebutkan, pendapatan seorang agen bisa mencapai miliaran rupiah.

Melihat kenyataan itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan industri asuransi. Industri asuransi harus diberi *playing field* yang sama dengan lembaga keuangan lainnya sehingga dapat berkembang dan berperan lebih banyak dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Tak hanya Jepang yang memanfaatkan dana kelolaan asuransi untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Tiongkok kini tercatat sebagai salah satu negara yang sangat agresif mengembangkan bisnis asuransi. Negara tersebut mencanangkan pertumbuhan asuransi meningkat 200% pada 2010 dibanding 2005. Dana kelolaan ditargetkan mencapai 5 triliun yuan atau sekitar US\$ 6.250 miliar. Bisnis asuransi juga dimanfaatkan pemerintah setempat untuk pembangunan ekonomi dan sosial dengan memberikan proteksi terhadap risiko di bidang pertanian, peningkatan taraf hidup masyarakat di perdesaan.

Harus diakui, industri asuransi di Indonesia belum mumpuni. Istilahnya, potensi pasar sangat besar, tetapi tenaga kurang. Ini tercermin dari banyaknya premi yang lari ke luar negeri, mencapai sekitar 70%. Hal itu karena modal perusahaan asuransi di Indonesia sangat kecil sehingga kapasitas tampungnya pun kecil.

Saatnya asuransi berbenah diri. Dalam kondisi ekonomi yang cukup bagus saat ini, yang ditandai inflasi rendah, tren penurunan suku bunga, dan mulai menggeliatnya daya beli masyarakat adalah momen tepat untuk membangkitkan industri asuransi. Sudah saatnya pemerintah mereformasi industri asuransi dan menjadikannya sebagai salah satu pilar yang kokoh untuk menopang ekonomi.

Yang dinanti oleh pelaku asuransi adalah terbentuknya Arsitektur Perasuransian Indonesia (API) agar posisi dan peran industri asuransi di Indonesia menjadi jelas dan terarah. Selama ini, API di bidang asuransi masih sebatas wacana, sementara API di bidang perbankan sudah berjalan dengan baik. Melalui API ini diharapkan industri asuransi dapat tumbuh sehat dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi juga meningkat.

Selain itu, insentif pajak bagi pemegang polis juga diperlukan untuk mendorong masyarakat ber asuransi. Restrukturisasi pajak tersebut berarti menyediakan kesempatan yang setara dengan reksa dana yang saat ini memiliki kelebihan dalam hal perpajakan. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu ikut berperan mendidik masyarakat untuk memahami lebih baik lagi tentang asuransi dan manfaatnya bagi pembangunan.

Sudah saatnya pemerintah menempatkan pemain dana sektor keuangan dalam lapangan permainan yang sama. Tabungan jangka panjang dan proteksi asuransi bagi masyarakat untuk dana pensiun harus digalakkan dan tabungan asuransi harus dilindungi. Kita semua menunggu era kebangkitan industri asuransi di Indonesia.

Senin, 12 Juni 2007

Mimpi Swasembada Pangan

Kecukupan pangan adalah sendi sangat vital sebuah negara. Sebaliknya ketidakcukupan pangan bisa menjadi senjata ampuh untuk menggulingkan sebuah rezim pemerintahan. Itu kata Jeffrey D Sachs, profesor Harvard University yang populer dengan ketajaman analisisnya tentang kemiskinan dan ekonomi.

Sadar akan hal itu, banyak negara sangat gigih membela sektor pertaniannya, melindungi petaninya, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Perundingan organisasi Perdagangan Dunia (WTO) macet melulu gara-gara negara maju itu enggan memangkas subsidi pertanian yang nilainya ratusan miliar dolar AS per tahun.

Bila dibandingkan dengan di Indonesia, kita semua maklum bahwa sektor pertanian belum terkelola optimal. Petani masih dimarginalkan dan kerap kali dikorbankan demi kepentingan sektor lain. Kantung-kantung kemiskinan masih bersarang di sektor pertanian.

Sejauh ini, Indonesia masih menjadi pengimpor berbagai jenis pangan. Tahun ini kita mengimpor beras sekitar 1-1,5 juta ton. Negeri ini juga masih mengimpor gula sekitar 500 ribu ton per tahun dan jagung 900 ribu ton per tahun. Impor gandum dan kedelai juga masih signifikan. Selain itu, suplai beras dalam lima tahun terakhir hanya 1,05% per tahun,

sementara laju permintaannya diperkirakan mencapai 4,66% per tahun, sehingga berpotensi memperlebar defisit beras.

Bila melihat angka impor pangan yang tak kunjung menurun, swasembada pangan seolah masih sebatas utopia dan mimpi panjang. Dan mimpi itu kembali digelorakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengunjungi Tiongkok pekan lalu. Wapres optimistis bahwa tahun depan Republik ini mampu swasembada pangan. Boleh jadi Wapres bersemangat begitu melihat Tiongkok dengan penduduk 1,3 miliar jiwa mampu mencukupi kebutuhan berasnya. Kalau Tiongkok bisa, kenapa Indonesia yang jelas-jelas negara agraris tidak bisa?

Mimpi Wapres adalah mimpi kita semua. Mungkin itu sudah berulang kali digarisbawahi para elite di negeri ini, termasuk para menteri pertanian. Namun, melihat kenyataan dan berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk memajukan pertanian, kita semua dibuat miris hati. Kemarin, 11 Juni, adalah dua tahun persis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program revitalisasi pertanian. Tapi, praktis belum ada pencapaian yang menumbuhkan optimisme tentang kebangkitan sektor pertanian, termasuk swasembada pangan.

Kendati demikian, jalan menuju swasembada pangan tetap terbentang luas. Untuk itu, ada beberapa catatan yang perlu diseriusi pemerintah. Pertama, soal pengadaan bibit. Kualitas bibit tanaman pangan, khususnya beras, menjadi hulu dari proses produksi. Bibit atau benih yang berkualitas akan menaikkan produktivitas.

Pemerintah sudah menggulirkan pembagian benih gratis dengan dana Rp1 triliun lebih, tetapi implementasi di lapangan masih tersendat. Ketakutan sejumlah pemerintah daerah dalam penunjukan langsung pengadaan benih membuat program ini nyaris gagal. Kendala mekanisme lelang dan birokrasi ini harus dicari solusinya.

Kedua, pemerintah harus serius mengerem laju konversi lahan. Jutaan hektar sawah dikorbankan oleh bangunan-bangunan proyek lain. Sawah dengan fasilitas irigasi bagus kian terkikis. Hingga tahun 2004, setidaknya ada 3 juta hektar (ha) sawah yang diajukan pemerintah daerah (pemda) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah fungsi. Andai permohonan itu disetujui. Indonesia akan kehilangan produksi beras 10 juta ton per tahun.

Ketiga, perbaikan jaringan irigasi sangat mutlak. Saat ini, jaringan irigasi yang ada, sekitar 6,7 juta hektar, baru sanggup melayani 15 % total persawahan. Bahkan kerusakan jaringan irigasi terjadi di mana-mana, sehingga suplainya bukannya bertambah, malah kian menciut. Ini persis dengan nasib rel kereta api di Indonesia yang tidak bertambah jaringannya, tetapi malah banyak yang hilang dan rusak.

Keempat, program reformasi agraria harus segera diwujudkan. Pembagian lahan gratis bersertifikat kepada penduduk misalnya dicanangkan BPN ini diyakini mampu multiplier effect luar biasa. Sektor pertanian bisa maju dan penduduk miskin bisa berkurang signifikan.

Kelima, pemerintah perlu menjalankan secara konsisten rencana alokasi lahan pertanian abadi 15 juta hektar sawah dan 15 juta hektar lahan kering.

Keenam, pemerintah seyogianya memberikan insentif kepada daerah yang berhasil dalam swasembada pangan, misalnya lewat kebijakan anggaran.

Ketujuh, egoisme sektoral dan kepentingan departemen kerap merugikan petani selama ini seyogianya diakhiri. Kita optimistis pertanian menjadi sektor yang tangguh bila ditopang kebijakan yang kondusif.

Bila berbagai faktor di atas berjalan simultan dan konsisten, semoga swasembada tak lagi sebatas mimpi. Dan kita memiliki potensi sangat besar untuk mewujudkan.

Rabu, 13 Juni 2007

Satu Lagi Dari 'Mr Paket'

Untuk keenam kalinya pemerintah SBY–JK meluncurkan paket kebijakan ekonomi. Satu paket pada masa Aburizal Bakrie menjabat Menko Perekonomian, kelima paket lainnya pada era Boediono selaku Menko Perekonomian.

Paket yang diterbitkan kemarin Selasa (12/6), dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan sektor riil, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Inpres yang diterbitkan mencakup perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.

Pada Inpres No.6 tahun 2007 itu, para menteri, gubernur, hingga bupati ditugaskan, untuk melaksanakan percepatan pengembangan sektor riil, dan pemberdayaan UMKM di bawah koordinasi Menteri Perekonomian. Seperti paket-paket sebelumnya setiap kebijakan dirinci dalam program, tindakan, keluaran, dan sasaran.

Merujuk pada nasib lima paket sebelumnya, kalangan pelaku ekonomi menyangsikan efektivitas Paket 12 Juni 2007 (pak jun). Lima paket sebelumnya sama sekali tidak membuahkan hasil signifikan. Kebijakan yang diluncurkan sama sekali tidak langsung menjawab masalah pokok yang terjadi .

Paket kebijakan ekonomi, yang diluncurkan selama dua tahun terakhir membuat kata itu kehilangan greget. Pakjun lantas disambut dingin karena seperti yang telah terjadi sebelumnya, pak jun itu kurang berdampak pada realitas bisnis. Kita masih ingat betapa besarnya dampak Pakto 1988 atau Pakfeb 1991 bagi kehidupan sektor finansial.

Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan tim Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dinilai lebih merupakan komplikasi kegiatan rutin, sangat administrasi, dan birokratis. Paket kebijakan riil lebih merupakan hasil masukan dari para dirjen dan jajaran di bawahnya. Bukan merupakan penjabaran dari visi yang kuat, tajam, dan berjangka panjang.

Akan sangat besar dampak positifnya jika paket kebijakan ekonomi merupakan penjabaran dari sebuah kebijakan yang didukung oleh visi yang jelas dari pemerintah untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat. Paket kebijakan yang diluncurkan harus *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job*.

Sudah beberapa bulan terakhir, harga minyak goreng tetap melambung tinggi tanpa bisa diturunkan oleh pemerintah. Pejabat tinggi pemerintah sudah mengumpulkan sejumlah produsen minyak goreng, tetapi tetap nihil. Paket kebijakan mestinya langsung menyentuh masalah pokok rakyat yang selalu datang berulang setiap tahun.

Selama ini, Indonesia selalu kekurangan pangan sehingga pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras, gula, kedelai, jagung, dan sebagainya. Di lain pihak negeri ini adalah negara agraris, iklim sangat mendukung dan sebagian besar penduduk masih hidup di sektor pertanian. Paket kebijakan ekonomi mestinya menyentuh persoalan ini agar Indonesia bisa berswasembada pangan.

Investasi baru adalah kunci untuk membuka lapangan kerja baru, mendorong ekspor dan laju pertumbuhan ekonomi. Tapi, RUU penanaman Modal (UU-PM) yang disetujui di DPR, 10 April 2007 tak kunjung dijabarkan lebih lanjut oleh menkeu lewat surat keputusan.

Dalam pembahasan di DPR disepakati, untuk mempercepat lahirnya payung hukum bagi para pemodal, UU-PM bisa langsung dijabarkan oleh surat keputusan menkeu tanpa perlu peraturan pemerintah dan surat keputusan presiden. Tapi, hingga saat ini, belum satu pun surat keputusan menkeu tentang penanaman modal.

DPR RI menyetujui pemberian insentif khusus bagi sektor usaha yang mampu menggerakkan sektor riil dan mendorong tarif PPh bagi perusahaan yang bergerak di sektor agrarisbisnis, industri berat, dan yang hendak *go publik*. Pemerintah bisa merumuskan sektor usaha yang layak dan memberikan insentif khusus agar bisa bergerak lebih cepat.

Semua paket ekonomi yang pernah diluncurkan tidak memberikan hasil yang signifikan. Di bidang infrastruktur, tidak ada kemajuan berarti. Dari 91 proyek yang ditawarkan pemerintah pada Indonesia Infrastructure Summit 2005 hanya satu yang sudah beroperasi, sedangkan dari 111 proyek ditawarkan Indonesia *Infrastructure and Exhibition*, belum satu pun yang laku. Ini semua menunjukkan, pemerintah tidak mampu merespons situasi konkret yang terjadi. Kebijakan yang diluncurkan tidak menjawab kebutuhan rakyat jelata dan para pelaku usaha.

Jika konsisten menjalankan kebijakan yang *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job*, pemerintah mestinya meluncurkan kebijakan ekonomi langsung bisa menarik minat pemodal untuk mulai berinvestasi dan memperluas usaha. Untuk menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memangkas angka kemiskinan dan pengangguran, pemerintah mestinya memberikan arahan, bukan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Tanpa arahan yang jelas, semua paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan tidak membuahkan hasil. Menko perekonomian akan dikenang sebagai Mr Paket.

Kamis, 14 Juni 2007

Konsumsi Semen Naik Tajam

Konsumsi semen meningkat tajam dalam lima bulan terakhir dan pada Mei lalu, terakhir dan pada bulan Mei lalu, lonjakan konsumsi semen mencapai rekor tertinggi. Jika perusahaan semen tidak ekspansi, selambatnya tahun 2010, Indonesia akan kekurangan semen.

Bersamaan dengan lonjakan konsumsi semen, harga bahan bangunan itu pun terdongkrak 5–10%. Sejak beberapa bulan lalu, sejumlah bahan bangunan seperti besi dan kayu sudah naik signifikan.

Pada Mei 2007, penjualan semen dalam negeri mencapai 2,91 juta ton atau naik 13,5 % dibanding periode sama tahun sebelumnya. Sedangkan selama periode Januari–Mei 2007, konsumsi semen nasional sebesar 12,89 juta ton atau meningkat 8,5%.

Selain konsumsi semen, pembelian otomotif juga meningkat. Pasar mobil dan motor yang tahun lalu sepi mulai bergairah. Dalam lima bulan terakhir, penjualan mobil dan motor lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Apakah perkembangan ini menunjukkan bahwa, sektor riil sudah bergerak cepat dan Indonesia sudah pulih dari krisis ekonomi? Apakah kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dampak buruk dari dua kali kenaikan harga BBM pada tahun 2005 sudah pupus? Apakah kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli rakyat meningkat signifikan? Apakah ini semua menunjukkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6,3% tahun ini tidak sulit tercapai?

Kita harus mengaku bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik mekanisme sekali belum signifikan. Kekayaan segelintir orang meningkat tajam bahkan menakjubkan berkat kepandaian mereka berinvestasi di pasar modal. Tapi, tingkat kesejahteraan sebesar rakyat Indonesia justru terpuruk.

Sejak Mei, konsumsi semen oleh rumah tangga memang meningkat lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya. Siklus konsumsi semen setiap tahun memang begitu. Setelah panen padi dan palawija serta musim penghujan berlalu, orang mulai membangun rumah baru dan memperbaiki rumah lama. Akan tetapi, untuk tahun ini, lonjakan konsumsi semen lebih disebabkan oleh permintaan para kontraktor jalan raya. Per-

baikah jalan raya di seantero negeri yang rusak parah menyedot semen dalam jutaan ton.

Permintaan semen oleh properti justru menurun. Dibanding tahun sebelumnya, pasar properti tahun ini agak sepi. Ini terutama disebabkan oleh melambatnya penjualan ruang perkantoran dan pusat perbelanjaan.

Yang cukup menggembirakan hanyalah pasar rumah tangga. Meski pendapatan relatif tidak meningkat, menengah ke bawah yang belum memiliki rumah akan berutang untuk memiliki rumah, apalagi suku bunga kredit kepemilikan rumah menurun. Perbaikan rumah tinggal juga ikut meningkatkan konsumsi semen.

Kenaikan penjualan rumah tinggal juga disebabkan oleh kaum berduit. Mereka memiliki rumah kedua, ketiga, dan seterusnya sebagai bagian dari strategi diservikasi investasi.

Kenaikan penjualan mobil pun tidak mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat karena yang membeli mobil adalah masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan kenaikan penjualan sepeda motor antara lain didorong oleh kemudahan yang ditawarkan bank dan perusahaan multifinance.

Sektor rill memang mulai bergerak, tapi jauh dari cukup. Pendapat ini dikuatkan oleh konsumsi listrik yang meningkat sangat tipis. Jika tahun 2005 konsumsi listrik meningkat 7,2% tahun lalu konsumsi listrik hanya meningkat 1% lebih. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur masih kesulitan.

Perkembangan ekonomi dua tahun terakhir membuat mereka yang berduit bertambah kaya. Dengan menanamkan dana di instrumen yang tepat di pasar modal, keuntungan yang diraih bisa di atas 20% setahun. Pada tahun 2006, indeks harga saham gabungan (IHSG) melesat 55%.

Tapi, kehidupan mayoritas rakyat justru tetap sulit. Industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja belum bangkit. Belum ada pabrik baru yang dibangun. Yang bertumbuh bagus adalah bisnis yang padat modal dan padat teknologi.

Kita bisa melihat betapa perusahaan seluler meraup keuntungan besar. Tahun ini, pelanggan seluler sudah di atas 70 juta, meningkat dari 62,5 juta pada akhir tahun 2006. Penggunaan seluler sudah sampai ke tingkat kecamatan, bahkan desa.

Perusahaan pertambangan dan migas membukukan laba besar seiring dengan kenaikan harga komoditas itu di pasar internasional. Perkembang-

an inilah yang membuat ekonomi, Indonesia kuartal pertama 2007 meningkat 6% dibanding periode yang sama tahun 2005.

Sungguh pun demikian, peningkatan konsumsi semen adalah berita positif. Dengan konsumsi yang meningkat, perusahaan semen terdorong untuk ekspansi dan itu berarti ada peningkatan kesempatan kerja. Perbaikan jalan raya dan pembangunan rumah tinggal juga membuka lapangan kerja baru.

Namun, kenaikan harga semen yang mengiringi peningkatan konsumsi semen adalah kabar buruk bagi rakyat menengah bawah yang sedang membangun rumah baru atau sekadar memperbaiki rumah lama. Kita berharap produsen semen tidak mesti menaikkan harga semen jika dengan tingkat harga lama pun mereka sudah untung.

Jumat, 15 Juni 2007

Bank Diimbau Lebih Berani Salurkan Kredit

Dalam situasi ekonomi yang masih rentan inflasi tinggi, bank sentral terus memangkas BI *rate* tanpa ragu. Setelah mencapai 8,50% awal bula ini, BI berencana menurunkan lagi bunga ke level 18% dalam beberapa bulan ke depan.

Tapi, langkah berani bank sentral ini tak diimbangi keberanian perbankan dalam melemparkan kredit. Dalam lima bulan pertama 2007, laju pertumbuhan kredit melambat. Para debitor enggan menggunakan dana bank yang dinilai masih terlalu mahal.

Terhitung sejak April 2006, bank sentral sudah menurunkan 4,25% BI *rate*. Namun, selama periode yang sama, penurunan bunga kredit hanya sekitar 2%. Sangat tidak signifikan dibandingkan dengan penurunan bungan acuan BI dan sangat tidak memadai untuk menggerakkan sektor riil.

Selama Januari–April 2007, kredit hanya bertumbuh 2,6% menjadi Rp813 triliun. Bila dalam delapan bulan ke depan pertumbuhan kredit sama dengan lima bulan pertama 2007, kredit tahun ini hanya meningkat 7,8%. Itu berarti lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit tahun lalu yang mencapai 13,9%.

Kredit perbankan pernah melaju hingga 27% tahun 2004, saat politik Indonesia dihebohkan oleh pemilu legislatif dan dua kali pemilihan

langsung presiden. Pada 2005, kredit tumbuh 24,3%, tetapi tahun 2006, kucuran kredit hanya meningkat 13,5% jauh dibawah target 18% yang sudah direvisi turun dari 20%.

Pada bank-bank besar, penurunan pertumbuhan kredit disebabkan juga oleh pelunasan. Gubernur BI Burhanudin Abdullah menyatakan, secara absolut kredit bank meningkat. Namun, pelunasan utang membuat peningkatan kredit tidak besar.

Para debitor kakap yang memperoleh dana dari pasar modal lewat obligasi, dalam dan luar negeri, langsung melunasi utang bank. Begitu pula debitor besar yang memperoleh pinjaman dana dari luar negeri. Kalangan bankirpun mengakui, seiring dengan derasnya dana jangka pendek yang masuk ke pasar modal, bank luar negeri juga gencar menawarkan pinjaman kepada korporasi di Indonesia.

Bank-bank negeri mengincar perusahaan besar Indonesia yang berbasis *nature recourse* seperti perusahaan CPO hulu hingga hilir, coklat *pulp* dan kertas, pertambangan, dan migas. Bank Mandiri kehilangan dua grup kakap, yakni Dombas Mas Kiani Kertas. Domba Mas bergerak di sektor petro kimia berbahan baku CPO. Perusahaan ini memiliki kebun sawit ribuan hektar. Perusahaan kosmetik internasional, P&G, telah mengikat kontrak dengan Domba Mas untuk menyerap semua produk CPO yang dihasilkan.

Dalam pada itu, bunga kredit saat ini yang masih sekitar 13% dianggap terlalu mahal oleh para debitor. Mereka bisa memperoleh dana murah dari pasar modal lewat penerbitan obligasi pada tingkat bunga 9-10%. Ada juga debitor yang berhasil mendapatkan pinjaman dari bank luar negeri dengan tingkat bunga 6-7%.

Dengan laju inflasi tahun ini yang diperkirakan mampu ditekan ke level 5-6%, suku bunga kredit mestinya bisa diturunkan ke level 9%. Saat ini memang ada bank yang memberikan bunga kredit 9%, tapi itu terbatas pada kredit kepemilikan rumah (KPR).

Sudah berulang kali para bankir dikritik karena ulah mereka yang terlalu mencari gampang. Dana yang dihimpun dari masyarakat dengan bunga murah, sekitar 4-5%, diparkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Mereka lebih mementingkan profit tanpa memperhitungkan nasib dunia usaha. Dengan menaruh dana di SBI, bank bisa memperoleh *spread* keuntungan 3-4% tanpa risiko apa pun. Sebagaimana Surat Utang Negara (SUN), SBI adalah instrumen *risk free*.

Dana yang disalurkan ke dunia usaha dipatok bunga tinggi. Data perbankan menunjukkan, sejak tahun 2001, *net interest margin* (NIM) perbankan terus meningkat. Jika tahun 2001 rata-rata NIM perbankan sebesar 4,1%, pada 2002 meningkat menjadi 4,6% dan pada 2003 mencapai 5,8%. sempat turun sedikit tahun 2004 ke level 5,6%, NIM kembali melonjak menjadi 5,8% tahun 2005. NIM sebesar itu masih bertahan hingga saat ini.

Di negeri tetangga seperti Singapura dan Malaysia, perusahaan Indonesia bisa memperoleh kredit dengan bunga 5-6%. Bank di negeri tetangga ini sanggup hidup dengan *spread* 3%. Meski *spread tipis*, mereka bisa meraup mendapatkan NIM sekitar 2%.

Dalam situasi ekonomi seperti ini, para bankir dituntut berbuat lebih, tidak sekadar meraup untung seraya menutup mata terhadap perkembangan nyata di sektor riil. Dalam jangka panjang, perbankan juga ikut rugi bila sektor riil terus terpuruk.

Para bankir acap berdalih, kucuran kredit yang meningkat pada saat dunia usaha tidak siap hanya membengkakkan NPL atau kredit bermasalah. Perbankan sudah berhasil menekan NPL dari 7,5% tahun 2001 menjadi 6,16% pada April 2007.

Kalangan bankir juga bisa beralasan bahwa undistributed loan saat ini mencapai Rp168 triliun. Ini membuktikan bahwa kredit yang sudah disetujui bank belum juga dipakai debitor.

Tapi, alasan undistributed loan sesungguhnya tidak terlalu jitu lagi. Kredit yang disetujui ini bukan hanya untuk satu tahun, melainkan untuk tiga-lima tahun. Karena itu, tidak fair menyodorkan *undistributed loan* sebagai bukti ketidakmampuan debitor menyerap kredit. Saat para bankir lebih berani menyalurkan kredit dengan segera menurunkan bunga kredit ke level satu digit.

Bisnis Indonesia

Senin, 11 Juni 2007, Tajuk Utama

Dilema Subsidi

Ini kabar baru yang mengagetkan: Pemerintah mengkaji kemungkinan mencabut subsidi untuk bensin jenis premium. Semangatnya baik,

menyehatkan anggaran. Tetapi hati-hati, semangat baik bisa berbuah 'bencana' manakala dilaksanakan dengan tidak bijaksana.

Jika itu terjadi, bisa jadi harapan baik saat ini berubah menjadi petaka. Betapa tidak. Tahun ini tampak di permukaan, dan sebagian kita rasakan, perekonomian mulai menggeliat; bergerak meskipun pelan. Pelan tetapi pasti.

Banyak kabar baik sekalipun masih terselip kabar kurang baik. Kabar baiknya, fundamental ekonomi berangsur-angsur menguat, tampak dari inflasi yang terus menurun, neraca pembayaran cukup kuat, dan cadangan devisa menanjak. Juga harga komoditas menguat stabil yang pada akhirnya mendongkrak ekspor, investasi mulai muncul, dan pasar finansial bergairah dengan rekor-rekor baru, baik untuk kurs rupiah maupun indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta.

Meski sektor rill masih menjadi sorotan, nyatanya banyak perusahaan merealisasikan aksi korporasi mereka tahun ini, dalam bentuk penambahan modal maupun ekspansi usaha. Kinerja perusahaan pada kuartal I/2007 umumnya juga relatif membaik. Semua itu sesungguhnya mencerminkan perbaikan di mikro, mengiringi stabilitas makro yang cukup terjaga. Semua itu mengembangkan optimisme, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dipasang dengan perkiraan cukup tinggi, sekitar 6,2%.

Memang, masih terselip kabar yang kurang baik, seperti angka kemiskinan masih tinggi dan pengangguran belum sepenuhnya terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Kabar kurang enak lainnya adalah instrumen fiskal tetap saja mandul, belum sanggup menjadi andalan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Tetapi kabar kurang baik itu seolah-olah mendapatkan kompensasinya, malahan seperti tenggelam di balik hiruk-pikuk indikator finansial yang terus-menerus membuat kejutan. Kini mulai muncul harapan agar indikator finansial yang kinclong itu, yang antara lain disumbangkan oleh arus deras modal portofolio-mencapai US\$52 miliar hingga Mei—dapat ditransfer ke pembiayaan usaha rill, manakala kian banyak perusahaan baik yang masuk bursa saham.

Karena itu, munculnya wacana mengenai rencana menghapuskan subsidi premium agak mengusik harapan yang mulai merebak tersebut. Pemerintah agaknya harus, tidak sekadar perlu, belajar dari pengalaman 2005. Ketika berwacana secara berkepanjangan rencana menaikkan harga

bahan bakar minyak (BBM), lalu direalisasikan pada 1 Oktober. *Beleid* itu ternyata membawa implikasi ekonomi yang buruk, pukulan telak bagi perekonomian sepanjang 2006.

Meskipun, sekali lagi, semangatnya baik, mengurangi subsidi untuk menyehatkan APBN, *beleid* itu memukul telak sektor usaha. Langkah itu memang membuat APBN seolah-olah sehat, defisit berkurang, tetapi fungsi utamanya untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi tetap tidak berkembang. Di situlah sebenarnya kegagalan manajemen fiskal pemerintah kala itu.

Kita memahami di situlah pemerintah menghadapi dilema yang tidak mudah. Kini, wacana kenaikan harga bensin mulai muncul ke permukaan.

Kebiasaan buruknya, begitu berwacana, lalu berkepanjangan dan menjadi kontraproduktif. Kita tentu tidak ingin tercebur ke dalam polemik yang berlarut-larut. Sebab pada akhirnya dampak psikologisnya jauh lebih besar.

Ketika kenaikan harga akibat pencabutan subsidi benar-benar jalan, kerugian ekonomi jauh lebih besar ketimbang asumsi-asumsi yang sudah diperhitungkan. Kita tentu tidak ingin terantuk pada batu yang sama untuk kedua kalinya.

Selasa, 12 Juni 2007

G-8 & Komitmen Pemanis

Pertemuan puncak delapan negara maju (G-8) baru saja usai. Selain jalannya sidang, media massa internasional juga memberitakan demonstrasi yang muncul, yang antara lain memprotes berbagai ketidakadilan global yang terjadi karena kebijakan negara-negara industri yang tidak peka terhadap kebutuhan global.

Sejumlah negara Asia memang mencatat kemajuan dalam pembangunan ekonominya. Namun, secara umum ketimpangan kesejahteraan antara negara kaya dan miskin semakin lebar, kerusakan lingkungan kian menjadi-jadi, begitu pula penyebaran wabah penyakit.

Dalam hal penyakit, salah satu isu yang disoroti G-8 adalah penanganan HIV/ AIDS. Berdasarkan data PBB, jumlah penderita penyakit yang merusak daya kekebalan tubuh itu mencapai 39,5 juta orang sampai

tahun lalu. Dari angka ini, tiga perempatnya berada di Afrika. AIDS telah menjadi salah satu pembunuh terbesar, langsung ataupun tidak langsung, di Benua Hitam itu.

Para pemimpin G-8 mengakhiri pertemuan di Jerman dengan kesepakatan memberikan bantuan peralatan kesehatan senilai US\$60 miliar dan rencana penghapusan utang 18 negara Afrika.

Masalah yang dihadapi Afrika bukan cuma soal buruknya tingkat kesehatan masyarakat, tetapi juga minimnya pendidikan, perang, genosida, kediktatoran, mismanajemen pemerintah kelebihan penduduk gagal panen, dan masih banyak lagi.

Abad teknologi informasi yang menawarkan begitu banyak peluang untuk maju, dan telah dengan cepat ditangkap oleh China, India, dan negara-negara Asia Timur, kelihatannya belum menyentuh Afrika. Citra benua yang lekat dengan kelaparan sampai sekarang belum juga lenyap.

Kita masih dapat menyaksikan lewat televisi gambar anak-anak Afrika yang mengalami malnutrisi parah atau orang-orang dewasa yang sekarat dengan tubuh kurus kering dan lalat merubungi tubuh-tubuh malang itu. Akar masalah AIDS di Afrika adalah kemiskinan.

Sudah sepatutnya kita semua mencari jawaban dari pertanyaan mengapa miliaran dolar AS bantuan yang dikucurkan oleh berbagai organisasi internasional ataupun donatur nonlembaga lainnya tidak mencapai target. Bantuan yang begitu banyak itu seolah-olah jatuh begitu saja ke lahan luas yang gersang, dan langsung lenyap tak berbekas begitu terserap oleh tanah.

Indonesia memiliki panyak pengalaman sebagai penerima bantuan asing untuk pembangunan. Memang ada manfaatnya, tetapi tak sedikit pula sisi negatifnya, yakni beban utang yang harus dipikul dari generasi ke generasi.

Kata 'bantuan' kerap kali memiliki makna yang menyesatkan. Masyarakat penerima bantuan seolah-olah mendapatkan sesuatu yang sifatnya gratis atau sangat murah. Padahal, itu adalah pinjaman/utang yang harus dibayar kembali.

Ada juga jenis bantuan yang ujung-ujungnya menguntungkan pihak donatur. Penerimaan bantuan harus membayar tenaga konsultan yang berasal dari negara-negara donor-biasanya *fee* mereka sangat tinggi—dan harus membeli bahan mentah untuk proyek pembangunan dari negara-

negara tersebut. Faktor ini juga yang barangkali membuat miliaran dolar AS bantuan ke Afrika tidak efektif.

Tidak tertutup kemungkinan kemiskinan di Afrika telah dimanfaatkan menjadi ajang pamer 'kemuliaan' hati para penyumbang. Jangan-jangan komitmen bantuan US\$60 miliar bagi benua itu merupakan 'permen' dari G-8 untuk meredam kritik tajam terhadap kelompok tersebut, yang kehadirannya dipandang sudah semakin tidak relevan dengan kebutuhan dunia saat ini.

Kamis, 14 Juni 2007

Kredit Macet Bank BUMN

Mengurusi kredit macet bank BUMN bukan pekerjaan mudah. Meski bankir-bankirnya memiliki keahlian yang mumpuni untuk mengurus aset bermasalah itu, tidak jarang soal teknis dan nonteknis masih menghambat.

Mulai dari ketidaklengkapan dokumen pendukung untuk mengeksekusi agunan yang dikuasai hingga debitor yang tidak dapat disentuh karena punya beking politik yang kuat, merupakan serba-serbi dalam penyelesaian kredit macet di bank pemerintah. Padahal, nilainya cukup besar sehingga hal itu sangat memengaruhi kinerja lembaga keuangan ini.

'Kebancian' ketentuan soal penyelesaian kredit macet di bank BUMN menjadi faktor dominan yang menyebabkan bank pemerintah sulit menyelesaikan kredit macetnya. Meskipun ada Ditjen Piutang dan Lelang Negara, Depkeu, yang mengurus piutang negara, lembaga ini ternyata tidak mudah menyelesaikan kredit macet di bank BUMN.

Fatwa Mahkamah Agung soal Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah menyebutkan piutang BUMN tidak dapat disebut sebagai piutang negara.

Upaya penghapusan dan penyelesaian kredit macet di bank BUMN sebenarnya bisa mengandalkan PP No. 33/2006 yang mengatur tentang tata cara penyelesaian utang bermasalah atau penghapusan piutang BUMN. Peraturan ini memungkinkan bank pemerintah menangani kredit macet yang akan dihapus bukukan secara sendiri, dan tidak perlu diserahkan kepada Ditjen Piutang dan Lelang Negara.

Sayangnya, sejumlah lembaga negara dan instansi penegak hukum belum memahami PP tersebut sehingga penerapannya pun menjadi tidak mudah.

Alasan yang mengemuka bahwa, utang piutang antara bank dan debitor merupakan cakupan masalah hukum perdata yang telah diatur secara rigid dalam KUH Perdata. Kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan dengan PP, maka tidak heran bila para penegak hukum dan lembaga peradilan lebih berpedoman pada KUH Perdata dalam menangani kredit macet bank BUMN.

Meskipun Menteri Keuangan telah mengeluarkan Permenkeu No. 87/2006 yang mengatur teknis pelaksanaannya, ketentuan ini ternyata kalah bila dilawankan dengan UU tadi. Restrukturisasi kredit bank pemerintah juga masih terkendala karena belum dicabutnya SK Menkeu No. S-26/MKOL/2000 yang mengharuskan adanya Komite Kebijakan Sektor Keuangan untuk kredit di atas Rp1 trillun. Kondisinya menjadi tambah rumit ketika para pengacara debitor nakal lebih suka menarik masalah ini ke wilayah perdata.

Para penegak hukum pun sering rancu dalam menafsirkan kekayaan negara dengan modal bank BUMN, sehingga saat menggiring masalah itu dengan memakai UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal.

Melihat kondisi ini, kiranya perlu ditata ulang aturan yang mendasari proses penyelesaian kredit macet bank BUMN, mulai dari struktur peraturannya (UU, PP, hingga Kepmenkeu), serta mencabut ketentuan yang bisa menghambat proses tersebut. Bila masalah ini bisa diatur lewat UU maka masalahnya bisa bersifat *lex specialist* jika berhadapan dengan masalah perdata.

Masalah ini harus disadari oleh pemerintah. Lewat koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Polhukam, aturan itu harus diselaraskan dengan baik.

Bila aturan hukumnya sudah ditata rapi, maka proses penyelesaian kredit macet bank pemerintah bisa lebih cepat dan optimal. Bila borok yang ada di bank BPMN bisa dibuang, maka kinerjanya bisa lebih baik dan mampu menggerakkan sektor riil lebih cepat sehingga bank pelat merah dapat menyumbang pemasukan beruntung dividen lebih besar kepada negara.

Jumat, 15 Juni 2007

Bersih dari Teroris

Sebuah stigma yang memilukan bila Indonesia disebut sebagai negara sarang teroris. Tetapi itulah yang terjadi sejak tragedi Bom Bali I lima tahun lalu yang menewaskan ratusan orang, termasuk warga asing.

Sejak itu aksi pengeboman yang mematikan terjadi silih berganti di negeri ini, bahkan hingga jantung Jakarta. Kondisi ini seolah-olah makin memperkokoh reputasi runyam Indonesia dalam hal penegakan hukum dan keamanan.

Daftarnya sungguh mengerikan. Ada bom Kuningan, bom Bali II, bom J.W. Marriott, dan berbagai aksi teror yang menggunakan bom sebagai alat perjuangan mereka.

Sejak tragedi 11 September 2001 di AS, tatanan global memang berubah total. perburuan tanpa akhir terhadap teroris di seluruh dunia yang dicanangkan presiden AS George W. Bush akhirnya justru menimbulkan medan perang, yaitu perang terhadap terorisme dengan implikasi yang masih terasa menyengat sampai saat ini, termasuk di Indonesia.

Akibatnya, di mana-mana kita mendengarkan dari berbagai laporan ataupun kesaksian bahwa aksi mereka yang disangka teroris itu guna membalas kesombongan AS, ataupun para sekutunya. Hal ini karena dianggap telah bertindak semena-mena sebagai polisi dunia.

Dua nama pun muncul ke permukaan sebagai musuh utama dunia dalam melawan terorisme. Mereka adalah Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah, berikut jaringan kerja serta sel-sel mereka yang diklaim AS ataupun sekutunya, berkembang biak dengan subur di negara-negara tertentu, tak terkecuali di Indonesia.

Meski Jakarta kerap dituduh terlalu mengikuti agenda pemberantasan terorisme yang didengungkan Gedung Putih, bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak memiliki kemampuan menumpas aksi teroris dengan caranya sendiri. Kita rasanya tidak perlu mencontoh AS yang ternyata terbukti memiliki penjara rahasia di sejumlah negara.

Presiden Bush toh harus rela menuai kecaman dunia setelah terbukti bahwa keberadaan penjara rahasia dinas rahasia AS (CIA) di Teluk Guantanao tidak lebih sebagai tempat penyiksaan mereka yang disangka teroris tanpa melalui proses hukum.

Ini bukan berarti kita membela aksi terorisme. Tidak ada tawar-menawar terhadap pelaku aksi teror yang menimbulkan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa, seperti yang terjadi sejak tragedi Bom Bali I. Tetapi caranya tentu saja bukan seperti *cowboy* menyelesaikan persoalan. Bukankah ada hukum yang memagari kita untuk tidak menabrak rambu-rambu hak asasi manusia?

Karena, keberhasilan Mabes Polri dalam meringkus Abu Dujana alias Yusron—salah seorang gembong teroris paling dicari aparat setelah Noordin M. Top—di Banyumas, Jawa Tengah, patut diacungi jempol. Penangkapan hidup-hidup pria yang dituding sebagai aktor intelektual serangkaian aksi pengeboman di Tanah Air itu justru mempermudah tugas Polri untuk menenciduk jaringan Abu Dujana. Bahkan, hingga penangkapan Noordin M. Top, rekan gembong teroris Azahari Husin yang tewas tertembak saat digerebek aparat di rumah persembunyiannya di Batu, Malang; dua tahun lalu.

Stigma sebagai negara sarang teroris sempat membuat negeri ini merana. Ekonomi berjalan tertatih-tatih karena industri pariwisata hanya gigit jari akibat sepihnya kunjungan wisatawan mancanegara yang takut menjadi korban pengeboman. Bukan hanya itu, investor asing pun kecut nyalinya berusaha di Indonesia.

Kini, suasana memang terasa makin kondusif. Tetapi Noordin M. Top masih leluasa berkeliaran sehingga sewaktu-waktu bisa saja beraksi kembali jika aparat lengah.

Sungguh mahal harga yang harus dibayar bila perekonomian nasional kembali terseok-seok hanya karena kita tidak bisa menjaga rasa aman lantaran, terus-menerus diganggu teroris.

Rabu, 20 Juni 2007

Harta Negara Menguap

Badan Pemeriksa Keuangan kembali melaporkan penyusutan harta negara dari tahun ke tahun. Nilai penyusutan kekayaan negara itu cukup fantastis. Jika pada akhir 2005 nilai aset negara mencapai Rp1.219 triliun, akhir tahun lalu menjadi Rp1.173 triliun.

Lalu nilai kewajiban negara pada kurun waktu itu justru bertambah, dari Rp1.330 triliun, menjadi Rp1.342 triliun. Dengan demikian, nilai harta

bersih (total aset dikurangi kewajiban), kian bertambah bolong, dari Rp110 triliun menjadi Rp69 triliun. Walhasil, secara keseluruhan nilai harta negara menyusut Rp59 triliun dalam satu tahun saja.

Angka-angka tersebut bukan isapan jempol. Sumbernya resmi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan hasil audit itu telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.

Masih dari audit BPK, kita juga mendengar adanya rekening liar yang tersebar di banyak departemen. Hingga tahun lalu, jumlah rekening liar mencapai 5.295 rekening. Tahun lalu saja, BPK menemukan rekening liar sebanyak 3.195 rekening, senilai Rp17,6 triliun.

Di instansi mana saja rekening liar itu ditemukan? Nah, ini dia. Temuan terbanyak ada pada Departemen Hukum dan HAM (82 rekening), disusul Departemen Kesehatan (47 rekening), Pertahanan (44 rekening) dan Departemen Agama sejumlah 23 rekening.

Selebihnya tersebar di banyak departemen, yang ironisnya tiga diantaranya ditemukan di Departemen Keuangan, yang semestinya menjadi institusi yang paling tertib soal rekening pemerintah ini.

Nilai masing-masing rekening itu tidak tanggung-tanggung. Di Departemen Hukum dan Ham saja, rekening liar itu bernilai Rp49,48 miliar. Di Departemen Agama, sekalipun jumlah rekeningnya tak sebanyak di Departemen Pertahanan atau Depkes, nilainya mencapai Rp46 miliar. Bandingkan dengan jumlah rekening di Dephan dan Depkes, tetapi nilainya masing-masing hanya Rp14miliar dan Rp19 miliar.

Yang menonjol adalah di Depkeu dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Meskipun jumlah rekeningnya cuma tiga dan satu, tetapi nilainya masing-masing Rp7 miliar dan Rp5 miliar.

Lalu kita bertanya: Adakah hubungan penyusutan harta negara dengan keberadaan rekening liar yang bertebaran di banyak departemen itu? Mungkin ada, mungkin pula tidak.

Tetapi, kita tidak melihat pentingnya mencari hubungan itu. Kita ingin melihat pemerintah memiliki kesungguhan hati untuk mengatasi penyebab susutnya harga negara tersebut, sekaligus menertibkan keberadaan rekening-rekening liar itu.

Kita ingin negeri ini dikelola benar-benar sesuai prinsip *good governance*. Artinya, manajemen aset negara tak hanya sekadar tertib, tetapi nilai aset negara itu harus terus berkembang dan bertumbuh karena

pengelolaannya rapi, baik, dan benar. Selain itu, tak ada yang dicuri oleh birokrasi atau sistem birokrasi yang memungkinkan terjadinya pencurian aset negara.

Tentu itu bukan perkara mudah. Tetapi, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kita bisa, kalau kita mau. Kuncinya, seberapa besar komitmen penyelenggara negara, mulai dari Presiden dan para pembantunya di kabinet, bersedia memulainya dari sekarang.

Kita sudah mendengar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai pengelolaan aset negara itu. Kita juga mendengar Menteri Keuangan akan mengatur penertiban rekening liar tersebut. Kita ingin kedua tekad sekadar janji surga, seperti lima paket kebijakan ekonomi yang telah keluar sebelumnya, tetapi hilang satu-satu' dalam perjalanan *delivery*-nya.

Berita Kota

Selasa, 22 Mei 2007, Bidik

Senjakala Reformasi

Mengukur arah dan tujuan reformasi menjadi titik evaluasi kita setiap tahun. Kita pertanyakan apa yang telah kita peroleh setelah reformasi bergulir sembilan tahun sejak tumbanganya rezim Soeharto, 21 Mei 1998. Pertanyaan ini membawa kita pada perdebatan dan polemik yang berkepanjangan. Ada yang kecewa karena menilai arah reformasi telah melenceng. Pendapat kedua melihat reformasi telah membawa perubahan meski belum tuntas benar.

Reformasi adalah amanat kebangsaan kita bersama. Kita telah berikrar untuk membenahi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara lebih baik dari era-era sebelumnya. Pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, tidak lagi berkarakter otokrasi. Lembaga-lembaga politik menjalankan peran dan fungsinya selurus-lurusnya sesuai dengan amanat konstitusi. Berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas agar kemiskinan dan kemelaratan terjauh dari kehidupan bermasyarakat. Keinginan yang terbesar kita juga terfokus pada rasa keadilan dan tegaknya hukum. Semua itu adalah tuntutan atas kesadaran bersama bahwa negeri ini tidak boleh lagi men-

jadi milik orang-orang berkuasa, elit pemerintah, dan partai politik. Melainkan milik rakyat karena rakyatlah yang berkuasa atas kedaulatan negeri ini.

Begitulah ekspektasi kita. Kita pandang reformasi dari segala sudut. Ada yang sudah berhasil dan mengubah keadaan. Ada juga yang masih terseok-seok di tengah jalan.

Membeberkan hal-hal yang belum berhasil tak harus dinilai sebagai sikap pesimistis dan hanya bertumpu pada sisi negatif saja. Sebaliknya mengakui keberhasilan tak harus pula membuat kita berpuas diri karena tujuan ideal reformasi dengan segala amanatnya belum sampai pada terminal akhir. Mengawal dan menjaga arah dan tujuan reformasi adalah tugas kita bersama. Resistensi yang muncul seyogianya ditafsirkan sebagai reaksi wajar yang bertujuan agar para mandataris reformasi berada dalam atmosfer reformasi sepanjang waktu. Kita khawatir jika sudah tidak ada lagi yang bersikap kritis dan menganggap reformasi telah dilaksanakan, cepat atau lambat kita akan menyambung tali sejarah kelam masa silam. Ini yang tidak diharapkan. Suara kritis kalangan mahasiswa dan pemuda dalam *me-review* jalannya reformasi setelah sembilan tahun ini kita posisikan sebagai bentuk kepedulian mereka atas visi masa depan bangsa. Kita semua *care* karena harapan masa depan yang lebih baik menjadi tanggung jawab bersama tidak perlu saling menyalahkan. Yang dibutuhkan saat ini adalah saling dukung untuk membenahi yang belum beres.

Titik tolak kepedulian itulah yang menjadi pusat dari segala perhatian kita saat ini. Kita meminta kepedulian semua pihak untuk bersama-sama menjalankan amanat reformasi secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Tidak mudah memang menuntaskan apa-apa yang telah diamanatkan reformasi, tetapi setidaknya kita tetap berada dalam pusaran amanat itu. Memaknainya jelas dengan sikap tegas, tegas dalam tindakan dan implementasi. Ketika kita melenceng dan serta merta melakukan pembenaran atas tindakan yang diklaim sebagai bagian dari amanat reformasi, kita akan celaka. Isyarat senjakala reformasi menghantui kita semua jika retorika pembenaran sudah membabibuta.

Memenuhi tuntutan reformasi tak semudah dibayangkan. Ketika orang memulai mengalihkan perhatian pada masa sebelumnya dan menganggap Orde Baru jauh lebih baik, kita berharap isyarat senjakala reformasi tidak terjadi. Sekali lontaran asumsi itu adalah ungkapan kritis

untuk memecut kita semua agar segera melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

Selasa, 26 Juni 2007

Inti Masalah

Sinisme ini mestinya membuat kita instropeksi. Apapun bisa dikerjakan oleh bangsa ini, kecuali apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kritik dan otokritik buat kita semua. Harus kita akui dalam banyak hal kita memang tidak pernah fokus, baik terhadap apa yang menjadi kewenangan kita maupun dalam memahami dan memecahkan persoalan. Implikasinya, kita terus-menerus terjebak pada masalah yang sama sekaligus memproduksi masalah baru. Masalah tak terpecahkan, yang muncul justru masalah baru yang tak kalah memusingkan.

Ketika Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri berhasil meringkus Abu Dudjana beserta anak buahnya, sebagian besar masyarakat kita memberikan apresiasi yang tinggi terhadap prestasi tersebut. Berita ini serta merta mengalihkan perhatian publik pada polemik panas soal Iran dan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Interpelasi Iran yang sempat menjadi *hotline* politik tiba-tiba tergeser setelah Mabes Polri mengumumkan sukses penangkapan gembong teroris tersebut. Perhatian publik beralih ke soal terorisme.

Pergeseran perhatian atas informasi lazim terjadi dan merupakan hal yang normal. Menjadi tidak normal, kalau peristiwa itu diciptakan untuk mengalihkan perhatian dengan tujuan menghindarkan kristalisasi perhatian yang dianggap bisa mengganggu dan mengancam stabilitas politik elite negara. Gelagat dari semua ini bersumber pada situasi. Bom nyaris tidak terdengar, tetapi sekonyong-konyong polisi meningkatkan intensitas perhatian pada terorisme di dalam negeri. Opini orang pun kemudian terfokus pada dugaan tertentu, ada apa di balik operasi antiterorisme yang dilakukan polisi. Spekulasi demi spekulasi mencuat, lantas orang mencari kedekatan atas tindakan penangkapan pelaku teroris tersebut.

Dulu hal-hal seperti ini menjadi santapan sehari-hari anak-anak bangsa. Rezim Orde Baru begitu piawai dalam menciptakan isu di luar isu sentral yang sedang berkembang. Tak hanya itu, fokus masalah bisa

dibelokkan ke masalah yang tidak substantif. Rekayasa suatu isu dimunculkan biasanya ketika suhu politik sedang memanas. Dalam konteks terorisme dan penangkapan pelaku teror kita menangkap ada pergeseran fokus. Fokus utama digeser ke soal prosedural dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tujuannya untuk menghilangkan esensi masalah.

Cara-cara untuk menggiring dan menciptakan opini baru bukan hanya terjadi di negara kita. Di Amerika Serikat, Presiden W Bush paling getol melakukan rekayasa isu untuk mendukung kebijakannya atau menggiring pengalihan perhatian atas kritik yang kian menguat. Kita tidak ingin menduga ada apa dibalik penangkapan Abu Dudjana. Bagi kita jelas, terorisme di negeri ini tindakan selalu bermotif dan nirpamrih, wajar kalau orang mencoba menerka dan menduga ke arah mana tindakan itu ditujukan.

Ketika musim bom begitu marak, dan menunjukkan intensitasnya ketika mantan Presiden Soeharto di bidik untuk diajukan ke muka hukum, orang dengan cepat bisa menebak siapa di balik pelaku ledakan itu. Ketika musim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan sepak terjang penegakan hukum dan membidik orang-orang tertentu, publik pun dengan mudah menemukan jawabannya.

Berulang kali publik menyaksikan sendiri hubungan absurd antara bom dan kepentingan di balik ledakan itu. Tetapi, kita tidak pernah tahu apakah dugaan itu benar atau tidak, karena tidak pernah terungkap secara gambling. Mengapa karena kita tidak pernah fokus dalam menyelesaikan masalah. Kita lebih suka mencari-cari masalah di balik masalah yang sudah ada. Dari tumpukan persoalan absurd, tetapi sarat unsur kebetulan ini tampaknya wajar kalau berkembang kecurigaan ada skenario di balik semua ini.

Rabu, 27 juni 2007 (5)

Belalai Dua Parpol

Kehidupan politik pada umumnya bermakna siapa dapat apa. Pendapat Harold Lasswell, ilmuwan politik asal Amerika Serikat, itu serta merta mengemuka ketika jagat politik di negeri ini dikejutkan dengan manuver yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dan Partai Golongan Karya (Golkar). Dua partai besar yang secara ideologis

sama, tetapi berbeda dalam praktis politik, sepakat untuk berkoalisi dan bekerja sama dalam menghadapi Pemilu 2009.

Sepanjang kita bisa mengikuti, koalisi ini memang agak aneh. PDIP memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah, sedangkan Golkar bagian dari *the rulling party*, partai mendukung pemerintah. Perbedaan sikap dan *platform* tidak menjauhkan kedua partai untuk menjajaki atau merintis kerja sama politik. Bisa dipahami, karena politik tak mengenal musuh atau teman abadi. Sejauh ada kesamaan kepentingan, tujuan. Dan materi yang bisa dibagi-bagi, perbedaan menjadi tidak berarti.

PDIP dan Golkar sudah pernah menjalin kerja sama politik. Kita masih ingat bagaimana padunya kerja sama kedua partai dengan kedua belalai yang sangat kuat ini saat melengserkan Presiden Abdurahman Wahid (2001). Aliansi taktis politik itu dikembangkan lebih kuat lagi ketika Pemilu Presiden 2004. Partai Golkar mendukung Megawati Soekarnoputri-KH Hasyim Muzadi sebagai capres-cawapres yang diusung PDIP. Kerja sama pertama berlangsung mulus, sedangkan aliansi taktis politik kedua berakhir pahit. Megawati-Hasyim Muzadi dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang didukung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partal Amanat Nasional, dan partai-patrai kecilnya. Puncak dari kehancuran kerja sama politik itu terjadi setelah pucuk pimpinan Partai Golkar diambil alih Jusuf Kalla dari tangan Akbar Tanjung. Kalau kali ini kedua partai mencoba merajut kembali aliansi taktis politik yang sempat robek tahun 2004, bisa diduga kesamaan kepentinganlah yang menyatukannya.

Kepentingan seperti apa yang menyatukan kedua partai? Kita menduga bukan faktor kesamaan ideologis dan spirit kebangsaan yang mengikat kedua partai menggalang koalisi. Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa bisa disertakan sebagai anggota koalisi, karena kedua partai ini memiliki kemiripan ideologi dengan PDIP dan Golkar. Tetapi, mengapa PKB dan PAN tidak diajak berkoalisi? Dalam hemat kita, aliansi taktis strategis PDIP-Golkar ini tujuannya jangka pendek dan pragmatis. Bukan koalisi ideologi dan jangka panjang. Karena jangka pendek, kita bisa menebak arah dan tujuan koalisi ini. Eksplisit Surya Paloh, penggagas aliansi taktis politik Golkar, telah menyebutkan kerja sama ini untuk Pemilu 2009.

Kepentingan jangka pendek Pemilu 2009 hanya target antara. Kita menduga, kedua partai ini ingin kekuatan dominan yang mendominasi seluruh proses pilkada. Dengan beraliansi dan berkoalisi, PDIP-Golkar ingin menunjukkan belalai politiknya membendung sepak terjang kuda hitam politik bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai partai baru yang menunjukkan *performance* baik, bersih, dan antikorupsi, calon-calon yang dijagokan mengalahkan calon PDIP dan Golkar.

Terlepas dari tujuan di balik koalisi ini, kita melihat apa yang sedang dirintis PDIP dan Golkar mestinya tidak terbatas pada tujuan jangka pendek. Alangkah elok dan elegannya kalau koalisi ini diarahkan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. Untuk berharap seperti itu tampaknya muskil, selain stereotipe politik keduanya berbeda, PDIP berpikir dua kali untuk menjadi bagian dari pendukung Orde Baru karena Golkar diasosiasikan sebagai partai pendukung Orde Baru. Perbedaan latar belakang dan idiom inilah yang akan menjadi duri koalisi kedua partai. Kita prediksikan koalisi ini tidak bakal berumur panjang karena banyak faktor yang tidak mungkin disatukan.

Senin, 03 Juli 2007

Presiden juga Manusia

Perseteruan hebat antara mantan wakil ketua DPR RI Zaenal Ma'arif dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai merambah ranah hukum. Orang nomor satu di republik ini, akhirnya memenuhi janjinya untuk melaporkan Zaenal Ma'arif ke polisi, Minggu (29/7).

Menariknya, SBY sendiri yang datang membuat laporan kepada petugas di sentra pelayanan kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya. Tampak juga sang istri tercinta Ny. Ani Yudhoyono yang mendampingi SBY saat membuat laporan tersebut.

Usai memberikan laporan, berkali-kali SBY menyatakan bahwa dirinya datang ke Polda Metro Jaya bukan dalam kapasitasnya sebagai presiden, melainkan sebagai pribadi dan sebagai warga Negara Indonesia. Lantaran itu, dalam membuat laporan tersebut, SBY tidak menyertakan Kapolri dan Jaksa Agung.

Bukan hanya disampaikan secara lisan, sikapnya sebagai pribadi dan warga negara biasa ini ditunjukkan SBY dengan tidak memberlakukan

aturan protokoler di kantor polisi tersebut. Lantaran itu, para wartawan pun langsung bisa melakukan tanya jawab dengan SBY tanpa harus mengikuti serangkaian aturan protokoler yang biasa dilakukan di kantor presiden.

Bagi bangsa ini, langkah presiden SBY tersebut menjadi kian menarik lantaran baru kali ini lah dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, seorang kepala negara datang langsung ke kantor polisi untuk memberikan laporan tanpa harus di barengi dengan tetek bengkek agenda protokoler. Mengenakan kemeja batik warna coklat, SBY sendiri yang menyambangi gedung SPK Polda Metro Jaya dan berhadapan dengan polisi yang berpangkat rendah. Bukan diterima oleh petinggi Polda Metro Jaya sebagaimana pernah dilakukan mantan presiden yang lalu.

Kedatangan SBY ke SPK Polda Metro Jaya adalah untuk melaporkan Zaenal Ma'arif yang dinilainya telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan melakukan fitnah terhadap diri SBY sebagai pribadi. Menurut SBY, pernyataan Zaenal Ma'arif yang mengatakan jika dirinya telah menikah dan dikaruniai dua anak sebelum menjadi taruna militer sangat tidak benar.

SBY menilai, pernyataan Zaenal Ma'arif itu fitnah belaka. SBY menyayangkan sikap Zaenal yang melakukan manuver politik kurang baik dengan melancarkan serangan kepada dirinya tanpa dasar dan bukti. SBY pun menganggap fitnah itu sama dengan pembunuhan karakter (*character assassination*).

Ya, fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan. Sepanjang peradaban manusia, sudah terlalu banyak contoh nyata akan kehancuran suatu bangsa yang dipicu oleh fitnah, hasutan, dan aneka pernyataan yang dilontarkan tanpa dasar dan bukti. Yang menjengkelkan, meski tak berdasar dan tanpa dilengkapi bukti-bukti akurat, acap dari kita yang mudah percaya akan kabar tak berujung pangkal tersebut. Bila demikian, hancurlah bangsa ini.

Fitnah itu pula yang membuat jengkel SBY. Lantaran itu, ia pun mengambil langkah tegas dengan melaporkan Zaenal Ma'arif ke polisi. Langkah itu ditegakkan demi tegaknya hukum dan agar tidak terjadi orang-orang tanpa dasar dan bukti melakukan fitnah secara serampangan. Selain itu, demi kehormatan dan harga diri. Demi hukum, semua orang harus dilindungi hak dan harga dirinya.

Sikap yang diperlihatkan Presiden tersebut patut kita jadikan pembelajaran sekaligus contoh. Bahwa hukum memang tidak pernah memandang siapa pun; semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality beyond the law*).

Pada lapis lain, tentunya kita juga berharap agar pihak kepolisian yang menerima laporan SBY berlaku profesional dan proporsional. Jangan mentang-mentang yang melaporkan seorang Presiden, maka pengusutannya pun masuk kategori VVIP.

Rabu, 11 Juli 2007

Borobudur

Kita bangga ketika Candi Borobudur ditetapkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia (*The Seven Wonders of World*). Penetapan itu membawa implikasi ekonomi bagi kita, masyarakat dunia berbondong-bondong datang menyaksikan warisan peradaban tinggi bangsa Indonesia masa lalu itu. Ketika candi Borobudur terlempar dari kategori sebagai Tujuh Keajaiban Dunia yang baru oleh *The New Open World Corporation (NOWC)*, kita patut cemas karena konsekuensinya juga berkaitan dengan ekonomi, dunia pariwisata kita.

Baru-baru ini NOWC mengumumkan, Tujuh Keajaiban Dunia yang baru. Ketujuh keajaiban itu masing-masing adalah Tembok Besar (Cina), Petra (Jordania), Patung Kristus Sang Penebus (Brazil), Machu Piccu (Peru), Taj Mahal (India), Chitzen Itza (Meksiko), dan Koloseum Roma (Italia). Bersama Piramid (Mesir), Borobudur kehilangan 'keajaibannya' di mata 100 juta responden yang diacak oleh NOWC. Hasil polling NOWC yang disponsori kurator museum Bernard Weber itu serta merta mengundang reaksi keras dari Mesir. Tak hanya Mesir, UNESCO yang berkompeten mengurus warisan budaya dunia juga meragukan hasil *polling* tersebut. Bagaimana dengan kita?

Kita pun seyogianya bersikap seperti pemerintah Mesir. Bereaksi sekaligus memberikan apresiasi bandingan untuk tidak sekadar menerima begitu saja hasil *polling* tersebut. Dari sisi mana pun Borobudur memiliki kualifikasi peradaban kuno yang mengagumkan, merefleksikan kecanggih-

an budaya masa lalu setara dengan warisan-warisan budaya dunia lainnya. Subjektivitas kita berdasar fakta sosio-historis yang terpantul pada candi kebanggaan Indonesia dan dunia itu.

Bersikap yang dipandang bijak tentu tidak sekadar menyesalkan dan menggugat. Tetapi, bagaimana kita menangkap *blue print* (cetak biru) di balik hasil *polling* yang tidak menguntungkan bagi kita tersebut. Ke dalam kita melakukan koreksi untuk mempertajam *sense of marketing* dan melakukan pembenahan sehingga Candi Borobudur dan dunia pariwisata kita tetap mendapat tempat di hati masyarakat dunia. *Sense of marketing* ke luar memegang peran amat vital. Pemerintah perlu menggalakkan lagi rangkaian promosi ke mancanegara karena kita masih meyakini bahwa Candi Borobudur tetap menjadi alternatif tempat tujuan wisata domestik dan luar negeri.

Bisa saja kita menghibur diri dengan berpegang pada pernyataan UNESCO yang tidak begitu ambil pusing dengan pengumuman NOWC. Toh, misalnya sampai saat ini pun Candi Borobudur tetap berada di jajaran 12 warisan budaya dunia lainnya dan dikategorikan sebagai keajaiban yang terlupakan (*Forggotten Wonders*). Tetapi, cukup arifkah kita kalau hanya bersandar pada realitas itu dan bersikap tak acuh? Dalam perkembangan pasar pariwisata dunia yang kian kompetitif, kita menangkap isyarat itu di balik pengumuman NOWC. Dalam Bahasa lain kita melihat bahwa ada sinyal yang mengharuskan kita meningkatkan *sense of professionalism* dalam menangani dunia pariwisata jika tidak ingin kalah bersaing dengan warisan budaya lainnya.

Kita tidak harus berkecil hati kalau masih ada keinginan untuk melakukan lompatan besar menjadikan dunia pariwisata dan Candi Borobudur tidak lagi sebatas keajaiban yang terlupakan. Kita satukan langkah, pikiran dan tindakan nyata untuk menyongsong perubahan yang lebih baik. Kita optimalkan lagi Festival Borobudur hingga masuk sebagai kalender kunjungan wisatawan mancanegara.

Suara Pembaruan

Senin, 11 Juni 2007, Tajuk Rencana
Interpelasi dan Kenegarawanan

Pekan lalu, rakyat Indonesia kembali menonton sepak-terjang dan ulah para pemimpin politik. Tontonan politik itu terutama ditampilkan para wakil rakyat di gedung MPR/DPR Senayan. Tontonan politik yang lain ditunjukkan Presiden Yudhoyono saat menggelar jumpa pers di Kantor Presiden.

Kedua tontonan itu berawal dari dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1747 tentang persoalan nuklir Iran. Keputusan pemerintah itu ditentang sebagian anggota masyarakat dan direspons oleh DPR. Sejumlah anggota DPR menggalang dukungan untuk menggunakan hak interpelasi. Penggunaan hak itu diagendakan dalam rapat paripurna.

Dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR disebutkan sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebetulnya, tidak ada yang istimewa dari penggunaan hak interpelasi. Beberapa kali DPR menggunakan hak itu dan tak ada dampak signifikan pada Presiden, meskipun pernah tercatat, penggunaan hak interpelasi berujung pada *impeachment* (pemberhentian) Abdurrahman Wahid, sebagai Presiden Keempat Republik Indonesia.

Dalam situasi politik yang penuh persaingan di antara elite, peluang sekecil apa pun bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik. Begitu pula yang terjadi saat ini. Ada pesan yang kuat bahwa interpelasi hanya merupakan pintu masuk untuk menjatuhkan Presiden Yudhoyono.

Dalam Tatib DPR memang disebutkan penggunaan hak interpelasi bisa berlanjut pada hak menyatakan pendapat. Apabila kemudian DPR menyatakan bahwa Presiden tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat itu, maka DPR dapat menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR.

Pesan yang kuat bahwa interpelasi hanya merupakan pintu masuk bagi *impeachment* juga mulai terlihat pada usul penggunaan hak

interpelasi atas kasus Lumpur Lapindo. Kalau interpelasi atas resolusi DK PBB masih dianggap berada di awing-awang, maka untuk kasus Lapindo, sudah dipastikan lebih membumi karena menyangkut penderitaan ribuan warga di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam relasi politik antara Presiden dan DPR, perlu dikedepankan sikap kenegarawan. DPR dan Presiden tidak perlu saling mengotot. DPR ingin Presiden hadir sendiri untuk memberi jawaban atas interpelasi, tetapi Presiden bersikeras mewakilkannya kepada para menteri yang notabene pembantu Presiden dan memang dimungkinkan oleh Tatib DPR.

Dalam kasus interpelasi soal Iran, DPR-lah yang harus mengalah. Persoalan nuklir Iran jauh dari kepentingan rakyat Indonesia. Masih banyak persoalan di negeri ini yang harus diselesaikan dan membutuhkan penanganan segera, tapi kok sempat-sempatnya DPR membuang energi mengurus persoalan nuklir yang berada nun jauh di sana. DPR harus berbesar hati menerima para pembantu Presiden untuk mendengarkan alasan pemerintah mengambil kebijakan itu. Kalau belum dijawab saja, DPR sudah apriori, hal itu jelas menunjukkan keinginan kuat menjatuhkan Presiden, tanpa alasan yang substantif.

Tetapi kalau interpelasi kasus Lapindo disetujui dan sampai ke rapat paripurna, tidak ada salahnya Presiden Yudhoyono datang sendiri untuk menerangkan kebijakan pemerintah. Kasus Lapindo telah menyengsarakan sebagian rakyat dan Presiden seharusnya ikut bertanggung jawab. Presiden juga harus menunjukkan sikap kenegarawanannya. Sikap kenegarawan yang selalu ditonjolkan dalam setiap relasi politik akan membuat kehidupan demokrasi di negeri ini menjadi lebih indah.

Selasa, 12 Juni 2007

Impor Benih Memalukan

Kita patut bersedih karena sebagai negara agraris yang sejak masa lalu terkenal dengan berbagai produk pertanian, dalam waktu dekat akan mengimpor benih padi dari Tiongkok. Kita terpaksa menundukkan kepala karena malu memiliki departemen pertanian dan perguruan tinggi pertanian terkemuka yang ternyata hasilnya hanya jago mengimpor berbagai komoditas penting.

Balai-balai penelitian dan pengembangan benih yang banyak terdapat di Tanah Air ternyata tak mampu memenuhi kebutuhan benih. Seharusnya kita merasa bangga memiliki berjuta hektar lahan sangat subur dan petani-petani andal yang bisa mengolah lahan gersang menjadi lahan produktif, terutama jika ada jaringan irigasi yang bisa mengairi kebun, sawah, dan berbagai tanaman pangan.

Transmigran yang dikirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, berhasil mengolah sawah dengan keringat bercucuran, mungkin juga dengan darah dan air mata karena lokasinya yang sungguh jauh dari layak untuk dihuni manusia. Lahan-lahan dan hasil tani menghidupi banyak keluarga petani dan masyarakat yang sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok.

Saat ini hampir semua dari 220 juta penduduk Indonesia sudah dibiasakan mengonsumsi beras, sementara produksi padi di dalam negeri tidak bisa mengimbangi, produksi benih berkualitas pun tak sesuai harapan. Alasan yang selalu kita dengar selalu klise, yakni tak ada dana dan sarana memadai. Sementara itu impor beras bisa jalan terus, dengan dana tak terbatas.

Tahun ini, pemerintah sudah memberi izin impor 1,5 juta ton beras, dan bersiap mengeluarkan izin tambahan 500.000 ton. Bertahun-tahun kita mengimpor beras, juga komoditas penting dan strategis, seperti jagung, gula, kedelai, gandum, daging, garam, dan banyak lagi. Sungguh memalukan, negara agraris yang memiliki ratusan doktor pertanian dan puluhan ribu sarjana pertanian, bisanya hanya mengimpor.

Bulog yang ditugasi mengimpor beras, justru melahirkan koruptor-koruptor kelas kakap. Benih padi dan benih tanaman lainnya yang seharusnya menjadi perhatian malah dipinggirkan. Petani selalu menjadi objek kebijakan, menjadi objek proyek-proyek pejabat dan pengusaha rakus. Sementara jutaan petani tetap hidup miskin, dengan anak-anak yang putus sekolah dan kurang gizi. Masalah sebenarnya bukan sekadar benih. Sebab begitu banyak lahan persawahan mengering karena tak ada pasokan air atau hancur dihajar banjir karena saluran irigasi rusak berat. Begitu banyak lahan sawah produktif beralih fungsi karena dijadikan pusat perdagangan, perkantoran, permukiman, dan industri. Setiap tahun, sekitar 110.000 hektar sawah dialihfungsikan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memberi sambutan pada hari ulang tahun ke-40 Perum Bulog, di Jakarta, 10 Mei lalu, mengatakan, tak mengapa lahan sawah dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau pabrik. Alasannya, satu hektar sawah hanya bisa menyerap empat tenaga kerja, sedangkan satu hektar pabrik bisa menampung 200 tenaga kerja.

Sungguh pendapat yang naif. Logis dan praktis, tetapi sangat berbahaya untuk kelanjutan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Pernyataan itu tidak konsisten dengan program revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden Yudhoyono, Juni 2005. Sekarang Jusuf Kalla juga mendukung kerja sama impor benih padi dari Tiongkok, padahal di dalam negeri penyaluran benih padi bersubsidi juga masih kacau-balau.

Solusi mengimpor memang paling mudah dibandingkan memajukan sektor pertanian di dalam negeri, termasuk bagaimana mengembangkan benih padi berkualitas dan meningkatkan produktivitas. Pedagang pun berpesta-pora, sementara petani semakin menderita.

Rabu, 13 Juni 2007

Korupsi Ditangani Biasa Lagi?

Saat melantik kabinetnya pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan salah satu programnya adalah memberantas korupsi yang begitu merajalela. Malah Presiden berjanji, bila ada menteri-nya yang terlibat tindak korupsi, tidak akan segan-segan menindaknya.

Ketika Presiden membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), masyarakat pun maklum itulah salah satu langkah yang diambil untuk memberantas korupsi. Tim yang merupakan gabungan dari kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji yang sekarang ditunjuk menjadi Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh. Tentu masyarakat berharap banyak dari tim tersebut untuk mencabut akar korupsi yang tumbuh di mana-mana.

Baru dua tahun bekerja, Timtas Tipikor dibubarkan. Dua hari lalu (11/6) Presiden Yudhoyono membubarkan tim ini. Presiden memimpin rapat terakhir tim tersebut di Istana Negara, dihadiri 48 anggota Timtas Tipikor. Presiden menginginkan agar korupsi ditangani biasa lagi, yakni

oleh kejaksaan dan kepolisian. Sebagai ucapan terima kasih, Presiden makan siang dengan seluruh anggota Timtas Tipikor di Sekretariat Negara.

Perlu digarisbawahi keinginan Presiden Yudhoyono untuk menangani korupsi secara biasa lagi. Artinya, Presiden mempercayakan Jaksa Agung dan Kapolri menangani korupsi, salah satu tugas yang memang harus mereka emban.

Kita menyadari korupsi di negeri ini sudah bukan masalah biasa. Ibarat penyakit kanker, korupsi telah menyebar ke mana-mana dan penyakit itu sudah lama berada dalam tubuh bangsa kita. Bila pada masa Orde Baru korupsi itu cenderung ditutup-tutupi, maka pada Era Reformasi segalanya menjadi terbuka. Kita terperangah karena korupsi sudah merasuk ke mana-mana. Karena itu, untuk memberantasnya diperlukan kerja yang luar biasa, tidak bisa ditangani biasa-biasa lagi. Dalam konteks ini masyarakat dapat memaklumi kenapa pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sebagai *super body*, KPK pun pada awalnya tidak mulus melakukan pekerjaannya. Hambatan yang dihadapi begitu luar biasa. Kemudian Presiden Yudhoyono membentuk Timtas Tipikor. Malah masyarakat berharap banyak pula dari tim tersebut dalam memberantas korupsi. Masyarakat sudah merasakan betapa korupsi telah menyengsarakan. Di sana tidak ada keadilan. Kekayaan negara dinikmati satu dua orang saja.

Timtas Tipikor sudah cukup berbuat banyak dalam menangani korupsi. Hendarman mengatakan, tim yang dipimpinnya selama dua tahun telah berhasil menyelamatkan uang negara Rp3,9 triliun lebih dan aset negara di daerah sebesar Rp4,1 miliar. Masih banyak juga perkara korupsi yang ditangani. Kerja tim ini cukup cepat, efektif, dan tidak berkepanjangan. Lantas kenapa harus dibubarkan?

Pemerintah lewat juru bicaranya Andi Mallarangeng menegaskan, pembubaran tim tersebut tidak akan mengurangi fokus pemerintah untuk memberantas korupsi. Penanganannya akan dikembalikan kepada masing-masing lembaga yang ada. Presiden, kata Andi, percaya Hendarman yang dulu menjadi ketua tim tersebut kini menjadi Jaksa Agung siap melakukan pemberantasan korupsi dengan cepat dan efisien.

Kita memang mempertanyakan pembubaran Timtas Tipikor karena masih banyak tugas yang harus ditangani seperti menyelamatkan uang dan aset negara. Korupsi di Tanah Air adalah masalah luar biasa yang perlu

ditangani secara luar biasa pula. Sungguh kita terperangah dari berbagai pengungkapan dugaan korupsi belakangan ini di mana banyak elite diduga terlibat.

Kamis, 14 Juni 2007

Kebijakan versus Implementasi

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2007. Inpres mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut, dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pergerakan sektor riil, serta untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Ada 141 rencana tindak yang harus dilaksanakan oleh jajaran menteri kabinet, lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, serta bupati/wali kota. Paket kebijakan baru itu, menjadi instrumen pendukung sasaran pemerintah di bidang ekonomi pada tahun 2008, seperti pertumbuhan ekonomi 6,6-6,9 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 8-9 persen, serta pengurangan tingkat penduduk miskin menjadi 15-16,8 persen.

Secara umum, paket kebijakan terbaru yang dituangkan dalam Inpres tersebut diharapkan menjadi solusi konkret atas kesadaran seluruh bangsa mengenai macetnya sektor riil, lesunya investasi, dan rendahnya produktivitas ekonomi nasional. Padahal, sektor riil adalah penghela pergerakan ekonomi, dan investasi adalah pintu gerbang penyerapan tenaga kerja. Keduanya bersinergi memacu produktivitas nasional hingga tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang memadai.

Namun, respons yang seketika muncul ada pesimisme dari banyak kalangan, baik pelaku usaha sektor riil yang menjadi target dari kebijakan tersebut, hingga kalangan ekonom. Ada satu persoalan besar yang mengganjal, yakni mampukah pemerintah mengimplementasikan seluruh rencana tindak itu hingga membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan?

Memang pada paket terbaru ini, Presiden menempatkan aspek implementasi kebijakan, sebagai komponen penilaian kinerja para menterinya. Dengan penegasan itu, tentu diharapkan bisa memacu para menteri dan semua pihak yang terkait agar sungguh-sungguh merealisasikan 141 rencana tindak yang sudah ditetapkan.

Sayangnya, tetap saja hal itu tidak bisa mengubah sikap skeptis banyak pihak, bahwa pemerintah akan mampu melaksanakan program yang telah disusunnya sendiri. Hal itu didasari pengalaman betapa paket kebijakan hanya menjadi janji pemanis yang berhenti sebatas dokumen resmi negara. Sedari awal, pemerintah dihadang prestasi buruk di masa lalu, yang selalu gagal mengimplementasikan kebijakan. Penerbitan paket kebijakan tentu hal yang positif. Sebab itu cermin pemerintah sadar akan adanya kelemahan sehingga perlu terobosan solusinya. Pada akhirnya, langkah itu diarahkan untuk mencapai satu target tertentu.

Namun, berbicara soal paket kebijakan bidang ekonomi, yang sangat dibutuhkan adalah implementasi nyata dan hasil akhir sebagaimana yang diharapkan. Sebab pada kenyataannya, banyak paket kebijakan ekonomi yang tak memberi dampak signifikan bagi peningkatan produktivitas nasional.

Contoh konkret, bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005, pemerintah juga mengeluarkan paket insentif bagi pengusaha yang terkena dampak dari kenaikan tersebut. Hingga kini hasilnya tak jelas. Pengusaha masih kesulitan untuk memajukan usahanya. Pelaku UMKM pun tak mampu memproduksi secara optimal.

Tentu kita berharap terbitnya Inpres No 6 Tahun 2007 tak sekadar komitmen normatif untuk mencitrakan keseriusan pemerintah. Sebab, kita membutuhkan kebijakan yang implementatif dan efektif mengatasi segala hal yang mengganjal perputaran roda ekonomi.

Untuk itu, kita menuntut pemerintah harus punya keseriusan untuk memperbaiki diri, yakni mampu melaksanakan semua kebijakan itu secara konsekuen dan bertanggung jawab. Sehingga seluruh sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dan dirasakan masyarakat. Pada akhirnya, perekonomian nasional menemukan momentum pemulihan yang sejati.

Jumat, 15 Juni 2007

Sempurnakan Protap TNI

Tindakan Marinir terhadap warga Alastlogo, Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, tidak berdampak luas atau menjadi bola liar seperti sekarang ini, jika saja prajurit di lapangan menaati prosedur tetap (protap) saat berhadapan dengan aksi massa.

Sayang, prajurit itu mengabaikan protap yang sudah dimiliki TNI. Dalam protap dikatakan,⁸ prajurit tidak diperkenankan menembak langsung ke kerumunan massa. Jika massa berdemonstrasi secara damai, aparat harus mengamankan karena merupakan hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun, jika bertindak anarkis, massa bisa saja dibubarkan.

Untuk membubarkan massa, dengan cara negosiasi. Kalau upaya itu gagal, prajurit bisa menggunakan alat pukul tumpul dan bukan senjata api. Kalau perlu menggunakan gas air mata atau *water cannon* (meriam air). Tembakan peringatan ke udara juga hanya diperbolehkan jika kondisi aparat sudah sampai pada level terancam.

Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI, Kolonel Ahmad Yani Basuki yang menjelaskan protap tersebut, menyusul janji Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, akhir Mei lalu, untuk mengevaluasi sistem pembinaan personel, khususnya prajurit di lapangan. Sayang, protap TNI yang sangat baik itu cacat di tingkat implementasi. Fakta penembakan empat warga Pasuruan, sebagai bukti. Tapi dalam raker dengan Komisi I DPR, Rabu (13/6), Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen Nono Sampono lagi-lagi mengatakan, penembakan di Pasuruan sudah sesuai protap.

DPR berang. Mereka menangkap sinyal lain dari pernyataan Nono, bahwa protap seolah-olah membenarkan penembakan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Karena itu, tak heran jika politisi senior PAN, Abdillah Toha mengatakan, Dankormar tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang membenarkan tindakan prajurit menghilangkan nyawa orang. Bahkan Toha bertanya, protap seperti apa yang membenarkan TNI dapat menghilangkan nyawa orang?

Ada upaya dari Dankormar merasionalisasikan protap agar TNI tidak dijadikan sasaran tembak. Namun, upaya itu gagal mengubah cara pandang DPR yang sudah telanjur melihat kekerasan yang dilakukan aparat sebagai pelanggaran HAM.

Ketua Komisi I Theo L Sambuaga mengatakan, penembakan itu, baik langsung maupun pantulan, adalah pelanggaran hukum. Patroli yang dilakukan anggota Marinir juga bertentangan dengan tugas utama TNI menjaga keutuhan negara dan perbatasan. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pun tidak membenarkan tindakan penembakan terhadap rakyat.

Ketegangan raker dengan DPR diredam ketika Panglima TNI mengklarifikasi bahwa TNI belum sampai pada kesimpulan tindakan Marinir sesuai protap. Kasusnya sedang diproses.

Panglima terpaksa berbeda pandangan soal protap dengan bawahannya untuk menunjukkan TNI tidak mau kecolongan lagi. Panglima TNI kemudian berjanji akan menyempurnakan protap. Dan kalau itu yang ditempuh, penembakan warga di kemudian hari bisa diminimalisir, dan citra buruk TNI terutama Marinir yang selama ini dekat dengan rakyat dipulihkan. Pasalnya, kejadian Pasuruan merupakan penistaan terhadap hukum dan HAM di saat negara kita masih dalam masa transisi demokrasi, di mana peran TNI diharapkan kembali pada fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

Dan tragedi Pasuruan menarik mundur imajinasi kita akan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan TNI pada masa lalu. Saat itu, TNI memiliki kekuasaan sangat besar dan bertindak sewenang-wenang. Panglima TNI tentu tidak ingin citra buruk itu terulang kembali, dan karena itu, evaluasi protap menjadi mendesak untuk dilakukan.

Republika

Senin, 11 Juni 2007, Tajuk

Bangsa yang Mandiri

Kita menyambut baik rencana pemerintah merevitalisasi industri strategis dalam negeri, termasuk industri pertahanan dan keamanan. Bahkan, kita berpandangan rencana ini sudah sangat terlambat karena dipicu adanya sebuah peristiwa. Yakni adanya ancaman dari Kongres Amerika Serikat (AS) yang akan membatasi (embargo) kerja sama militer AS-RI.

Ancaman Kongres AS itu terkait dugaan adanya pelanggaran berat dalam bentrok antara warga dan pasukan marinir TNI AL di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Kita tentu saja mengutuk penembakan terhadap warga dengan alasan apa pun dan, karena itu, menuntut aparat keamanan dan hukum mengusut tuntas dan mengadili para pelakunya.

Namun, ancaman Kongres AS itu juga mengkhawatirkan kita dan sekaligus mengingatkan bahwa kita sebenarnya pada posisi lemah. Kalau

benar AS mengembargo Indonesia dalam hal pasokan senjata dan suku cadang pesawat (perang) serta latihan militer, maka ini bukan yang pertama. Sebelumnya AS juga telah melakukan hal yang sama ketika dua warganya tewas tertembak dalam sebuah peristiwa di Timika, Papua.

Ketika embargo itu dilakukan, kita ternyata tidak bisa berbuat banyak karena posisi Indonesia yang lemah. Lemah lantaran kita belum bisa mandiri. Kita masih bergantung pada pihak lain. Bukan hanya dalam hal kebutuhan industri persenjataan dan suku cadang pesawat, tapi juga berbagai macam industri lainnya. Karena itu, industri strategis sebenarnya bukanlah hal yang mewah. Ia mutlak diperlukan setiap negara modern yang ingin maju dan mandiri, ada atau tidak ada ancaman dari pihak luar seperti dilakukan Kongres AS terhadap Indonesia.

Terkait dengan industri strategis ini, apa yang sudah dirintis BJ Habibie ketika menjadi Menristek seharusnya diteruskan. Terlepas dari berbagai kekurangan dan kritik yang diarahkan kepada kebijakan dia, faktanya ia telah berhasil meletakkan dasar-dasar industri strategis. Ia juga sudah menelorkan ribuan doktor dan insinyur yang ahli dalam bidang sains dan teknologi.

Mereka rata-rata adalah anak muda. Karena salah arah kebijakan pemerintahan pasca-reformasi dalam hal industri strategis ini, anak-anak muda yang potensial itu kini banyak yang bekerja di luar negeri. Tentu saja, ketika kita membangun kembali industri strategis ini, berbagai kekurangan dan kritik yang diarahkan pada kebijakan BJ Habibie harus dijadikan catatan. Catatan itu antara lain, proyek-proyek industri strategis Habibie dianggap sebagai 'mercusuar', terlalu mewah, dan memberatkan APBN.

Terlepas dari argumentasi yang membenarkan kebijakan BJ Habibie untuk membangun industri pesawat terbang, beberapa hal memang perlu diperhatikan untuk merevitalisasi industri strategis dalam negeri sekarang ini. Yakni proyek besar itu harus membumi, tepat guna, dan memberi nilai lebih kepada bangsa. Selain persenjataan (Pindad), kapal laut (PAL), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), dan kereta api, industri strategis yang menyangkut hidup orang banyak mesti diutamakan. Misalnya bagaimana menciptakan industri yang dapat melipatgandakan hasil pertanian, pengelolaan hasil hutan, hasil laut, dan berbagai macam hasil tambang.

Berbagai kekayaan alam kita harus dikelola secara modern. Tidak seperti selama ini yang hanya diurus secara tradisional. Bukan hanya itu. Beberapa hasil hutan, pertanian, dan laut kita ekspor setengah jadi. Negara lain yang kemudian memberi nilai lebih kepada hasil ekspor kita. Akibatnya, orang lainlah yang mendapat untung.

Yang diperlukan kini adalah arah kebijakan pemerintah yang tepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi, serta didukung oleh berbagai pihak. Hanya dengan ini bangsa kita bisa mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Tanpa ini semua, negara kita yang dianugerahi berbagai kekayaan alam akan tetap miskin rakyatnya.

Selasa, 12 Juni 2007

Penurunan Harga Minyak Goreng Gagal

Harga minyak goreng belum turun, bahkan cenderung naik. Upaya pemerintah untuk menekan harga minyak goreng tak membuahkan hasil. Operasi pasar, di berbagai daerah, diakui tidak efektif. *Domestic Market Obligation* (DMO) yang mewajibkan produsen memasok minyak sawit mentah, bahan baku minyak goreng, ke dalam negeri, belum diberlakukan secara konsisten. Bahkan, ketika pertengahan bulan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 'meminta bantuan' kalangan pengusaha dan produsen agar menjual CPO dengan harga murah, juga tak membantu.

Sampai awal pekan ini harga minyak goreng masih berada di kisaran Rp9.000 sampai Rp10.000 per liter. Kalangan produsen kelihatannya juga masih mengutamakan ekspor ketimbang dalam negeri lantaran harganya memang sedang tinggi, dan menjanjikan keuntungan menggiurkan. Mereka bisa saja berpikir DMO bukan alasan untuk mengurangi ekspor, alias meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Begitu pula dengan pengenaan pajak ekspor. Ironisnya, Indonesia, sampai hari ini masih tercatat sebagai produsen CPO terbesar dunia, dengan produksi sekitar 16,8 juta ton. Jumlah ini, mestinya, memungkinkan pasokan minyak goreng berlebih. Apalagi, rata-rata konsumsi minyak goreng hanya sekitar empat juta ton per tahun. Nyatanya tak seperti itu.

Produsen masih lebih banyak tergiur keuntungan besar di pasar ekspor. Begitulah mekanisme pasar. Pemerintah memang tak punya

kemampuan untuk mengendalikan pasar. Masalahnya, kita juga tak punya sistem, mekanisme, aturan main, atau apa pun namanya, yang bisa mencegah atau secepatnya mengatasi kenaikan harga. Kalaupun ada, terbukti tak banyak membantu. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mestinya bisa segera berperan, justru berkilah menunggu payung hukum. Pemerintah tak berdaya menghadapi mekanisme pasar.

Buktinya, seorang pejabat pemerintah mengakui sulit menurunkan harga minyak goreng ke harga sebelumnya, dan kita harus bisa menerima titik keseimbangan harga baru, yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Kita, masyarakat, diberi waktu –kalau tak mau dibilang 'dipaksa'– melakukan penyesuaian. Ini mungkin cermin kegagalan pemerintah menekan, mengendalikan harga minyak goreng. Bukti lain, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu malah menetapkan target harga minyak goreng Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter. Target harga minyak goreng tersebut diharapkan tercapai paling lambat awal Juli 2007. Target ini jelas lebih tinggi dari target sebelumnya di kisaran Rp6.500 hingga Rp6.800. Jauh pula dari harga sebelum kenaikan terjadi.

Titik keseimbangan baru. Boleh jadi, ke depan, istilah tersebut akan lebih banyak dilontarkan untuk menyebut kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Apalagi pemerintah kerap lebih menerapkan langkah-langkah yang lebih reaktif, semacam operasi pasar. Seolah, dengan operasi pasar, semua persoalan beres dan harga berhenti melambung. Pemerintah mungkin lupa sekarang ini hampir semua komoditas sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, sesuatu yang sulit dikendalikan cuma dengan operasi pasar.

Kita tentu tidak berharap apa yang terjadi pada minyak goreng bakal terjadi pula pada komoditas lain semacam semen, pupuk, gula, beras, garam, terigu, daging, dan kebutuhan strategis lainnya. Tapi kita juga sama-sama tahu, tindakan pemerintah yang lebih bersifat reaktif, jarang menyelesaikan masalah. Hampir semua komoditas penting kebutuhan masyarakat sulit terjamin ketersediaannya. Harga dan keamanan pasokan berbagai komoditas strategis selalu berada pada kondisi rawan atau pas-pasan. Haruskah kita terbiasa dengan situasi seperti ini?

Rabu, 13 Juni 2007

Pembatalan DCA

Kita tak kaget mendengar tentang sulitnya penerapan perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) Indonesia dengan Singapura. Sejak awal perjanjian ini memberatkan kita karena hanya menjadi iming-iming bagi terwujudnya perjanjian lain, yaitu soal ekstradisi. DCA lahir sebagai kado yang tentu saja dikemas untuk menyenangkan Singapura.

Dan, sayangnya, kado ini terbungkus sangat rapat, sampai-sampai DPR pun tak tahu isinya. Pada tahap implementasi dan kado terkuak, baru-lah kita sadar betapa Singapura mendapatkan sangat banyak dari perjanjian tersebut. DPR pun mulai anjang-ancang untuk menolak meratifikasi perjanjian itu. Beberapa fraksi bahkan sudah terang-terangan menentang. Menteri Pertahanan, kendati tidak bicara soal pembatalan, pun menyebut adanya keberatan Pemerintah RI atas "kebebasan" Singapura berlatih tanpa melibatkan Indonesia.

Singapura tak jua menanggapi keberatan itu. Cukup beralasan. Mereka tetap perlu tempat latihan yang tak terintip negara lain. Mereka juga selalu berlatih tempur dengan negara-negara yang Indonesia tak nyaman menerimanya, sebutlah Israel dan Amerika Serikat. Kalau Indonesia masuk melalui aturan pelibatan, mereka takkan mendapatkan kedua hal itu.

TNI AL sejak awal sudah mengingatkan tentang "udang di balik batu" pada latihan Singapura. Tak ada keuntungan bagi TNI AL dari perjanjian tersebut. Angkatan laut kita justru cemas Singapura dapat merekam semua situasi laut di tempat latihan dan memanfaatkannya untuk kepentingan militer mereka. Belum lagi adanya risiko-risiko latihan, pe-nembakan rudal misalnya, yang Singapura maunya mengatur sendiri.

Kita kian berat memberikan kado tempat latihan tersebut karena Singapura juga menarik diri dari kesepakatan ekstradisi. Singapura ternyata enggan menyerahkan para buron kita yang tersangkut kasus korupsi, apalagi uangnya. Singapura tak mau citra mereka yang sangat baik dalam survei-survei indeks persepsi korupsi hancur karena mengakui dana haram menjadi mesin ekonomi mereka lewat para buron asal Indonesia tersebut. Sudah saatnya kita melihat situasi-situasi itu dengan lebih jujur.

Kita tampaknya akan tetap sulit membawa pulang para koruptor dan uang yang mereka bawa lari. Jadi, mengapa pula kita harus merendahkan

diri dengan memberikan wilayah kita kepada mereka? Apalagi, pada 2003, Singapura pernah menyalahgunakan hak latihan yang kita berikan.

Kita tidak sedang membuat provokasi buruk. Ini adalah pandangan tentang kesetaraan hubungan dua negara bertetangga yang sama-sama berdaulat dan saling membutuhkan. Malaysia telah menempatkan diri dalam posisi ini saat harus berhadapan dengan Singapura. Terjadi perdebatan sengit soal tempat latihan militer bagi Singapura sekaligus pembangunan jembatan Johor-Singapura. Saat jembatan yang akan menguntungkan Malaysia itu batal, tempat latihan bagi Singapura pun urung.

Kamis, 14 Juni 2007

Dimensi Konflik Tanah

Akhir-akhir ini konflik tanah mengalami eskalasi dan memiliki dimensi baru. Kasus Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur; Meruya, Jakarta; dan Sungai Nibung, Tulangbawang, Lampung; memperlihatkan dimensi lain dalam kasus tanah. Jika sebelumnya kasus tanah berdimensi konflik antara negara dan rakyat, kini telah mengalami pergeseran: pengusaha melawan rakyat.

Dalam kasus pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, pembangunan waduk, dan berbagai fasilitas umum lain, rakyat memiliki posisi tawar yang lebih baik. Selain nilai pembebasan lahan tak lagi beristilah "ganti rugi" tapi "ganti untung", juga konstitusi menjamin hak-hak rakyat jika merasa belum mendapat nilai penggantian yang sesuai. Negara tak bisa mengeksekusinya. Namun, untuk kasus Alas Tlogo (walau di depannya adalah Marinir, namun di belakangnya ada kontrak dengan pengusaha), Meruya, dan Sungai Nibung merupakan kasus yang bersifat horizontal: sesama warga negara. Bedanya yang satu rakyat biasa, lainnya rakyat yang memiliki kekuatan uang dan akses terhadap kekuasaan.

Para pengusaha bisa lebih mudah memiliki kekuatan kelengkapan administratif maupun aspek yuridis lainnya. Tak perlu di pelosok, di pusat kota pun rakyat dalam posisi yang lemah. Apalagi jika kemudian alat-alat negara seperti pengadilan dan aparat mudah dijangkau oleh perselingkuhan. Pada situasi demikian, kita harus cermat dan hati-hati.

Dalam kasus Meruya, Alas Tlogo, dan Sungai Nibung para pengusaha berhadapan dengan ratusan bahkan ribuan keluarga. Mereka menempati

petak-petak tanah yang cuma untuk rumahnya berdiri. Jika atas nama hukum secara pukul rata saja memerintahkan untuk menyingkirkan rakyat maka di sini ada dilema. Soalnya tak sederhana bahwa mereka telah menempati tanah-tanah itu secara tidak sah di atas milik orang lain. Di sana ada sejarah yang berliku. Di Meruya, mereka telah memiliki sertifikat. Di Sungai Nibung ada masalah dengan tanah yang sebelumnya milik negara. Di Alas Tlogo ada sejarah tanah yang rumit di masa lampau. Ujungnya adalah pada sejarah tanah itu sendiri.

Indonesia memang mewarisi administrasi yang lemah. Kita "beruntung" (sic!) pernah dijajah Inggris, walau sebentar. Karena saat itu Thomas Stamford Raffles melakukan administrasi tanah –yang tak pernah dilakukan Belanda. Namun, ketika politik tanam paksa dilakukan kolonial Belanda, tanah-tanah rakyat dirampas untuk dijadikan perkebunan. Setelah merdeka, tanah-tanah itu tetap dikuasai negara. Akhirnya, kita menyaksikan bahwa daerah di sekitar perkebunan selalu memperlihatkan wajah kemiskinan. Karena rakyat tak memiliki tanah untuk penghidupan. Pada 1960-an, pemerintah hendak melakukan reformasi agraria (*land reform*). Program ini gagal akibat pecahnya G30S/PKI.

Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa pemerintah akan membagikan tanah ke rakyat. Hingga kini kita belum mendengar seperti apa sosoknya. Yang pasti, di masa Orde Baru, pemerintah membagikan tanah-tanah perkebunan yang dikonversi untuk keperluan lain justru ke pengusaha bukan ke rakyat sekitar. Sehingga, kita belum pernah mendengar ada "tanah untuk rakyat" seperti bunyi UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada dimensi inilah, kita mesti berpaling ke konstitusi dasar kita dalam melihat konflik tanah akhir-akhir ini. Terutama untuk konflik tanah yang memiliki dimensi sejarah yang rumit hingga ke masa lampau. Tentu kita tak ingin konflik tanah akhir-akhir ini kemudian berujung pada menambah daftar orang miskin. Padahal, tanpa itu pun daftar mereka terus bertambah.

Jumat, 15 Juni 2007

Paket Kebijakan

Untuk kelima kalinya paket kebijakan ekonomi diluncurkan oleh pemerintah. Kali ini sektor riil dan usaha kecil menjadi fokus, yang terangkum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan-

an Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Inpres tersebut menugaskan kepada Menko Perekonomian dan 19 menteri lain, tiga kepala lembaga pemerintah nondepartemen, semua gubernur, bupati, dan walikota untuk melaksanakannya. Karena itulah banyak kalangan menggantungkan harapan cukup tinggi terhadap implementasi kebijakan ini. Memang ada pro-kontra. Para ekonom di Tim Indonesia Bangkit menilai kebijakan ini lebih pada tataran kosep, paket ini tidak banyak menyentuh secara aksi nyata sektor riil, termasuk usaha kecil. Belum lagi sektor pertanian, di mana sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor itu, sama sekali tidak disinggung dalam kebijakan ini.

Di sisi lain, para pelaku ekonomi menyambut positif deregulasi atau yang sekarang lebih banyak disebut sebagai reformasi regulasi ini. Hanya saja, mereka minta kebijakan ini tidak hanya di atas kertas, tetapi segera terwujud nyata di lapangan agar para pelaku dapat segera memperoleh manfaat langsung.

Bagaimanapun kita memang perlu percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan enam persen per tahun seperti sekarang ini akan sangat berat bagi perjalanan perekonomian ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berada di kisaran tujuh persen, selain itu juga harus tumbuh berkualitas.

Sektor moneter dan sektor riil sama-sama memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kini, setelah sektor moneter sudah stabil dan terjaga, giliran sektor riil perlu ditengok lebih dalam. Karena itulah dalam paket ini pembenahan sektor riil lebih mendominasi.

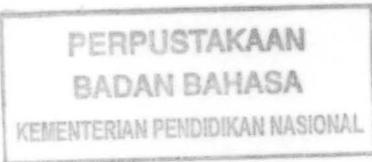
Pembenahan sektor riil dalam paket kebijakan ini banyak menyentuh pada birokrasi yang sampai saat ini masih amburadul. Mulai dari percepatan pengurusan pembentukan badan usaha sampai percepatan pengurusan dokumen ekspor-impor. Mulai dari sinkronisasi aturan di daerah dan pusat sampai manajemen pembangunan infrastuktur.

Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang sudah sepatasnya menjadi perhatian utama. Selama ini UMKM kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan hanya menjadi objek dan sebagai komoditas politis ketimbang aksi nyata untuk mengembangkannya.

Padahal, berdasarkan data Kantor Kementerian Koperasi, pada 2006 jumlah UMKM 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia, atau sekitar 48,9 juta unit. Dari situ dapat dipastikan pula bahwa sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor UMKM ini. Sebuah sumbangan yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

Pada akhirnya, ujung dari sebuah kebijakan pemerintah, terutama kebijakan ekonomi, adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah rakyat miskin. Tanpa ada reformasi kebijakan, ekonomi akan tumbuh seadanya, maka penurunan pengangguran dan angka kemiskinan pun takkan terjadi. Kesejahteraan rakyat hanya menjadi angan-angan.

Selama ini kita dikenal sebagai jagoan di konsep tetapi lemah di pelaksanaan. Pameo itu harus kita patahkan: Jago di konsep, jago pula di pelaksanaan. Banyak yang berharap kebijakan ini bisa mengangkat perekonomian, maka jangan biarkan harapan itu menjadi kekecewaan.



Perkembangan kosakata bahasa Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa dari segi frekuensi kosakata dominan dalam surat kabar ibu kota memperlihatkan tingginya frekuensi pemakaian kata gramatikal yang sebanyak 596. Kelas kata nomina merupakan kelas kata yang dominan jika dibandingkan dengan verba, adjektiva, adverbial, partikel, pronominal kata tugas, dan numeralia. Jenis kalimat yang dominan adalah kalimat deklaratif atau berita dan dalam pemakaian diksi atau pilihan kata yang terdapat dalam surat kabar ibu kota ditinjau dari segi kelayakan stilistik, ragam formal lebih dominan daripada ragam takformal dan unsur bahasa asing. Sementara itu, pemakaian kata yang tepat dan cermat, penelitian ini cenderung diwarnai oleh pemakaian kata yang denotatif (harfiah) diikuti oleh pemakaian atau pemilihan kata konotatif (tidak harfiah, pada umumnya makna konotatif lebih banyak dijumpai dalam bentuk kiasan atau majas), hiponimi dalam pilihan kata, makna asosiatif, dan makna afektif atau emotif.

**Pusat Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta Timur 13220**

www.pusatbahasa.diknas.go.id

ISBN 978-979-069-010-3